

SIAUW

GIOK

TJHAN

GOTONG
ROJONG
NASAKOM

untuk

MELAKSANAKAN
AMPERA

Siauw, Giok Tjhan

GOTONGROJONG NASAKOM

untuk
melaksanakan **AMPERA**



**Bagian Penerbitan
Baperki**

P R A K A T A.

Seksi Penerangan bagian Penerbitan Pengurus Harian Pusat „Baperki” merasa perlu untuk menerbitkan buku ini, jang disusun berdasarkan Amanat Presiden Soekarno pada Kongres Nasional ke-VIII Baperki di Djakarta dan bahan² Kongres Baperki ke-VIII itu, berdasarkan pertimbangan² antara lain sebagai berikut :

a. Mentjegah kekaburan pengertian tentang pendapat² mengenai „Indonesia tidak mengenal adanja minorita”, mengenai apa jang dinamakan „assimilasi”, mengenai berbagai persoalan pembinaan persatuan bangsa.

b. Membina pendapat umum jang kokoh-sehat dan konstruktif jang menguntungkan usaha memperkokoh Front Nasional sebagai alat „samenbundeling van alle revolutionaire krachten” dengan djalan memperdjelas dan meratakan pengertian, bahwa revolusi Indonesia mengenal dua matjam tahap dan tudjuannja mentjapai masjarakat sosialis Indonesia, masjarakat adil dan makmur jang tidak mengenal lagi adanja penghisapan manusia oleh manusia. Untuk mentjapai tudjuan revolusi ini kita perlu bekerdja keras, berdjuang tanpa mengenal putus asa untuk mengerahkan seluruh potensi nasional progressif tanpa mengenal diskriminasi matjam apapun, sehingga idaja produksi nasional dapat dipertinggi setjara terus-menerus, jang tegas mempertinggi tingkat kemakmuran Rakjat terbanjak setjara njata, sehingga perbedaan tingkatan social-ekonomis lambat-laun mendjadi melenjap.

c. Memperkokoh kesadaran, jang menimbulkan keuletan, akan tugas warga-negara Indonesia dalam revolusi jang multi-complex ini, sehingga timbullah keichlasan untuk selalu mendahulukan kepentingan nasional dan kepentingan revolusi diatas kepentingan golongan jang manapun djuga, berdasarkan kejakinan, bahwa terdjaminnja kepentingan nasional, terdjamin tertjapainja tudjuan revolusi, akan menguntungkan semua golongan Rakjat jang setia pada tanah-air dan Rakjat.

d. Membangkitkan kegiatan untuk terus-menerus beladjar dan mempertinggi technical skill dan technical know-how untuk mempertinggi kemampuannja mengabdikan pada revolusi dan kepentingan Rakjat.

e. Mempertinggi kewaspadaan nasional-revolusioner untuk menjegah penjelewengan², pensalah-gunaan wewenang dan untuk menggalang pemersatuan kekuatan revolusioner yang kompak dan dinamis sehingga tidak memungkinkan lagi adanya kegiatan kontra-revolusioner.

Semoga penerbitan ini berguna bagi pembinaan persatuan bangsa, yang mewujudkan kegotong-rojongan nasional revolusioner berporoskan Nasakom, sehingga nation building Indonesia, yang mewujudkan masyarakat sosialis Indonesia, dapat menjadi kenyataan dalam waktu yang lebih tjepat lagi.

Penerbit.

Amanat P.J.M. Presiden Sukarno Pada Kongres Nasional Ke-VIII Baperki

Diutjapkan pada 14 Maret 1963 di „Gelora Bung Karno“

Saudara-saudara dan anak-anakku sekalian,

Lebih dahulu saya menjatakan terima kasih saja dan rasa terharu saja berhubungan dengan dibuatnja dan dinjanjikannja lagu „Hiduplah Bung Karno“ yang beberapa detik yang lalu kita bersama-sama mendengarkan. Terima kasih! Disamping mengutjapkan terima kasih itu saja menjatakan kekaguman saja atas kemahiran komponis daripada lagu ini yang dari Saudara Siauw Giok Tjhan saja mendengar bahwa komponistenja ialah seorang puteri jaitu Saudara Effie Tjoa.

Saudara-saudara sekalian, saya diminta untuk memberi sambutan, amanat sekedarnja kepada resepsi pembukaan Kongres Nasional Baperki yang ke-8 ini. Tadi Saudara Bapak Ruslan Abdugani telah berkata bahwa beliau berbitjara sebagai voorrijder dari saja. Saudara tahu bahwa saya resmi sebagai Presiden, kalau berkendara mobil dari suatu tempat ketempat lain, ada voorrijdernja, jaitu orang atau orang² yang mendahului perdjalan mobil saja itu, untuk membuka djalan. Malah ada yang lebih lagi mendahului perdjalan saja, itu bukan sadsja voorrijder tapi sweeper, penjapu bersih. Presiden harus ada voorrijder, harus ada sweeper. Saya pernah berkata: mbok ja tidak usah ada voorrijder, ada sweeper. Tapi anggota² Pemerintah dan semua staf dari istana berkata: **Menurut** aturan harus demikian Pak. Ja saya menurut sadsja. Saja ini kadang² mau nglujur sendiri, tapi tidak boleh. Selalu dengan voorrijder, selalu dengan sweeper. (**Hadirin tertawa**).

Tadi Pak Ruslan berbitjara, kata beliau sebagai voorrijder saja. Pada waktu saja mendengar pidato Pak Ruslan, saya ingat kepada kerbau dan gudel. Anak kerbau itu dikatakan gudel, anak ajam dikatakan kutuk, anak **banteng** dinamakan nener, anak kuda dinamakan belo. Dalam bahasa Djawa anak kerbau dinamakan gudel. Ada peribahasa Djawa yang mengatakan: „Kebo njusu

gudel", kerbau menjusu kepada gudel, kepada anaknja sendiri. Pak Ruslan itu dulu murid Bapak. Waktu belakangan ini, beberapa tahun belakangan ini, tiap² kali saja mendengar Tjak Ruslan Abdulgani berpidato, saja mendapat perasaan : wah, ini gudel ini bukan main. (tepuk tangan). Gudel ini mengalahkan kebo. Gudel ini sekarang melebihi kerbaunya. Tapi saja senang dan bergembira atas hal jang demikian itu. Moga² malahan Tjak Ruslan dari gudel mendjadi banteng jang sehebat-hebatnja. (Tepuk tangan). Dan djuga pemuda² dan pemudi² jang duduk disitu (sambil menundjuk kepada hadirin) semuanya mendjadi banteng² Indonesia.

Saudara², Baperki sekarang mengadakan pembukaan resepsi Kongresnja jang ke-8, memasuki tahun jang ke-10 kata Tjak Siauww dengan plentong Djawa-Timur. Tjak Siauww tadi berkata : „Baperki sekarang masuk usia jang ke-sepooloooh” Demokrasi Terpimpin oleh Tjak Siauww dikatakan „Demokrasi Terpempén”, malah berkali-kali mengeluarkan kata alasan mendjadi „alésan”. (Hadirin tertawa).

Saudara², Baperki sekarang mengadakan Kongresnja jang ke-8. Saja diundang datang kesini djauh-djauh sebelum ada Kongres ini dan pada waktu pertama kali ditanja kepada saja sudilah kiranja Paduka Jang Mulia Presiden datang kepada Kongres Baperki, saja djawab : „Ja, Insjaallah saja mau datang.” Sebab apa ? Sebabnja ialah Baperki itu suatu perkumpulan jang baik. Baperki tegas berdiri diatas Pantja Sila. Baperki tegas membantu terlaksananya amanat penderitaan Rakjat. Baperki tegas berdiri diatas Manipol, Usdek dan lain sebagainya. Baperki adalah salahsatu pedjuang daripada revolusi Indonesia ! (Tepuk tangan.)

Jah, kita sekalian ini sebenarnja Saudara², untuk menjelesaikan revolusi.

Njonja Lie maupun Tjak Siauww tadi berkata : „Bung Karno jang tertjinta”. Saja mengartikan itu terutama bukan kepada persoon saja. Tapi tertjinta itu, tjinta itu ditudjukan kepada revolusi Indonesia jang saja ini oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara didjadikan Pemimpin Besar Revolusi. Dan saja pernah berkata bahwa saja tidak mengangkat diri saja mendjadi Pemimpin Besar Revolusi. Tidak !

Didalam salahsatu pidato saja berkata bahwa pemimpin itu bukan karena angkatan sendiri, tidak ! Tapi dari perasan. Dulu seorang wartawan menulis „perasaan”. Itu keliru, jang saja maksud ialah „perasan”, diperes..... jah, keluar pemimpin. Suatu rakjat jang berdjuaang, dalam perdjuaangan itu dia seperti memeras..... nah, keluar pemimpinnja ! Pemimpin jang benar pemimpin adalah perasan daripada perdjuaangan. Saja Saudara², dinamakan oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Pe-

mimpin Besar Revolusi. Barangkali saja ini adalah salahsatu perasan daripada revolusi ini.

Maka oleh karena itu, manakala Tjak Siauww atau Njonja Lie mengutjapkan kata „tertjinta” kepada saja, saja kembalikan ini kepada revolusi. Jang ditjintai itu adalah revolusi Indonesia. Maka dari itu jang ditjintai adalah perdjuaangan untuk menjelesaikan revolusi Indonesia.

Berulang-ulang Baperki berkata bahwa Baperki aktif menjelesaikan revolusi Indonesia. Baperki tetap berdiri pada Pantja Sila dan segala unsur² untuk menjelesaikan amanat penderitaan rakjat. Oleh karena itu maka saja dengan gembira dan senang hati datang pada resepsi Kongres pada waktu ini.

Saudara², saja ini diangkat mendjadi Presiden Republik Indonesia berdasarkan atas Undang-undang Dasar 1945. Pada tanggal 17 Agustus 1945 dibatjakan proklamasi di Pegangsaan Timur dimana sekarang berdiri Gedung Pola. Dimuka Gedung Pola itu ada tugu. Tugu itu ditaruh persis ditempat jang dulu saja indjak untuk membatjakan proklamasi '45; tugu Pegangsaan Timur 56 itu adalah tempatnja. Diatas tugu itu ada gambarnya petir, gambar gledek. Oleh karena ditempat itu dulu dibatjakan naskah Proklamasi. Dan Naskah Proklamasi itu memang boleh dikatakan petir, gledek jang didengarkan oleh 5 benua dan 7 samudera.

Tempo hari saja pernah berpidato bahwa nama Indonesia terkenal dan termasjhur pertama kali pada tahun 1883 tatkala gunung Krakatau meledak, tatkala gunung Indonesialah pertama kali mengorbitkan batu dan pasir didalam angkasa. Batu dan pasir disebarkan keatas oleh Krakatau itu dan masuk kedalam orbit, mengelilingi dunia bertahun-tahun sehingga tiap² waktu sore, waktu sendja langit di Amerika, langit di Eropa kelihatan warna daripada pengorbitan batu² dan pasir² Indonesia itu. Tahun 1883, pertama kali Indonesia mengagumkan dunia.

Kemudian dalam pidato saja dimuka Front Nasional tanggal 13 Pebruari jang lalu saja berkata : Untuk kedua kalinya nama Indonesia termasjhur pada 17 Agustus 1945.

Saja menghendaki agar supaja nama Indonesia itu sering mendjadi sebutan orang² didunia ini, bukan karena perbuatan Indonesia jang djelek tidak, tapi hendaknja karena perbuatan² Indonesia sebagai mertjusuar daripada umat manusia didunia ini.

Saudara², didalam keadaan jang demikian itulah kita sekarang itu berada. Kita telah dapat memasukkan Irian Barat dalam wilayah kekuasaan Republik, jang nanti akan terlaksana pada tanggal 1 Mei jang akan datang, tinggal puluhan hari lagi. Itupun seperti suatu ledakan dari gunung Krakatau, dilihat dan disaksikan oleh seluruh dunia.

Kita telah dapat menjelesaikan soal keamanan dalam garis

besarnya. Tinggal satu jang belum, jaitu program ketiga dari Tri-program Pemerintah : program Sandang-Pangan. Dan disini sekalian harus mentjurahkan segala tenaga agar soal Sandang-Pangan ini lekas terpetjahkan.

Tadi Tjak Ruslan telah menggambarkan kepada Saudara² tekad dari Pemerintah Republik Indonesia bahwa Republik Indonesia pemerintahnja tetap memegang teguh Triprogram itu. Tetap hendak menjelesaikan Triprogram ini, dus akan menjelesaikan program ketiga daripada Triprogram jang berbunji : Sandang-Pangan ini. Bukan meninggalkan Triprogram ini ! Tapi tetap berpegang teguh kepada Triprogram ini, sambil mengintegrasikan segenap tenaga rakjat sebagai jang dimaksud oleh Pantja Program Front Nasional. (Tepuk tangan.)

Maka oleh karena itu Baperki dengan tegas menjokong, bukan sadja menjokong, bahkan ingin dibawa ikut serta didalam pelaksanaan Pantja Program Front Nasional itu. Maka saja merasa amat berbahagia dan memberi restu saja kepada Baperki. (Tepuk tangan.)

Saja tadi berkata bahwa saja berpidato disini bukan sadja sebagai Bung Karno jang tertjinta, tapi sebagai Presiden dari Negara Republik Indonesia. Undang-undang Dasar kita diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan esok harinja pada 18 Agustus 1945 diterima dengan resmi oleh Musjawarah Pemimpin². Djadi Undang-undang Dasar '45 itu sebetulnja resmi lahirnja tanggal 18 Agustus 1945.

Dan didalam Undang-undang Dasar '45 ditulis satu hal, dan hanya sekali itu disebut perkataan „asli“, jaitu bahwa Presiden Republik Indonesia harus seorang warganegara Indonesia asli.

Wah, bagaimana ini ? Ditulis didalam Undang-undang Dasar '45 bahwa Presiden Republik Indonesia harus orang Indonesia asli. Saja dianggap orang Indonesia asli. Taroh tiga garis dibawah perkataan „dianggap“, dianggap streep-streep-streep, dianggap orang Indonesia asli. Saja bertanja kepada saja sendiri kadang² : „Bung Karno, opo kuwé iku asli ?“ (Tepuk tangan.) Jah, barangkali saja ini dianggap asli Indonesia. Apakah saja betul² asli..... Mboten soemerep koelo ! Tidak tahu saja Saudara². (Tepuk tangan.)

Tjobalah siapa jang bisa menundjukkan asli atau tidak asli darah saja ini. Saja tidak tahu Saudara², dianggap asli tapi mungkin saja 50%, 10%, 20% ada darah Tionghoa didalamnya. (Tepuk tangan.)

Kalau dilihat romannja sadja, saja ini kan sedikit ada rupa Tionghoa. (Tepuk tangan.) Lain dari Tjak Ruslan, sedikit keling dia itu. (Tepuk tangan.) Djadi siapa jang dapat menjebut dirinja asli atau tidak itu ? Tidak ada Saudara². Kalau melihat zaman

dekat sadja Saudara², saja adalah anak dari perkawinan orang suku Djawa dengan orang suku Bali. Ibu saja orang Bali, bapak saja orang Djawa. Saja seorang blasteran antara orang Bali dan orang Djawa, blasteran ! Maklum Tjak Siauw dari Djawa Timur, saja djuga dari Djawa Timur, saja djuga Djawa Timur-Djawa Timuran, arek Surobojo. Ibu saja orang Bali, katanja orang Bali ada darah dari Modjopahit, Hindu dan Tjampa. Banjak sekali turunan puteri² dari Tjampa. Barangkali Saudara pernah membatja dalam buku sedjarah bahwa di Modjopahit banjak puteri² Tjampa. Djadi mungkin dalam tubuh sudah mengalir darah puteri Tjampa.

Hajo, saja bertanja kepada Saudara jang memakai dasi jang baik itu, apa Saudara bisa mengatakan dengan djelas darah apa jang mengalir dalam tubuh Saudara ? (Djawab : Tidak !) Tidak Bisa ! Karena itu, kalau saja sendiri sebagai persoon, mengenai asli atau tidak asli itu tidak mengadakan perbedaan antara asli dan tidak asli, tidak. (Tepuk tangan riuh.)

Saja mau mentjeritakan suatu rahasia. Tatkala saja masih muda Saudara², hampir² saja ini kawin dengan seorang..... Nio ! Nama lengkapnja tidak saja sebutkan, „she“-nja tidak saja sebutkan „she“..... lantas Tian Nio. Hampir² sadja. Tapi pada waktu itu masih berdjalan alam kolonial, alam pre-merdeka. Orang tuanja..... Tian Nio berkata : Masak kawin sama orang Djawa. Dipihak dari orang tua saja berkata : Masak mau kawin dengan peranakan orang Tionghoa. Alam demikian pada waktu itu sehingga tidak terdjadilah perkawinan dengan..... Tian Nio. (Tepuk tangan.)

Tapi ini rahasia. Djangan diberitahukan ! (Sambil tertawa). Djadi saja sendiri tidak berdiri diatas asli atau tidak asli itu, sama-sekali tidak !

Karena itu maka saja pada tanggal 1 Djuni 1945, sebelum proklamasi 17 Agustus 1945 bahkan diwaktu itu dibawah antjaman bajonet Djepang, saja telah mengutjapkan : Lahirnja Pantja Sila, jang tadi diterangkan pada pokok-pokoknja oleh Tjak Ruslan Abdulgani. Lantas Tjak Ruslan bertanja kepadamu sekalian, engkau anggota² Baperki, apakah betul² engkau pegang teguh kepada nasionalisme, apakah betul² memegang teguh kepada Pantja Sila sebagai diutjapkan beberapa kali. Djawab Saudara ialah : Ja, kami pegang teguh kepada nasionalisme dan kami pegang teguh kepada Pantja Sila dan oleh karenanja kami tjinta kepada tanah air bangsa Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke.

Dalam lahirnja Pantja Sila saja terangkan hal ini. Saja sitir Ernest Renan. Kemudian saja koreksi Ernest Renan jang terlalu sempit dengan Otto Bauer jang mengatakan bahwa nasion adalah suatu karaktermgemeinschaft. Tapi kemudian Otto Bauer saja

koreksi, saja bawa lebih landjut kepada persatuan dari tanah air, hubungan antara manusia dengan buminya. Itu tahun 1945 Saudara². Sekarang bagi saja sendiri bahkan lebih dari itu. Saja adalah nasionalis Indonesia. Saja adalah orang Indonesia, bukan hanya oleh karena nasionalismeku adalah suatu jiwa yang ingin bersatu, seperti yang dikatakan oleh Ernest Renan: *le d'esire d'ensemble*. Inginkah aku bersatu dengan kau, dengan engkau, engkau, dengan kita sekalian dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari itu. Bukan sekedar jiwa. Bukan sekedar apa yang dikatakan oleh Otto Bauer. Bukan kita ingin sekedar bersatu, bukan sekedar daripada persatuan perangai, persatuan karakter. Kita mempunyai kepribadian sendiri, karakter Indonesia. Adakah kau dari kepribadian ini, adakah karaktermu, karaktermu, karaktermu dan karakter aku sama? Lebih dari itu Saudara².

Dalam Lahirnja Pantja Sila sudah saja tambah lagi: persatuan antara manusia dengan buminya. Kita dilahirkan di bumi ini, kita hidup di bumi ini, kita akan mati di bumi ini. Ada persatuan dari bumi ini yang diridhoi Tuhan dari Sabang sampai ke Merauke.

Sekarang kita tambah lagi. Bukan lagi sekedar persatuan dengan bumi. Bukan lagi persatuan kita dengan Bali, Lombok, Kalimantan, Irian-Barat dll. Bukan sekedar hubungan geografis yang bernama Indonesia, bukan saja hubungan ku dan mu dengan geografi yang dinamakan Indonesia. Saja naik lagi lebih tinggi daripada itu, kepada apa yang pernah saja utjapkan digedung ini, bahwa bagiku Indonesia sudah lebih daripada suatu geografi. Bahwa bagiku Indonesia sudah lebih lagi daripada rasa, *le d'esire d'être ensemble*, bahwa bagiku Indonesia sudah lebih lagi daripada suatu karaktermgemeinschaft. Sebab, saja berkata: Kalau aku mentjium udara ini, aku merasa mentjium Indonesia. Kalau aku berdiri dipinggir pantai dan mendengar lautan berombak bergelora membanting di pantai², aku mendengar Indonesia. Djikalau aku melihat awan putih berarak diatas gunung Tangkuban Prahur, aku melihat awan² Indonesia yang lain dengan awan di Zwitserland atau awan di Amerika. Kalau aku mendengar burung perkutut bernjanji di pepohonan, aku mendengar Indonesia. Kalau aku melihat sinar mata anak² yang berdiri dipinggir jalan dan berteriak: Merdeka Pak, merdeka, merdeka, aku melihat Indonesia, bahkan aku melihat hari depan daripada Indonesia.

Indonesia bagiku adalah sudah suatu totalitet! Bukan sekedar suatu geografi, bukan sekedar suatu *d'esire d'être ensemble*, bukan sekedar suatu karaktermgemeinschaft. Tidak, Indonesia sudah suatu totalitet bagiku. Alam Indonesia, bumi Indonesia, gelorannya laut Indonesia, suara burung, suara Indonesia, sinar mata Indonesia, segala angin yang berisik mengelilingiku ini angin Indonesia dan itu semuanya aku tjintai. (Tepuk tangan riuh.)

Saja bertanja kepada anggota² Baperki, tidakkah Saudara² sekalian demikian? Sebab kita ini semuanya sudah seia-sekata mengabdikan revolusi, mengabdikan kepada amanat penderitaan rakyat yang harus kita laksanakan berdasarkan atas Manipol, berdasarkan atas Usdek dan lain sebagainya.

Persatuan bangsa yang saja sebut berulang-ulang itu sebenarnya adalah sekedar alat Saudara². Didalam Djarek itu singkatan dari djalannya revolusi kita, djalannya revolusi kita yang saja katakan seperti malaekat — didalam Djarek saja berkata: persatuan adalah mutlak, absolut untuk mentjapai tudjuan kita. Djikalau kita benar² kita tjinta kepada Indonesia, kita harus bersatu. Djikalau kita benar² hendak menjelesaikan revolusi kita, kita harus bersatu. Djikalau kita benar² hendak mengabdikan kepada rakyat, kita harus bersatu. Djikalau kita benar² hendak menjadi mertju suar dalam hidup manusia didunia ini kita harus bersatu.

Dan dalam hal persatuan ini saja telah berkata dan sekarang saja berkata: saja menghendaki agar supaya dalam persatuan ini segala unsur daripada bangsa itu dipersatukan. Suku apakah, bersatulah! Ja suku Sumatra, suku Djawa, Suku Kalimantan, suku Bali, bersatulah! Agama manapun yang dipeluk oleh rakyat Indonesia, bersatulah dan djangan petjah-belah diatas agama² yang berlainan itu

Asli atau tidak asli, bersatulah!!! (Tepuk tangan riuh.)

Persatuan adalah mutlak Saudara²!

Nah, maka oleh karena itu didalam kita sekarang hendak melanjutkan revolusi kita ini, berlandaskan Manipol dan Usdek, saja berkata bahwa persatuan tetap mutlak. Maka oleh karena itu saja menghendaki agar supaya seluruh warganegara, asli atau tidak asli, tanpa perbedaan asli atau tidak asli, tanpa perbedaan suku dan agama, semuanya di-Manipol-kan. Sampai kepada sekolah², djanganpun pada universitas², tapi pada sekolah² sudah dilatih kita punja tjindil² abang. harus di-Manipol-kan! (Tepuk tangan.) Tjindil² kita yang duduk dibangku sekolah harus di-Manipol-kan. Apa lagi sudah gerang, tua-bangka seperti kita ini harus di-Manipol-kan semuanya! (Tepuk tangan riuh.)

Sekarang saja minta kepada Baperki — tadi sudah saja katakan bahwa daripada Triprogram Pemerintah ada satu yang belum terlaksana jaitu Sandang-Pangan. Dan memang ini suatu soal yang sulit tapi harus kita atasi dan hadapi. Tadi Tjak Ruslan berkata bahwa Pemerintah terutama Presiden Bung Karnonja telah berbulat hati untuk terutama berdiri diatas pengerahan tenaga rakyat. Oleh karena itu Pantja Program Front Nasional yang sudah saja njatakan harus dilaksanakan oleh Front Nasional itu, harus diintegrasikan dalam usaha pelaksanaan Triprogram Pemerintah ini. —Baperki saja harap benar² membantu terlaksananya Pantja

Program Front Nasional. (Tepuk tangan.) Oleh karena dengan terlaksananya Pantja Program Front Nasional membantu terlaksananya Triprogram Pemerintah.

Saudara², revolusi berdjalan terus dan revolusi kita seperti saja katakan, bukan sadja pantja muka. Bahkan kalau dipikir lebih luas sebetulnja — kataku pada waktu seminar Hukum Nasional — sebetulnja revolusi kita ini bukan lagi pantja muka —. Pantja adalah lima. Sebenarnja revolusi kita itu dapat lebih dari lima-muka, boleh dikatakan revolusi kita sapta-muka, sapta artinja tudjuh. Boleh dikatakan hasta muka, hasta artinja delapan. Boleh dikatakan dasa-muka, dasa artinja sepuluh. Pendek kata revolusi kita ini adalah suatu revolusi jang multikompleks. A summing up of many revolutions in one generation.

Revolusi Indonesia adalah suatu nation building Indonesia jang sehebat-hebatnja. Nation building Indonesia jang sehebat-hebatnja! Dan didalam hal nation building ini segala unsur² daripada nation building harus dilaksanakan. Apa unsur nation building? Bukan sekedar soal ekonomi, bukan sekedar soal politik, bukan sekedar soal kultur, bukan sekedar soal nama. Tidak! Nation building adalah suatu pekerdjaan jang multi-kompleks pula. Tudujuan daripada revolusi Indonesia adalah nation building Indonesia, nation building bukan dalam arti jang sempit, sekedar membentuk nation Indonesia. Tidak! Lebih daripada itu, tapi nation Indonesia jang bahagia jang berkepribadian tinggi, nation Indonesia jang hidup dalam masyarakat Indonesia jang adil dan makmur tanpa exploitation de l'homme par l'homme. Nation building dalam arti jang seluas-luasnja. Itu jang kita kerdjakan sekarang ini.

Oleh karena itu saja berkata, djanganlah kita, kalau kita hendak mendirikan nation building dalam arti jang luas itu, kita masih berdiri diatas dasar² jang usang, jang tadi disebut oleh Tjak Ruslan.

Sudah pernah saja terangkan, kekuasaan imperialisme di Indonesia itu apa? Belanda jang rakjatnja hanya ketjil dapat mengalahkan rakjat jang besar djumlahnja. Pada waktu imperialisme Belanda mengalahkan Indonesia, rakjat jang ketjil itu dapat mengalahkan Indonesia dengan apa?

Batjalah kitab Sir John Seely. Saja sudah berkata bahwa Sir John Seely menulis suatu kitab jang berdjulud "The Extension of England" dan disitu dia terangkan: bangsa Inggeris di India itu beberapa orang? Hanya 40 ribu orang Inggeris di India, bisa mengalahkan suatu rakjat jang berdjumlah 230 djuta orang, 40 ribu mengalahkan 230 djuta orang. Dengan apa? Dengan alat terutama sekali memetjah-belah bangsa India itu. Devide and rule, devide et impera.

Disinipun berdjalan devide et impera itu. Oleh karena itu saja pernah membeberkan segala usaha imperialisme itu dengan berkata bahwa kekuasaan imperialisme adalah dua matjam, dalam bahasa asing: machtsfactor atau power-factor imperialisme ada dua matjam. Ada machtsfactor jang riil dan ada machtsfactor jang abstract. Ada jang bisa dilihat dan diraba, ada jang tidak bisa dilihat dan tidak bisa diraba. Machtsfactor atau power-factor jang riil ialah: angkatan bersendjatanja, polisinja, pendjara²-nja bedil²-nja, meriam²-nja. Itu adalah machtsfactor jang riil, power-factor jang riil.

Tapi itu tidak besar Saudara². Lebih besar daripada machtsfactor jang riil adalah machtsfactor jang abstrak, jang tidak bisa dilihat, jang tidak bisa diraba. Dan machtsfactor jang abstrak itu apakah Saudara²? Terutama sekali ialah: devide and rule. Memetjah-belah, suku satu dihasut dengan suku lain. Tidak boleh ada persatuan. Dan tidak boleh ada persatuan antara majority dan minority, dipisah-pisahkan majority daripada minority. (Tepuk tangan.)

Maka dibentuk minority jang bentji kepada majority dan dibentuk majority jang bentji kepada minority. Jang dinamakan minority ialah minoritet Tionghoa di Indonesia ini, peranakan Tionghoa di Indonesia.

Batjalah kitabnja Professor de Haan jang menulis kitab tebal sebanyak 3 djilid, titelnja „Priangan". Ditulis oleh Professor de Haan disitu bahwa pihak Belanda dari zaman Jan Pieterzoon Coen membentuk suatu minority, untuk kepentingan mereka itu. Suatu minority jang terdiri dari orang² Tionghoa dan peranakan Tionghoa. Dengan sengadja dipisahkan daripada minority dan digunakan untuk kepentingan Belanda sendiri. Dan ini merembes terus-menerus sampai zaman achir² ini. Ada rasa tidak senang antara majority dan minority. Sampai-sampai Tian Nio tadi tidak bisa kawin dengan Bung Karno. Dari pihaknja tidak boleh kawin dengan orang Djawa dan dari pihak sajumlah tidak boleh kawin dengan orang peranakan Tionghoa.

Saudara-saudara, bagaimanapun djuga ini adalah akibat dari kolonialisme, akibat daripada imperialisme. Maka oleh karena itu Saudara²; didalam revolusi Indonesia, dalam alam baru ini kita samasekali tinggalkan dasar jang salah ini. Kita membentuk nation Indonesia jang baru, jaitu sebetulnja punt ke-5 daripada pantja-muka dari revolusi Indonesia ini.

Dan dalam hal ini Baperki bisa bekerdja keras, bisa memberi sumbangan jang sebesar-besarnja.

Terus terang sadja Saudara², saja pernah berbitjara, dan bukan sadja berbitjara, tapi saja berada dibeberapa negeri sosialis: Sovjet Uni, Rumania, Bulgaria, Vietnam, Tjekoslowakia, Polandia, Ma-

Iah saja di-negeri² itu berkata : Republik Indonesia lebih djauh daripada kamu disini. Pernah dikota Hanoi, ibukota Vietnam Utara, saja dengan Pak Ho, Paman Ho Chi Minh, datanglah suatu delegasi daripada suatu golongan minority. Dan kelihatan memang tidak sama dengan rakyat Vietnam jang lain. Pak Ho, Paman Ho, dengan bangga berkata kepada saja : Bung Karno, inilah delegasi daripada minority jang ingin bertemu muka dengan Bung Karno. Saja berkata kepada delegasi dan kepada Pak Ho : Sebetulnja di Indonesia kita tidak mengenal minority, dan saja tidak mau mengenal minority di Indonesia !!! (**Tepuk tangan riuh.**)

Di Indonesia kita hanya mengenal suku². Saja tidak akan berkata suku itu adalah minority, suku itu adalah minority, suku itu adalah minority, suku dajak adalah minority, suku Irian Barat adalah minority, suku Kubu adalah minority. Tidak, tidak, tidak ! Tidak ada Minority ! Hanya ada suku !! (**Tepuk tangan riuh.**)

Sebab manakala ada minority, ada majority. Dan biasanja kalau ada majority, lantas ada exploitation de la minorité par le majorité. Exploitation daripada minority oleh majority.

Saja tidak mau apa jang dinamakan golongan Tionghoa, golongan peranakan Tionghoa itu di-exploitatir oleh golongan jang terbesar dari rakyat Indonesia ini. Tidak, tidak, engkau adalah bangsa Indonesia, engkau adalah bangsa Indonesia, engkau adalah bangsa Indonesia, kita semuanya adalah bangsa Indonesia !!! (**Tepuk tangan riuh.**)

Saudara itu, jang duduk disitu jang memakai djenggot dan ubel-ubel itu, Bung dari mana Bung ? Tjoba kesini. (**Seorang peserta Kongres naik kemimbar.**)

Siapa nama Saudara ? (**Djawab : Amar Singh**)

Anggota Baperki ? (**Djawab : Ja.**)

Warga Indonesia ? (**Djawab : Indonesia.**)

Warga Indonesia ! For me you are not a minority, you are just an Indonesian. (**Bung Karno memeluk Saudara Amar Singh disertai tepuk tangan para hadirin.**) Ini orang Indonesia Saudara², bukan minority !

Saja berkata kepada Paman Ho bahwa, di Indonesia paling² ada suku². Suku itu artinja sikil, kaki. Djadi bangsa Indonesia banjak kakinja, seperti luwing, ada kaki Djawa, kaki Sunda, kaki Sumatra, kaki Irian, kaki Dajak, kaki Bali, kaki Sumba, kaki peranakan Tionghoa, kaki peranakan, kaki daripada satu tubuh, tubuh bangsa Indonesia !! (**Tepuk tangan riuh.**)

Nah Pak Ho, kataku, demikianlah Indonesia. That is better, kata Paman Ho. Memang itu lebih baik.

Karena itu saja katakan bahwa Indonesia lebih daripada di-negara² sosialis atau di-negara² jang kita kenal sebagai negara sosialis.

Tapi segala hal ini, kata saja dalam pidato saja di Front Nasional, adalah suatu perjuangan. Djangan mengharap segala sesuatu beres, djatuh dari langit seperti embun diwaktu malam, tidak ! Perjuangan ! Djika rakyat Indonesia semuanya ingin supaya dalam Undang-undang Dasar '45 dan Undang-undang sekarang ini djanganlah ditulis : Presiden Republik Indonesia harus orang Indonesia asli, berdjualah agar supaya hilang perkataan ini !! (**Tepuk tangan riuh.**) Rakyat Indonesia berdjual bersama-sama supaya perkataan „asli“ dari Undang-undang Dasar '45 itu ditjoret samasekali !!! (**Tepuk tangan riuh.**)

Begitu pula kalau Saudara² menghendaki sekarang ini hilangaja perasaan tidak enak dari majority terhadap minority, kalau Saudara merasa dirinja minority, itupun suatu hasil perjuangan, perjuangan agar supaya hilang rasa ini, rasa tidak senang kepada minority. Sebaliknya saja minta minority supaya tidak ada rasa kebentjiran daripada minority kepada majority. (**Tepuk tangan.**) Terus terang sadja Saudara, saja pernah didalam gedung Senat Washington, Capitol Washington, bertanja kepada senator² : Apakah Amerika berdiri di atas demokrasi ? Djawabnja : Yes. Senator² Amerika berdiri diatas dasar demokrasi. Amerika didalam Declaration of Independencenja jang ditulis oleh Thomas Jefferson menjatakan bahwa semua manusia dilahirkan sama, that all men are created equal. Saja bertanja : Benarkah begitu ? Djawabnja : Yes it is written in the Declaration of Independence that all men are created equal. Sama, tidak ada bedanja dan bahwa manusia karena samanja, tiap² manusia mempunyai hak untuk life, liberty and the pursuit of happiness. Demikianlah tertulis dalam Declaration of Independence. Bahwa manusia created equal, bahwa manusia semua mempunyai hak jang pre-mordial, hak jang terbawa sebelum dia lahir, jaitu life, liberty and pursuit of happiness, mendedjar kebahagiaan. Manusia tidak dilahirkan untuk tidak life, manusia tidak dilahirkan didunia untuk tidak hidup. Manusia tidak dilahirkan untuk tidak liberty, untuk tidak merdeka. Manusia tidak dilahirkan didunia untuk dari ketjilnja sudah membawa rantai dikakinja, tidak bisa bergerak kemana-mana oleh karena tidak merdeka. Manusia tidak dilahirkan didunia ini untuk tidak pursuit of happiness, mendedjar kebahagiaan.

Is it true that it is written in your Declaration of Independence ? Saja bertanja kepada senator² Amerika. Yes it is true, djawab senator². Ada perkataan bahwa all men are created equal, bahwa all men boleh mendedjar life, liberty and the pursuit of happiness. Waktu itu saja berdebatan dengan senator² Amerika tentang Irian

Barat Saudara². Sebab salah satu senator yang sebetulnya kulitnya itu agak hitam, dia membantah: mengapa Indonesia men-claim Irian Barat, sebab orang Irian Barat kulitnya hitam, lain rasnya dari kebanyakan orang Indonesia.

Saja berkata: Amerika mengatakan bahwa all men are created equal dan mempunyai hak untuk life, liberty and the pursuit of happiness. Mengapa mengadakan pertanyaan demikian? Apakah bangsa itu terdiri dari satu warna kulit? Sebaliknya saja bertanya kepadamu, mengapa di Amerika ada segregation? Orang Negro di beberapa tempat dianggap orang² inferior. Restoran ditulis: only for white men, orang hitam tidak boleh masuk dalam restoran. Movie: only for white men, orang hitam tidak boleh masuk dalam movie. Otobis ditulis: only for white men, orang negro tidak boleh masuk otobis. Saja berkata demikian.

Djawabnya bagaimana? Djawabnya ialah: Ja, segala itu harus kami perjuangkan. Itu kan Undang-undang yang mengatakan bahwa all men are created equal, dalam mukadimah Declaration of Independence ini ditulis zwart op wit, hitam diatas putih, that all men are created equal. Diatas kertas ditulis bahwa manusia mempunyai hak untuk life, liberty dan pursuit happiness. Diatas kertas! But in the reality of life, hal itu harus diperjuangkan. Segala itu adalah hasil daripada perjuangan dan senator² itu berkata: Kami berjuang agar supaya di Amerika tidak ada segregation. Kami berjuang agar supaya orang Amerika semuanya suka menerima warganegara yang kulitnya hitam sebagai warganegara yang full dan sah. Saja berkata: I can appreciate it.

Sebaliknya saja berkata kepada bangsa Indonesia tatkala saja mengadakan pidato dimuka Front Nasional: Djangan lupa segala sesuatu itu adalah perjuangan, segala sesuatu harus kita perjuangkan. Bahkan Pantja Program Saudara², Presiden, Pemimpin Pemerintah, Panglima Tertinggi Pemimpin Besar Operasi Tertinggi Ekonomi, pemimpin dari segala pemimpin disini, toh aku berkata bahwa Pantja Program bagiku adalah suatu perjuangan. Saja harus mengerahkan segenap rakyat, mengerahkan segenap menteri², mengerahkan pegawai², segenap petugas dari Republik Indonesia untuk melaksanakan Pantja Program daripada Front Nasional, mengerahkan perjuangan!! (Tepuk tangan.)

Karena itu Saudara², saja berkata: Djikalau rakyat Indonesia menghendaki agar supaya dalam Undang-undang Dasar djangan ditulis „asli” untuk Presiden, berjuanglah, kerahkanlah segenap tenaga supaya hilang dari Undang-undang Dasar kita! (Tepuk tangan riuh.)

Djika bangsa Indonesia tidak mau mengenal hanya satu bangsa, tidak ada minority dan majority, maka berjuanglah bersama-

sama untuk menghapuskan itu, dengan segenap organisasi di Indonesia.

Tadi Pak Ruslan berkata bahwa tanpa effort tidak bisa ditjapai suatu hal. Dus, manakala saja disini Saudara², memeluk Baperki, saja boleh dikatakan mengadjak Baperki untuk berjuang bersama-sama dengan saja, bersama-sama dengan seluruh rakyat Indonesia agar supaya amanat penderitaan rakyat bisa kita selesaikan. (Tepuk tangan riuh.)

Ada pendirian saja pribadi; ada, pendirian pribadi Saudara², saja ulangi lagi: pribadi. Pendirian saja pribadi mengenai soal asimilasi. Tadi Tjak Siauw berkata: Soal asimilasi itu mbok ja djangan diutik-utik. Saja tidak mau mengutik-utik, tapi saja mempunyai pendirian pribadi.

Nama saja Sukarno. Apakah ini nama Indonesia asli? Tidak. Sukarno adalah dari bahasa sanskrit Saudara². Tjak Ruslan Abdulgani namanja asal dari Arab. Pak Ali namanja tjampuran. Ali dari Arab dan Sastraamidjaja dari sanskrit.

Maka oleh karena itu, menurut perasaan saja pribadi, persoonlijk, what is in the name? Kalau Saudara² misalnja mau mendjadi orang Indonesia tidak perlu ganti nama!! (Tepuk tangan riuh.) Tetap nama. Tian Nio boleh, boleh sadja. Saja sendiri nama saja sanskrit Saudara². Buat apa saja mesti menuntut orang Tionghoa yang mendjadi orang Indonesia merobah namanja. Buat apa mesti menuntut orang peranakan Tionghoa mengganti namanja yang sudah bagus? Tian Nio kok mesti didjadi-kan Lastri atau Kartini. Itu urusan privé! Agama pun privé!

Jang kami minta itu supaya benar² kita mendjadi orang Indonesia, benar² kita mendjadi warganegara Republik Indonesia!! (Tepuk tangan riuh.)

Bahkan sebagai saja katakan tadi, mbok ja seperti saja ini. Kita ini lebih dari sekedar Renan, lebih dari sekedar geografi. Indonesia bagiku adalah suatu totalitet!! Burungnja, udaranja, gelora lautnja, untukmu aku hidup, disamping untuk Allah s.a.w.

Kalau tidak salah disini duduk seorang penari ulung namanja saja lupa eh Saudara Tan Tiang Ie. Kesini nak. (Sdr. Tan Tiang Ie naik kemimbar).

Saudara Tan Tiang Ie ini kalau menari tari Sunda, huuu..... banyak wanita² Sunda kalah sama dia. Dan dia betul² merasa Indonesia, lembut tarinja. Tan Tiang Ie, apakah kau akan merobah namamu? (Djawab: Tidak.) Tidak. Tetaplah engkau bernama Tan Tiang Ie!

Ini pendirian pribadi saja Saudara², pendirian persoonlijk saja. Saudara² yang berkata kepada saja „Bung Karno yang tertjinta” harus mengetahui betul². Bung Karno itu apa. Bung Karno yang ketjual daging, darah, tulang, isi hatinja adalah manusia. Dan

saja harap supaya Baperki dalam mendjalankan tugasnja sebagai Baperki berperasaan sama-sama dengan Bung Karno jang dikatakan „tertjinta” oleh Saudara². (Tepuk tangan.)

Demikianlah Saudara², mudah-mudahan Kongres Baperki jang ke-8 mendjadi sukses. Moga² Baperki selalu madju pesat. Moga² Baperki benar² memberi sumbangan jang besar terhadap kepada Republik Indonesia.

Sekian. (Tepuk tangan riuh disertai pekik : Hidup Bung Karno).

Mewudjudkan kekuasaan Gotong- Rojong Berporoskan Nasakom

untuk
Mendjamin Pelaksanaan Manipol dan
hapusnja rasialisme

*Laporan umum Ketua Umum Baperki
Siauw Giok Tjhan*

Kongres Baperki kali ini diselenggarakan bertepatan dengan hari ulang tahunnja. Seperti diketahui Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia, Baperki, telah dilahirkan sebagai organisasi massa, jang memperjuangkan penjelesaian masalah² kewarganegaraan dalam rangka penjelesaian masalah minorita berdasarkan djiwa proklamasi 17 Agustus 1945, pada tanggal 13 Maret 1954.

Alasan untuk menjelenggarakan Kongres Baperki kali ini bertepatan dengan hari ulang tahunnja adalah :

1. Untuk menilai kembali alasan² jang mendorong kita merasakan perlunya membentuk sebuah organisasi massa seperti Baperki sekarang ini dan apakah sebab Baperki sebagai organisasi massa dalam bentuk aslinja masih mempunyai alasan hidup terus, *raison d'être*.
2. Untuk menarik peladjaran dari pengalaman² perjuangannya selama 9 tahun lamanja dan berdasarkan pengalaman² itu merumuskan program kerdja baru, jang sesuai dengan irama dinamika revolusi Indonesia, jang sedang berlangsung sekarang ini.
3. Untuk memperkokoh kesadaran berorganisasi, jang sanggup menjempurnakan Baperki sebagai organisasi massa, peserta aktif dalam pembinaan masjarakat adil & makmur dan anggota Front Nasional jang berguna dalam melaksanakan „*samenbundeling van alle revolutionaire krachten in de natie*”, penjatuan seluruh kekuatan revolusioner dalam bangsa.

Selama sembilan tahun telah terdjadi banjak matjam peristiwa jang saling susul-menusul. Setelah kita kembali ke UUD 1945 dan telah menentukan Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai garis² besar haluan negara, jang kemudian diperlengkapi dengan pedoman² pelaksanaannya seperti Djalannya Revolusi Kita (Djarek), Amanat Pembangunan Presiden, Membangun

Dunia Kembali (To Build the World Anew), yang lalu dipertegas dengan adanya RESOPIM dan Amanat Tahun Kemenangan (TAKEM) maka Revolusi Indonesia telah dikembalikan diatas relnya yang tepat, kita lalu mengetahui kemudian hari tujuan revolusi yang sedang berlangsung ini, kita mengetahui sasaran² revolusi, kita dapat membedakan siapa kawan dan golongan² mana yang menjadi kekuatan penggerak revolusi, disamping dapat membedakan siapa² yang sesungguhnya musuh² revolusi, kita lalu menjadari perlunya penjurusan persatuan semua kekuatan revolusioner, tentang mutlaknja gotong-rojong disemua bidang dengan poros Nasakom. Ringkasnja kesadaran politik Rakjat Indonesia terus meningkat dan irama dinamika perjuangannya terus tambah ladju!

Dalam mengikuti perkembangan peristiwa yang satu disusul oleh peristiwa yang lain, maka tentu saja timbul pertanyaan: Masih berlakukah alasan² yang sembilan tahun yang lalu menyebabkan kita mendirikan organisasi massa seperti Baperki ini? Masih adakah alasan hidup terus bagi organisasi massa seperti Baperki ini?

Untuk dapat menjawab pertanyaan² ini, maka terasa perlu untuk berpaling sebentar kebelakang guna menilai kembali alasan² yang menyebabkan kita membentuk organisasi massa Baperki ini.

Sembilan tahun yang lalu keadaan dan suasana politik dalam negeri masih sangat dipengaruhi oleh akibat pelaksanaan perdjandjian KMB, yang sekarang diakui merupakan penjelewengan terhadap jalan revolusi kita sesungguhnya. Seperti diketahui dengan perdjandjian KMB itu telah direhabilitasi kedudukan/kekuasaan modal monopoli asing Belanda dan sekutunya atas ekonomi Indonesia. Dengan demikian maka Indonesia setjara ekonomis praktis didjadjah.

Karena kabinet² yang kita kenal setelah KMB berlaku tidak ada yang tegas berusaha untuk membongkar KMB, maka kita saksi tidak ada satu kabinet yang berumur panjang, yang dapat berlangsung lebih dari dua tahun. Kita lalu mengalami kabinet ganti kabinet, tetapi tanpa menimbulkan perubahan pokok dengan pembatalan perdjandjian KMB.

Dalam pelaksanaan perdjandjian KMB itu, tujuan revolusi kita menjadi kabur, sasaran revolusi menjadi kabur, sehingga orang sukar dapat membedakan siapa musuh² revolusi dan golongan² mana dalam masyarakat yang menjadi kekuatan penggerak revolusi.

Memang, modal monopoli asing, yang telah direhabilitasi itu, tidak puas dengan kedudukan direhabilitasi saja. Mereka ber-

usaha untuk memperkokoh dan memperluas pengaruh kekuasaannya dan didalam usahanya ini modal monopoli asing itu mempergunakan dengan baik kenyataan, bahwa dalam masyarakat yang kita terima sebagai warisan politik kolonialisme, perbedaan tingkat social-ekonomis djatuh bersamaan dengan perbedaan golongan ethnisk/asal keturunan. Dalam usahanya untuk menjelesaikan sasaran tombak revolusi, maka dibangkitkanlah napsu² rasialisme dengan tujuan untuk menimpakan segala dosa, yang membikin melarat Rakjat Indonesia, pada kenyataan, bahwa banjak orang Tionghoa dan keturunannya yang telah menjadi warganegara Indonesia, bekerdja sebagai pedagang perantara. Kita lalu saksi, bahwa sasaran tombak revolusi nasional-demokratis di Indonesia tidak ditudjukan terhadap kaum modal monopoli asing, modal imperialis, djuga tidak untuk melikwidasi perdjandjian KMB, yang memungkinkan pulihnja kembali kekuasaan modal monopoli asing di Indonesia. Melainkan ditudjukan untuk mengganti kedudukan orang Tionghoa atau keturunan Tionghoa sebagai pengusaha perantara, jaitu sebagai importir, exportir, pedagang antar-pulau sampai tukang warung.

Kita tentunya masih ingat, bahwa kabinet pertama setelah KMB, telah melaksanakan konsepsi yang disiapkan oleh Van Hoogstraten untuk mengawinkan kepentingan kaum modal monopoli asing Belanda dan sekutunya dengan tokoh² atau keluarga tokoh² dari partai² yang bersama-sama memegang kekuasaan memerintah, jaitu dengan pembentukan „importir benteng”. Lebih banjak keluarga tokoh² partai politik, yang memegang kekuasaan memerintah dapat menganut penghidupan mewah berkat kerdja sama dengan modal monopoli asing, tentu lebih hebat penjelewengan terhadap garis revolusi yang sesungguhnya dan lebih kokohlah kedudukan kaum modal monopoli asing di Indonesia.

Kurang diperhitungkan oleh konseptornja, bahwa pergolakan politik yang timbul karena penerimaan KMB, menimbulkan penggantian kabinet yang satu dengan kabinet yang lain setjara tjepat sekali, sehingga djumlah orang yang meng-claim pembagian meningkat dalam waktu singkat djuga setjara tjepat sekali. Apabila rentjana „importir benteng” tadi ditudjukan untuk mempersatukan kepentingan modal monopoli asing dengan orang² yang mempunyai pengaruh politik melalui keluarganya atau kedudukannya sebagai tokoh partai, tetapi karena berlipat gandanya djumlah peminat dan pengclaim prioritas menjadi importir benteng dalam waktu singkat, maka timbulah perusahaan² yang dikenal sebagai Ali-Baba dan atau importir aktentas.

Karena meng-anak-emaskan atau memberi prioritas pada keluarga atau kawan² separtai sendiri dikuatirkan menjadi terlalu

menjolak mata, maka untuk mengelabui mata Rakjat maka resminja kebidjaksanaan membagi lisensi atau prioritas pada keluarga atau pada teman² separtai sendiri dilakukan dengan selimut „melindungi golongan pengusaha yang ekonomis lebih lemah“, yang dalam istilah lain dikenal sebagai politik „main asli-aslian“. Didalam praktek pun ternjata, bahwa tidak sembarang orang „asli“, yang diadjak berusaha dapat memperoleh prioritas dan lisensi. Untuk dapat sukses dalam perdjjuangan memperoleh lisensi dan prioritas ternjata perlu ditjari orang² yang dinamakan „asli“, yang mempunyai hubungan keluarga atau kawan atau tokoh partai, yang kebetulan memegang kekuasaan memerintah. Orang pun dapat membajangkan, bahwa djumlah orang² demikian ini tidak bisa bertambah setjara tjepat, apabila diperhatikan kenjataan, bahwa kabinet tidak berumur pandjang, yang berarti sering terdjadi penggantian partai yang memegang kekuasaan memerintah dan djuga penggantian tokoh² partai.

Perkembangan ekonomi negara kita dalam tjengkeraman KMB tidak menimbulkan perluasan ruang gerak yang njata dan tjepat. Portie devizen yang dapat dibagi antara pengusaha import tidak meningkat dalam djumlah seimbang dengan meningkatnja djumlah importir, bahkan portie devizen itu berkurang, karena merosotnja penghasilan export. Pembagian redjeki tambah lama mendjadi tambah kurus dan saling menjikut diantara para importir mendjadi lebih sengit. Dalam keadaan demikian ini, maka diperlukan tindakan² yang merugikan golongan minorita, dalam arti diperhebatlah politik asli, yang tadinja terbatas pada perdagangan import, diperluas sampai perdagangan antar-pulau, sampai pada membangun perusahaan² industri baru, sampai pada tukang warung dan sampai djuga dibidang pendidikan dalam penerimaan mahasiswa Artinja penjelewengan terhadap djiwa proklamasi bertambah parah. Rasialisme meluas.

Proses ini menimbulkan klas elite baru, klas profiteurs hasil revolusi, sedang Rakjat terbanjak tetap menderita dan tambah beban, karena proses itu memperhebat drainage, pemerasan keuntungan keluar negeri oleh modal monopoli asing seperti ternjata pada meningkatnja transfer keuntungan, penjusutan dan djaminan sosial yang dilakukan oleh modal monopoli asing kenegeri asalnya.

Dalam rangka usaha membenarkan politik asli-aslian itu fihak penguasa pada ketika itu menghadapi kesulitan dalam mentjari dasar hukumnja dan dalam menghadapi tekanan untuk memperluas pemberian prioritas pada teman separtai atau dan keluarganja, maka ditjarilah alasan hukumnja, timbullah pikiran untuk de-nasionalisatie atau mentjopoti kewarganegaraan orang² keturunan asing, yang telah dinjatakan dan mestinja diperlakukan djuga se-

bagai warganegara Indonesia berdasarkan UU Kewarganegaraan R.I. 10 April 1946 dan perdjandjian KMB tentang pembagian kewarganegaraan. Pikiran melaksanakan de-nasionalisatie itu hendak dilakukan dengan merumuskan UU Kewarganegaraan baru, yang menentukan wadjib memilih kewarganegaraan Indonesia sekali lagi setjara aktif dan memperberat sjarat dengan ketentuan harus keturunan kedua. Selama belum menjatakan pilihannja, karena belum dapat membuktikan, bahwa ia dilahirkan di Indonesia sebagai keturunan kedua, orang keturunan asing djadi dapat diperlakukan sebagai orang asing.

Sjarat membuktikan lahir sebagai keturunan kedua adalah sjarat yang praktis tidak dapat dipenuhi oleh sebagian terbesar orang keturunan asing, karena Tjataan Sipil baru ada dan berlaku dalam tahun 1918, djadi orang² yang dilahirkan sebelum tahun ini, tidak mungkin dapat membuktikan betul dilahirkan di Indonesia setjara sah menurut hukum, apabila tidak dilakukan berdasarkan kepertjajaan pembuktiannja.

Niat merumuskan UU kewarganegaraan yang demikian itu menimbulkan reaksi hebat dan RUU yang telah disampaikan pada DPR sebelum diberi amanat oleh Presiden, achirnja ditjabut kembali.

Reaksi yang timbul, karena ada niat merumuskan UU Kewarganegaraan keturunan asing setjara besar²an itu, menjebabkan terbentuknja sebuah Panitia Penjelesaian Kewarganegaraan, dalam mana dihimpun bersatu sebanjak mungkin aliran dan golongan.

Terbentuknja Panitia ini sesungguhnya telah membuktikan, bahwa dalam menghadapi perkembangan politik dalam negeri, yang sesungguhnya merupakan penjelewengan dari tudjuan revolusi, organisasi² yang ada dari keturunan asing sendiri, seperti PDTI, Perwitt, Perwanit dan lain²nja, yang keanggotaannja terbatas pada orang keturunan asing umumnja atau keturunan Tionghoa chususnja, terasa tidak efektif tidak tepat sebagai alat perdjjuangan.

Hasil yang ditjapai oleh Panitia Penjelesaian Kewarganegaraan, jaitu dengan ditindjaunja kembali RUU Kewarganegaraan yang sudah siap disusun, menimbulkan kejakinan akan perlunja ada organisasi sebagai alat perdjjoangan, yang susunannja berlainan daripada PDTI, Perwit atau Perwanit. Kejakinan inilah yang menjebabkan diselenggarakanja sebuah pertemuan di Djakarta pada tanggal 13 Maret 1954, yang telah menimbulkan kesimpulan² sebagai berikut :

a. Perdjjoangan melawan rasialisme, seperti yang mesti dihadapi itu, adalah perdjjoangan seluruh Rakjat Indonesia untuk menje-

lamatkan revolusi, untuk mengembalikan revolusi berdjalan diatas relnja jang benar. Rasialisme jang timbul dan meluas itu diakibatkan oleh :

1. Modal monopoli asing, djadi modal imperialis, dalam usahanja untuk mempertahankan kekuasaannja/memperluas kekuasaanja dengan djalan mengawinkan kepentingan modal monopoli itu dengan kepentingan materiil tokoh² partai jang kebetulan memegang kekuasaan memerintah atau keluarganja dan dengan djalan menjesatkan sasaran tombak revolusi. Modal komprador dan kapitalisme birokrasi ditimbulkan oleh siasat modal monopoli asing itu.
2. Struktur masyarakat warisan kolonialisme, jang menjebabkan perbedaan tingkat sosial-ekonomis djatuh bersamaan dengan perbedaan golongan ethnisk/keturunan, mempermudah usaha menjesatkan sasaran tombak revolusi dari kaum imperialis kepada pengusaha perantaraan, karena meluapnja rasialisme.
3. Perdjudjian KMB, jang membikin kabur siapa lawan dan siapa kawan dalam revolusi Indonesia.

b. Bentuk organisasi seperti partai dalam wujud PDTI dan organisasi jang eksklusief bagi satu matjam asal keturunan sadja seperti Perwitt dan Perwanit, terbukti tidak efektif dan dianjdjukan untuk dibubarkan. Bentuk organisasi sematjam jang dikenal ini adalah sempit dan mempersempit kemungkinan untuk memperoleh dukungan massa jang sangat luas. Selain itu dapat menimbulkan kesan salah, bahwa masalah kewarganegaraan dalam rangka menjelesaikan masalah minorita, seolah-olah hanya mendjadi persoalan keturunan asing sendiri, bukan persoalan nasional, persoalan seluruh Rakyat. Kesan salah sematjam ini perlu dihapuskan setjepat mungkin.

c. Dirasakan perlunya sebuah organisasi, jang berbentuk organisasi massa, jang sanggup menghimpun dukungan massa luas, untuk memperdjoangkan penjelesaian masalah minorita dalam hubungan dengan penjelesaian masalah² kewarganegaraan sesuai dengan djiwa proklamasi 17 Agustus 1945, tetapi organisasi itu tidak merupakan organisasi khusus untuk golongan minorita. Djadi organisasi massa itu bukan organisasi minorita, melainkan organisasi jang memperdjuangkan penjelesaian masalah minorita sehingga organisasi itu tegas tidak eksklusief untuk suatu golongan ethnisk tertentu, melainkan dapat menghimpun kesatuan kehendak dan aksi dari sebanjak mungkin golongan dan aliran dalam perdjuangan mentjapai penjelesaian masalah minorita sesuai dengan djiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Berdasarkan kesimpulan diatas itu, maka dibentuklah Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki) sebagai organisasi massa, jang hendak merupakan badan permusjawarat-

an dan perdjuangan jang menghimpun kesatuan kehendak-usaha semua warganegara untuk memperdjuangkan dengan sungguh² pelaksanaan tjita² nasional, jaitu mendjadi tiap warganegara Republik Indonesia sedjati senapas dengan semangat Proklamasi 17 Agustus 1945. Organisasi ini merupakan suatu perhimpunan daripada warganegara Republik Indonesia, jang walaupun masing² mungkin mempunyai pendirian politik sendiri², namun semuanya berkejakinan, bahwa perbedaan perlakuan terhadap berbagai golongan sesama warganegara Republik Indonesia semata-mata berdasarkan perbedaan keturunan atau agama merugikan kepentingan negara dan penjelesaian revolusi Indonesia.

Degan demikian mendjadi tegas, bahwa ditindjau dari sudut golongan ethnisk atau keturunan, Baperki tidak bersifat eksklusief dan ditindjau dari sudut haluan djuga tidak eksklusief, karena memungkinkan para anggotanja untuk mendjadi anggota berbagai partai politik didalam negeri. Keanggotaan rangkap dinjatakan tidak merugikan perdjuangan pelaksanaan tjita² Baperki, bahkan dapat menguntungkanja, apabila anggota² Baperki, jang mendjadi djuga anggota² partai politik dengan gigih berusaha, supaja program perdjuangan Baperki melawan rasialisme dapat djuga mendjadi sebahagian program perdjuangan partai jang di-ikutinja.

Mendjelang pelaksanaan pemilihan umum jang pertama kali di Indonesia untuk menjusun DPR-Konstituante dan DPRD, Baperki menghadapi persoalan jang memerlukan kedadjaksanaan dan ketegasan tudjuan.

Seperti dikemukakan diatas Baperki bukanlah sebuah organisasi minorita, jang khusus terbuka untuk golongan minorita tertentu. Baperki telah didirikan atas dasar kesadaran, bahwa masalah minorita bukanlah satu masalah jang harus diselesaikan oleh golongan minorita sendiri, melainkan adalah satu masalah nasional, jang harus diselesaikan atas „level” atas tingkat nasional.

Memang, dalam pelaksanaannja ketentuan tentang penjelesaian masalah minorita tergantung pada partai² atau partai² politik jang kebetulan berkuasa karena „menang” dalam pemilihan umum.

Tetapi pengalaman jang dilihat di Amerika Serikat pun membuktikan djuga bahwa suara golongan ethnisk Negro, golongan minorita di Amerika Serikat, tiap kali ada pemilihan umum mendjadi rebutan antara dua partai, jang saling berganti berkuasa di Amerika Serikat. Suara golongan ethnisk Negro tjoba direbut dengan mendjandjikan perbaikan² muluk bagi nasib orang Negro sebagai minorita. Tetapi bagaimana kenjataannja? Kenjataannja jalah, bahwa selesasnja menang suara, memang dalam bulan² pertama ada usaha untuk mengadakan perbaikan guna memenuhi djandji, tetapi selama sistim masyarakat masih memungkinkan penindasan manusia oleh manusia, maka masalah minorita Negro

ternyata tidak bisa diselesaikan. Bahkan dengan memuntjaknja krisis ekonomi, jang memperhebat penindasan manusia oleh manusia, meletuslah peristiwa² menjedihkan untuk kerugian golongan ethnisk Negro sebagai minorita.

Pengalaman itu membuktikan, bahwa bagi penyelesaian masalah minorita, jang terpenting bukanlah terutama rumusan² tentang perbaikan nasib dan persamaan hak serta kewadajiban, melainkan berhasilnja perjuangang mengubah sistim masyarakat, jang meng-achiri sistim penindasan manusia oleh manusia, sehingga me-nejapkan alasan dan napsu untuk mendjalankan kebidjaksanaan buat menggentjet, buat meng-anak-tirikan orang² dari golongan minorita.

Sementara itu dalam menghadapi pelaksanaan pemilihan umum pertama di Indonesia itu, Baperki menghadapi kenyataan² sebagai berikut :

1. UUD Sementara Negara Kesatuan 1950 mendjamin adanya perwakilan untuk tiga matjam golongan ketjil.

Dalam undang² pemilihan umum tidak diatur dengan tegas pelaksanaan mengisi djaminan perwakilan untuk golongan² ketjil itu, sehingga membuka kemungkinan partai² jang memegang kekuasaan memerintah dapat menjalah-gunakan wewenang dengan orang² jang dipertjajai oleh golongan ketjil masing², melainkan dengan orang²-nja sendiri, jang bisa didjadikan „domba suara” dalam pungutan² suara.

2. UU Pemilihan Umum memungkinkan adanya perkumpulan² pemilihan (kiesvereeniging), jang dibentuk khusus untuk pemilihan umum dan memungkinkan organisasi² bukan partai politik ikut serta dalam pemilihan umum.

Sebagai organisasi massa jang memperdjauangkan penyelesaian masalah minorita sesuai dengan djiwa proklamasi 17 Agustus 1945, Baperki pada ketika itu berpendapat, bahwa ketentuan UUD 1950 tentang djaminan perwakilan untuk golongan ketjil harus diperdjauangkan supaya tidak „ditjabut” atau disalah-gunakan setjara merugikan demokrasi. Dikatakan merugikan demokrasi, karena dapat digunakan untuk meng-koreksi hasil pemungutan suara. Pengangkatan tambahan wakil² golongan ketjil, jang dikuasai oleh partai², jang kebetulan duduk memerintah, dapat digunakan untuk menambah suara, menambah djumlah anggota bagi partai² jang kebetulan berkuasa itu. Disamping itu golongan² ketjil bersangkutan, jang mestinja didjamin mempunjai wakil, lalu menghadapi kenyataan, bahwa djaminan itu bukan untuk menjalarkan isi-hatinja, melainkan untuk memperkokoh kedudukan partai, jang kebetulan memegang kekuasaan memerintah.

Pendapat itu menjebabkan Baperki mengambil keputusan untuk ikut serta dalam pemilihan umum dengan tudjuan terbatas, jaitu

memperdjauangkan pengisian djaminan perwakilan untuk golongan ketjil setjara demokratis. Perdjuaangan ini tidak mentjapai hasil sepenuhnya karena partai² jang kebetulan memegang kekuasaan pemerintahan menggunakan kelebihan suara bersamaanja didalam DPR untuk memaksa kehendaknja. Dengan djalan interpelasi di DPR, Baperki berhasil memperdjauangkan adanya koreksi ketjil dalam pengangkatan untuk DPR dan Konstituante guna mengisi djaminan perwakilan untuk golongan² ketjil.

Pengalaman ini membuktikan sekali lagi, bahwa kita tidak dapat merasa puas dengan adanya rumusan² jang bagus dalam ketentuan UU atau UUD. Rumusan² itu pada umumnya perlu diperdjauangkan pelaksanaannja didalam praktek, jaitu dengan membangkitkan pendapat umum jang kokoh, jang tidak memungkinkan penjelewengan. Untuk ini diperlukan organisasi massa, jang berdjuaug membina pendapat umum jang kokoh dan efektif diantara massa Rakjat, jang sanggup mentjegah penjelewengan, pen-salah-gunaan, jang mendjamin pelaksanaan ketentuan² UU dan UUD setjara lebih tertib dan sempurna. Pengalaman ini membuktikan diperluakannja Baperki sebagai organisasi massa.

Pengalaman² Baperki lainnja jang menonjol pada tahun² pertama itu adalah pengalaman dalam perdjuaangan menghadapi masalah penyelesaian dwi-kewarganegaraan dan UU Kewarganegaraan ditimbulkan dalam rangka memuntjaknja politik asli-aslian. Padahal masalah dwi-kewarganegaraan sesungguhnya adalah masalah antara dua negara jang bersangkutan dan sedikit pengaruhnja pada orang² jang bersangkutan, karena pada umumnya mereka jang bersangkutan memperoleh kewarganegaraan lebih dari satu diluar kemauannja sendiri dan hal demikian itu adalah akibat pelaksanaan hak daulat bagi tiap bangsa-negara untuk menentukan sendiri siapa jang mendjadi anggota-negarannya, jang mendjadi warganegarannya. Dalam hal tidak ada perdjandjian bilateral antara dua negara jang bersangkutan, maka menurut kebiasaan internasional, jang berlaku efektif bagi orang jang bersangkutan djuga hanya satu kewarganegaraan, yakni kewarganegaraan negeri, dimana ia itu ber-domicili, bertempat tinggal setjara tetap.

Ditimbulkan persoalan dwi-kewarganegaraan memang ada hubungan dengan pengobaran napsu rasialisme dengan propaganda palsu seakan-akan kesetiaan seseorang pada tanah air dan Rakjatnja ditentukan oleh „race” (asal keturunannja). Hal ini ditimbulkan sekalipun kenyataan membuktikan, bahwa orang jang dinamakan „asli” ditindjau dari sudut „race” dalam perdjuaangan menghadapi kolonialisme Belanda, ternyata memihak kekuasaan pendjadjahan.

Baperki tidak berhasil memperjuangkan ketentuan² perdjandjian penjelesaian dwi-kewarganegaraan antara R.I. — R.R.T. yang dalam pelaksanaannya bebas dari pengaruh praktek² rasialis tetapi dalam perjuangannya telah berhasil ditjapai perbaikan² dalam pertukaran nota, yang menjadi appendix, tambahan, perdjandjian dan persetudjuan tentang tjara pelaksanaannya; yang mentjegah pentjopotan kewarganegaraan Indonesia setjara besar-besaran. Antara lain berkat perjuangan Baperki telah dapat ditjapai ketentuan dan pelaksanaan yang membebaskan dari kewadajiban memilih lagi mereka, yang telah tegas dengan perbuatan membuktikan telah memilih kewarganegaraan Indonesia, jaitu mereka yang menjadi pegawai negeri, yang menjadi anggota lembaga² negara, yang ikut serta didalam pemilihan umum di Indonesia dan yang hidup dari pekerdjaan tani dengan tjara hidup dan kerdja tidak beda daripada petani lainnya didalam masyarakat Indonesia. Disamping ini ditjapai adanya persetudjuan, sebagai pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri, bahwa mereka, yang dahulu memperoleh status asing sebagai akibat pilihan orang tuanya, untuk menentukan pilihan kewarganegaraannya sendiri.

Perjuangan Baperki itu dilakukan berdasarkan prinsip, bahwa kita perlu mentjegah timbulnya masalah orang asing, yang rumit dan bisa menimbulkan sengketa, dengan djalan memungkinkan orang² keturunan asing memperoleh kewarganegaraan Indonesia, menjadi „national” Indonesia, apabila hal demikian ini dikehendakinya. Djumlah orang asing dengan demikian terus berkurang dan tjara ini menurut Baperki adalah tjara penjelesaian bidjaksana sesuai dengan semangat Pantja Sila, seperti didjelaskan oleh Bung Karno dalam „Lahirnya Pantja Sila”, yang mempertegas, bahwa „Nasionalisme hanyalah dapat subur didalam tamansarinja internasionalisme. Internasionalisme hanyalah dapat hidup subur, djikalau berakar dibumi nasionalisme. Dua ini harus wahju-mewahjui satu sama lain.” Nasionalisme Pantja Sila, yang harus menjadi akar Internasionalisme yang sehat adalah anti-rasialisme dan oleh karenanya berpendirian, bahwa tiap orang warganegara Indonesia tanpa memandang asal keturunannya, pasti dapat menjadi patriot, pentjinta tanah-air yang baik, apabila padanya diberi kesempatan sama dan hidup dalam suasana sama untuk mengembangkan rasa tjinta tanah-air dan memperkokoh pengabdianja pada Rakjat. Berdasarkan pendirian ini menjadikan orang keturunan asing warganegara Indonesia dengan hak dan kewadajiban sama tidak mungkin berarti memperbesar bahaya dari dalam, melainkan pasti berarti memperbesar potensi nasional dan daja-tahan nasional yang kokoh!

Didalam menghadapi UU Kewarganegaraan R.I. 1958, Baperki pun berdjung atas dasar prinsip yang sama pula dengan

ketegasan, bahwa UU Kewarganegaraan RI yang dirumuskan belakangan tidak boleh mengganggu-gugat kewarganegaraan mereka yang telah memperolehja berdasarkan ketentuan² hukum yang berlaku duluan, sedang ketentuan peralihan, harus memungkinkan pada mereka, yang memperoleh status asing akibat pilihan orang tuanya, untuk kembali menjadi warganegara Indonesia.

Hasil² dan kemajuan² yang ditjapai dalam memperjuangkan rumusan dan ketentuan yang baik dalam UU atau peraturan pelaksanaannya, seringkali belum menjamin pelaksanaan yang sungguh² sedjiwa dengan ketentuan² diatas kertas. Kita lihat umpamanya, bahwa pelaksanaan peraturan peralihan UU Kewarganegaraan, yang memungkinkan mereka, yang memperoleh status asing, pilihan orang tuanya, untuk kembali menjadi warganegara Indonesia, belum terlaksana dengan lantjar. Masih ribuan pernjataan menantikan putusan dari pihak pemerintah.

Pengalaman² ini mendorong Baperki untuk sampai pada kesimpulan, bahwa perjuangan pelaksanaan tjita² Baperki sesungguhnya, adalah perjuangan membina masyarakat Pantja Sila, jaitu masyarakat yang mempraktekkan dalam penghidupan sehari-hari dan setjara sungguh² Pantja Sila, seperti dirumuskan oleh Bung Karno dalam „Lahirnya Pantja Sila”. Kesimpulan ini ditjapai dalam Kongres Baperki di Surabaya pada akhir tahun 1956, yang mempertegas djuga, bahwa tjita² perjuangan Baperki pelaksanaannya sangat tergantung pada pelaksanaan Pasal 27 ayat 2 UUD (Tiap² warganegara berhak atas pakerdjaan dan penghidupan yang lajak bagi kemanusiaan) dalam hubungan dengan pelaksanaan pasal 33 UUD 1945 (1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan; 2. Tjaban² produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hadjat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara; 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk kemakmuran Rakjat sebesar-besarnya). Pelaksanaan pasal 27 ayat 2 dalam hubungan dengan pelaksanaan pasal 33 berarti, kita akan mentjapai adanya masyarakat yang tidak mengenal lagi adanya pengangguran dan adanya tingkat kemakmuran yang tjukup tinggi bagi tiap orang warganegara, sehingga tidak terdapat lagi napsu saling sikut, saling tinds-meninds, yang berarti tidak ada lagi napsu meng-anak-tirikan suatu golongan tertentu atau mempraktekkan diskriminasi rasial.

Djadi perjuangan melaksanakan tjita² Baperki adalah perjuangan melikwidasi kolonialisme dibidang politik dan ekonomi, perjuangan melikwidasi imperialisme untuk mentjapai kemerdekaan penuh dan kedaulatan penuh dalam tangan Rakjat Indonesia sendiri. Djadi perjuangan menjelesaikan revolusi Indonesia.

Kesimpulan dalam Kongres Baperki pada akhir tahun 1956 di Surabaya itu diperkuat oleh ketegasan dalam Amanat Presiden pada Kongres Baperki di Solo, yang oleh Kongres disetujui bulat sebagai garis perjuangan Baperki selanjutnya. Seperti diketahui dalam Amanatnya itu Presiden Soekarno telah mempertegas, bahwa perjuangan menyelesaikan masalah minorita tidak dapat dipisahkan daripada perjuangan membangun masyarakat yang adil dan makmur, karena dengan terlaksananya pembangunan masyarakat yang adil dan makmur itu akan terlaksanakannya tjiat² membangun „nation“, dimana tiap orang warganegara dapat menuntut penghidupan bebas dari rasa takut akan dianak-tirikan, bebas dari prasangka keturunan dan bebas dari rasa takut akan menderita kekurangan.

Dalam amanat Presiden Soekarno pun dijelaskan: „Dalam hubungan ini patut sekali diperhatikan, bahwa ditinjau dari sudut ekonomi, masalah golongan ketjil (minority problem) bagi negeri seperti Indonesia kita ini sesungguhnya adalah satu masalah menghapuskan sifat² 'underdeveloped' dan mencari 'full employment'. Jadi sama artinya dengan melaksanakan pasal 27 ayat 2 dalam hubungan dengan melaksanakan pasal 33 UUD 1945 se-tjara konsekwen dan sistematis!

Menerima Amanat Presiden Soekarno pada Kongres Baperki sebagai garis perjuangan Baperki, tidak bisa lain daripada berarti Baperki menjedikan kemampuan organisasinya untuk ikut serta berjuang dan menjamin penyelesaian revolusi Indonesia dengan berhasil baik.

Demikianlah perkembangan didjaman sebelum kita mengenal adanya Manifesto Politik.

Sekarang kita sudah membatalkan KMB dan telah kembali ke UUD 1945, Manipol sudah menjadi garis² besar haluan negara, Djarek, Amanat Pembangunan Presiden dan To Build the World Anew sudah menjadi pedoman² pelaksanaan Manipol, yang sekarang telah diperlengkapi dan dipertegas dengan RESOPIM dan TAKEM. Revolusi kita sudah dipulihkan kembali diatas relnya, kemungkinan menjeleweng diusahakan supaya praktis tidak ada, terutama pokok wedjangan seperti dijelaskan didalam TAKEM, yaitu: 1. Mengenai Revolusi; 2. Mengenai Pantja Sila dan Progressivisme; 3. Kepribadian Indonesia yang berpusat kepada Gotong-Rojong, musjawarah dan mufakat; 4. Persatuan Nasional Revolusioner dengan Front Nasional; 5. Memberantas Komunisto-phobi; 6. Mutlaknja poros Nasakom; 7. Djahatnya liberalisme; 8. Satu Pimpinan; 9. Sosialisme.

Perusahaan² milik monopoli Belanda dahulu sudah kita ambil-alih dan menjadi Perusahaan² Negara dan Perusahaan² Dagang Negara. Perusahaan² ini merupakan k.l. 80% dari perusahaan

modal monopoli asing di Indonesia dan menguasai k.l. 70% sektor ekonomi nasional kita. Dipandang sepintas lalu menggambarkan kemajuan yang sangat penting artinya.

Tetapi modal imperialis tidak bersedia menjerah kalah mentah-mentah. Imperialisme berusaha keras untuk mempertahankan diri dan berusaha mempertahankan kekuasaan kolonialisme dalam bentuk² baru, yang sekarang umumnya disebut neo-kolonialisme. Neo-kolonialisme ini mengenal berbagai matjam bentuk. Bentuk yang paling terang-terangan adalah membantu bertjokolnja kekuasaan kaum reaksioner disuatu negeri dengan bantuan² ekonomi dan penempatan angkatan perang pada berbagai pangkalan perang dinegeri itu. Sebagai tjontoh, misalnya Malaya dengan Tengku Abdurachmannja.

Bentuk neo-kolonialisme lain adalah melaksanakan politik menekan rendah harga barang² bahan yang di-import dari negeri² yang sedang berkembang dan menaikkan harga barang² modal yang diexport ke-negeri² yang sedang berkembang itu, sehingga negeri² yang sedang berkembang itu selalu menderita kekurangan deviezen untuk membeajai pembangunan nasional, hingga dapat dipaksa untuk menerima „bantuan“ dengan sjarat² yang diberi bentuk tehnik-ekonomis, tetapi sesungguhnya adalah sjarat² politik, yaitu antara lain seperti terbukti dengan pengalaman Sailan baru² ini. Seperti diketahui „bantuan“ Amerika Serikat pada Sailan dibatalkan, karena pemerintah nasional Sailan tidak bersedia memenuhi tuntutan Amerika Serikat mengenai soal penggantian kerugian pada perusahaan² minjak Amerika, yang dinasionalisasi dengan UU nasional Sailan.

Kita sekarang merasakan sendiri, bahwa disamping adanya salah-urus pada PN dan PDN, yang diakui oleh pemerintah sendiri, sehingga PN & PDN itu menimbulkan beban dan bukan-nja sebagaimana mestinya menjadi sumber utama penghasilan negara, pelaksanaan politik kaum imperialis yang hendak memaksakan neo-kolonialisme pada negeri² yang sedang berkembang menyebabkan kita selalu menghadapi kesulitan kekurangan diviezen setjara terus-menerus. Dengan tepat sekali salah satu pasal Pantja Program Front Nasional menentukan: „Meneruskan perjuangan anti-imperialisme dan neo-kolonialisme dengan memperkuat kegotong-rojongan nasional revolusioner berporoskan Nasakom“. Dalam hubungan ini patut juga diperhatikan sambutan Presiden Soekarno yang disamping menyetujui Pantja Program Front Nasional, telah menegaskan:

„Dikalau ada malaikat turun dari langit, malaikat langit datang disini dan menawarkan kepada saja: „Hai Soekarno engkau aku jadikan orang yang mampu memberi-membri hadiah kepada Rakjat“. Aku akan menjawab: „Aku tidak mau. Sebab aku

ingin bersama dengan Rakjat membuat Rakjat ini, Rakjat yang besar, Rakjat yang berjuang, Rakjat yang bisa mentjapai segala hal itu dengan perjuangan, Rakjat yang tahu memeras keringat, Rakjat yang membanting tulang, Rakjat yang tahu menggembeleng diri sendiri agar supaya benar² menjadi satu bangsa yang kuat. Segala hal yang dikehendaki itu marilah kita perjuangkan bersama!"

Untuk melaksanakan perjuangan itu diperlukan organisasi Front Nasional yang harus didukung oleh partai² dan organisasi massa anggota Front Nasional. Jadi kalau kita memandang persoalan dari sudut perjuangan mentjapai masyarakat adil dan makmur, yang mengharuskan kita meneruskan perjuangan anti imperialisme dan anti neo-kolonialisme dengan memperkuat kegotong-rojong nasional revolusioner berporoskan Nasakom, maka tiap organisasi yang nasional-revolusioner perlu dikonsolidasi guna memperlancar usaha memperkuat kegotong-rojongan nasional revolusioner berporoskan Nasakom.

Sedjak Kongres Baperki di Solo mempertegas sifat Baperki dengan menerima dengan suara bulat Amanat Presiden Soekarno, yang mempertegas bahwa perjuangan menyelesaikan masalah minorita adalah perjuangan membangun masyarakat adil dan makmur, yang mengachiri sistim penindasan atas manusia oleh manusia, maka Baperki telah termasuk dalam golongan organisasi massa Rakjat yang nasional-revolusioner. Dalam tingkat perjuangan seperti sekarang ini, dalam hubungan dengan melaksanakan Pantja Program Front Nasional setjara lebih intensif dan sistematis, maka tiap pembubaran organisasi nasional-revolusioner menimbulkan kerugian. Dengan lain perkataan berarti, bahwa kita wadajib memperkokoh Baperki sebagai organisasi massa Rakjat revolusioner, supaya lebih berguna dalam usaha menggolong kekuasaan kegotong-rojongan nasional-revolusioner berporoskan Nasakom.

Jadi perkembangan politik dalam negeri mewadjabkan kita untuk lebih memperkokoh Baperki sebagai organisasi nasional-revolusioner.

Disamping ini, apabila kita tindjau masalah minorita di Indonesia sekarang ini, maka kita memperoleh kenyataan² sebagai berikut :

Dalam rumusan diperoleh ketegasan² lebih positif. Umpamanya Djarek menegaskan : „Semua warganegara, Djawakah ia, Sundakah ia, Minangkabaukah ia, Minahasakah ia, Batakkah ia, Bugisakah ia — semua warganegara harus bersatu, dengan tidak memandang perbedaan suku-bangsa, tidak pandang perbedaan agama, tidak pandang keturunan asli atau tidak asli”.

Didalam Manipol ditugaskan pelaksanaan pengel... and forces progressief, yang meliputi juga pengerahan funds & forces domestic, yaitu seperti diperdjelas lagi didalam Ketetapan MPR-S II/1960. Didalam Ketetapan MPR-S ini lampiran A, dengan kekuatan amandemen mengenai industri ringan dipertegas : „Industri ringan (sedang dan besar) dimiliki oleh Negara, oleh swasta yang modal dan keuntungannya menetap di Indonesia (domestic)”.

Tetapi bagaimanakah pelaksanaannya? Pelaksanaannya belum bebas daripada rasialisme didjaman 9 tahun yang lalu. Malahan sebagai salah satu akibat inflasi yang menekan penghidupan lebih keras lagi, maka disamping dipengaruhi oleh napsu memupuk kapitalisme birokrasi (modal yang dihimpun dengan menjalah-gunakan wewenang kekuasaan administrasi negara) rasialisme ada hubungan dengan usaha memperoleh penghasilan extra, yang ternyata kemudian meluntjur ke korupsi dan diperhebatnya pemupukan kapitalisme birokrasi. Instruksi² menteri didjaman sebelum ada Manipol dan bertentangan dengan Manipol pun belum juga ditjabut, sehingga menambah alasan untuk tidak melaksanakan ketentuan² progressif didalam Manipol dan semua pedoman pelaksanaannya.

Di-bidang² lain, kita pun melihat praktek² diskriminasi rasial. Umpamanya ada ketentuan didalam UU Pokok Agraria, yang dalam tingkat sekarang pada umumnya dapat dikatakan sebagai UU yang progresif, ternyata mengandung unsur rasialisme. Ketentuan itu ialah yang menetapkan, bahwa warganegara Indonesia yang disamping kewarganegaraan Indonesia memiliki kewarganegaraan lain, jadi yang berdwikewarganegaraan, tidak diperkenankan mempunyai hak milik atas tanah.

Ketentuan ini adalah rasialistis. Apakah sebabnya? Sebabnya ialah, karena yang diintjer adalah warganegara Indonesia keturunan asing. Yang dinamakan asli terang tidak bisa memiliki kewarganegaraan lain disamping kewarganegaraan Indonesia. Jadi yang diintjer adalah keturunan asing, yang diluar kemauan sendiri, tetapi karena akibat kelahiran asal dari orang asing, sebagai akibat pelaksanaan hak daulat dari tiap negara yang sovereign, dapat memiliki kewarganegaraan lain disamping kewarganegaraan Indonesia-nja. Adanja kewarganegaraan lain itu tidak mungkin dilepaskan oleh kehendaknya sendiri, selama tidak dibuka kemungkinan itu oleh adanya perdjandjian penyelesaian dwi-kewarganegaraan antara Republik Indonesia dan negeri yang bersangkutan.

Apabila tidak ada prasangka rasial terhadap keturunan asing, tentu tidak terasa perlu untuk mengadakan ketentuan sematjam itu, karena hanya rasialis sadjalah yang masih berpendapat, bahwa kesetiaan seorang terhadap tanah air ditentukan oleh asal keturunan

annja, walaupun revolusi Indonesia telah membuktikan, bahwa orang² yang dinamakan asli seperti Sumitro, Natsir, Sjafrudin dll. nja telah menjadi kekuatan contra-revolusioner dan mengadakan pemberontakan.

Apabila terhadap orang keturunan asing, yang disamping kewarganegaraan Indonesianja memiliki juga kewarganegaraan lain ditentukan tidak boleh mempunyai hak milik tanah, terhadap orang² yang terang menjadi tokoh pemberontak tidak ada ketentuan untuk meniadakan hak milik atas tanah. Sekalipun mestinja orang yang dituduh tentunya suka mengakui, bahwa dosa melakukan pemberontakan contra revolusioner pasti lebih berat daripada „dosa” memiliki kewarganegaraan rangkap diluar kemauannya sendiri.

Kegandjilan demikian itu bisa menimbulkan keadaan, bahwa tokoh² pemberontak dapat terus menikmati kebahagiaan mempunyai hak milik tanah, sedangkan seorang warganegara Indonesia yang setia, yang tidak bertindak menyalahi hukum, tetapi karena kelahiran dan diluar kemauannya sendiri memiliki dwi-kewarganegaraan „dihukum” tidak boleh mempunyai hak milik atas tanah.

Dalam hubungan dengan penyelesaian dwi-kewarganegaraan di negeri kita, baik sekali diperhatikan, bahwa kita baru mengadakan perdjandjian dengan satu negara sadja, jaitu dengan RRT untuk menyelesaikan dwi-kewarganegaraan. Dengan negara² lain yang dapat menimbulkan juga masalah dwi-kewarganegaraan belum diadakan perdjandjian untuk menyelesaikan dwi kewarganegaraan.

Disamping itu dalam pelaksanaannya UU Pokok Agraria itu juga belum bebas daripada rasialisme dan kita masih perlu memperjuangkan hapusnya rasialisme dalam pelaksanaan UU Pokok Agraria, yang dapat diakui adalah salah satu UU yang maju.

Umpamanya ketentuan batas tanggal memperoleh status kewarganegaraan Indonesia tunggal ditentukan pada satu tanggal sebelum semua pengadilan² negeri di Indonesia dapat melaksanakan penyelesaian dwi-kewarganegaraan berdasarkan perdjandjian dwi-kewarganegaraan RI-RRT. Untuk dapat meng-konversi hak eigendom menjadi hak milik, sipemilik sudah harus berstatus warganegara Indonesia tunggal sebelum 24 September 1960. Padahal sebagian terbesar Pengadilan Negeri baru dapat menerima penanggalan kewarganegaraan R.R.T. dari orang² bersangkutan pada tanggal 1 Oktober 1960. Malahan ada juga Pengadilan Negeri yang baru melaksanakan pada pertengahan Desember 1960.

Akibatnya ialah hanya sedikit sekali orang warganegara Indonesia keturunan Tionghoa yang dapat meng-konversi-kan hak

eigendommen menjadi hak milik. Sedang sebagian besar dari mereka harus menerima hak eigendommen menjadi hak guna-bangunan.

Dalam perjuangan Baperki berhasil memperoleh djandji J.M. Menteri Agraria dahulu dan sekarang J.M. Menteri Pertanian dan Agraria, bahwa warganegara Indonesia keturunan Tionghoa, yang telah menyelesaikan dwi-kewarganegaraannya dan memperoleh status warganegara tunggal setelah batas waktu yang ditentukan, dapat memajukan permohonan untuk menjadikan hak guna-bangunannya asal hak eigendom menjadi hak milik tanpa dikenakan dajaran dalam melaksanakan proses penggantian hak ini, sebagai pelaksanaan ketentuan, bahwa tiap orang warganegara Indonesia boleh mempunyai hak milik. Tetapi menurut laporan pelaksanaan djandji Jang Mulia Menteri yang bidjaksana itu, ternyata banyak menghadapi kesulitan² di daerah² dan ketjantol di daerah². Kesulitan ini harus diatasi dengan perjuangan setjara terorganisasi.

Pun menurut laporan² dari sumber² yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam djaman Manipol sekarang ini, masih juga berlaku politik asli dan tidak asli dalam penerimaan mahasiswa, artinja penerimaan mahasiswa keturunan asing tidak boleh melampaui jumlah procentage tertentu. Apabila laporan² ini memang benar, maka dengan hati sedih kita mesti menjabarkan bahwa alasan yang mendorong kita mendirikan Baperki ini masih tetap berlaku. Retooling mental dan retooling personalia serta aparatur negara untuk mendjamin pelaksanaan Manipol setjara lebih konsekwen, lebih sistimatis dan sungguh² terasa belum dilaksanakan setjara efektif, walaupun Manipol sudah berusia 3 tahun setengah.

Memang, telah disinjalir adanya Manipolis-munafik, setudju Manipol untuk lip-service. Presiden Soekarno dalam Amanatnya didepan Musjawarah Front Nasional pada tanggal 13 Februari j.l. mensinjalir adanya pemimpin² gadungan, yang mulutnya kemak-kemik setudju Pantja Sila tetapi phobi pada Nasakom. Dengan tegas dinjatakan oleh Presiden: „Bersatulah Rakjat Indonesia, djkalau engkau setudju kepada Pantja Sila, engkau tidak boleh tidak harus setudju pula kepada Nasakom!” Menteri PDK, Prof. Prijono juga mensinjalir adanya Manipolis-munafik.

Berdasarkan semua kenyataan itu, maka menjadi tambah jelaslah, bahwa tugas kita dalam tingkat perjuangan sekarang ini antara lain adalah mengkonsolidasi Baperki untuk membantu mewujudkan kekuasaan gotong-rojong berporoskan Nasakom guna mendjamin pelaksanaan Manipol dan hapusnya rasialisme!

Dengan garis Manipol menyelesaikan masalah²
kewarganegaraan.

Marilah sekarang kita tinjau bersama pelaksanaan program kerdja Baperki seperti yang telah dirumuskan oleh Kongres yang lalu. Program kerdja yang terdiri dari tiga pasal itu menentukan sebagai berikut :

1. Menyelesaikan masalah kewarganegaraan umumnja dan pelaksanaan perdjandjian penyelesaian dwi-kewarganegaraan antara RI-RRT setjara menguntungkan usaha memperbesar potensi nasional ;

2. Memperdjuangkan perkembangan ekonomi nasional, yang mendjamin kesempatan maju sama dalam usaha mempertinggi daja produksi nasional dengan memperhatikan terutama usaha² koperasi produksi ;

3. Memperluas kegiatan² dibidang pendidikan dari tingkat sekolah Rakjat sampai tingkat perguruan tinggi, yang bertudjuan memperbesar dan memperluas technical skill dan managerial know how yang dapat dikerahkan buat memperlantjar pembangunan² menudju kemasjarakat sosialis.

Didalam menilai program kerdja Baperki ini patut djuga diperhatikan suasana politik didalam negeri pada ketika Kongres di Semarang j.l. itu. Suasana politik dalam negeri pada ketika itu sangat dipengaruhi oleh persiapan² pelaksanaan Ketetapan MPR-S No. II/1960 dengan ajunan tjangkul pertama oleh Presiden Soekarno digedung Pola di Pegangsaan Timur 56 Djakarta pada tanggal 1 Djanuari 1961. Oleh karenanja mudah dimengerti, apabila program kerdja Baperki itu meletakkan titik berat pada usaha² :

- a. Memperbesar potensi nasional, yang dapat dikerahkan ;
- b. Mempertinggi daja produksi nasional, yang mendjamin pelaksanaan pembangunan nasional semesta berentjana.
- c. Memperbesar dan memperluas technical skill dan managerial know how memperlantjar pelaksanaan pembangunan nasional.

Antara Kongres yang lalu dan Kongres yang diselenggarakan sekarang ini perlu sekali kita tinjau bersama pelaksanaannya tiga pasal program itu untuk disempurnakan dengan menarik pelajaran dari pengalaman² yang diperoleh dalam perdjuangan pelaksanaan program itu.

Bagaimanakah pengalaman kita dalam melaksanakan program pasal pertama ?

Dalam menilai pelaksanaan program pasal pertama itu, baik sekali diperhatikan pendirian umum Baperki mengenai penyelesaian masalah kewarganegaraan umumnja dan penyelesaian masalah dwi-kewarganegaraan khususnja.

Pendirian umum Baperki mengenai penyelesaian masalah kewarganegaraan adalah, bahwa kita perlu mentjegah timbulnja masalah orang asing yang rumit dan bisa menimbulkan sengketa internasional yang tidak enak, dengan djalan membuka kemungkinan tjukup luas bagi keturunan orang² asing untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia setjara sukarela.

Djumlah orang asing dengan demikian berkurang setjara berangsur dan menurut Baperki tjara ini adalah sesuai dengan djiwa Pantja Sila, seperti didjelaskan Presiden Soekarno dalam „Lahirnja Pantja Sila“, yang menegaskan, bahwa „Nasionalisme hanja dapat subur didalam tamansarinja internasionalisme. Internasionalisme hanjalah dapat subur, djikalau berakar dibumi nasionalisme !“

Pendirian ini memang adalah pendirian yang bebas dari rasialisme dan berpendapat, bahwa tiap orang warganegara, tanpa memandang asal keturunaunja, dalam keadaan suasana hidup yang sama serta memperoleh kesempatan sama untuk mengembangkan rasa tjinta Tanah Air dan Rakjat dengan baik, pasti dapat mengembangkan rasa tjinta Tanah Air, rasa tanggungjawab sama besarnya terhadap kesedjahteraan hidup Rakjat dan kemerdekaan nasional penuh, artinja pasti dapat mendjadi patriot sejati, patriot paripurna.

Pendirian Baperki pada 9 tahun yang lalu itu, yang berpedoman pada ketegasan Bung Karno dalam Lahirnja Pantja Sila, sekarang ternjata adalah pendirian sesuai dengan garis² besar haluan negara kita, jaitu sesuai dengan Manifesto Politik. Seperti diketahui didalam Manifesto Politik telah dipertegas tentang tiga kerangka revolusi kita. Kerangka ke 3 itu berbunji sebagai berikut :

„Pembentukan satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara didunia, terutama sekali dengan negara² Asia-Afrika atas dasar hormat-menghormati satu sama lain dan atas dasar bekerdja-sama membentuk satu Dunia Baru, yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme, menudju kepada Perdamaian Dunia yang sempurna“.

Kerangka ke-3 revolusi kita ini dalam pelaksanaannya dalam hubungan dengan kenjataan, bahwa sebagai warisan djaman yang lampau, kita mengenal dalam negeri kita adanja lebih dari 1 djuta orang atau 1% dari djumlah penduduk, memiliki status asing dan penduduk, karena telah menetap lebih lama dari 10 tentu sadja tanpa memiliki hak² politik sebagai warganegara. memperoleh perlakuan tidak banjak beda daripada warganegara

tentu saja tanpa memiliki hak² politik sebagai warganegara. Meluapnja rasialisme disatu negara bisa menimbulkan persoalan internasional yang rumit, umpamanya seperti di Republik Afrika Selatan, yang menjebakkan wakil India di PBB dengan dukungan praktis semua negara A-A, mengadakan usul resolusi di PBB untuk mengutuk penindasan terhadap „resident alien“ India (penduduk India berstatus asing), penindasan terhadap orang² keturunan India warganegara RAS dan Rakjat RAS yang berwarna.

Rasialisme yang meluap seperti terdjadi di RAS itu merampas kemungkinan orang² berwarna yang berstatus asing dan keturunan-nya untuk berdagang, untuk melakukan pekerjaan guna mentjari sesuap nasi setjara halal, yang praktis berarti melakukan pengusiran-nya setjara besar-besaran, sedangkan warganegaranya yang berasal dari asal keturunan lain daripada mereka yang memegang kekuasaan memerintah dibatasi kesempatan maju dan mengembangkan bakatnja, supaya dapat diperbudak, ditindas untuk selama-lamanya.

Disamping ini patut djuga diperhatikan, bahwa sentiment nasional dinegara² yang baru mentjapai kemerdekaan, umumnya menghendaki untuk me-nasional-kan, untuk me-warganegara-kan praktis hampir semua usaha penghidupan ekonomi dan dalam rangka usaha melaksanakan kerangka ke-3 revolusi kita, maka terasalah, bahwa djalan terbidjaksana adalah memberi kesempatan luas setjara bidjaksana pada mereka yang berstatus „resident alien“ (penduduk tetap dengan status asing) untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Tentu saja kebidjaksanaan ini harus disertai dengan usaha² yang kongkrit dan intensif untuk menjadikan mereka bukan saja warganegara asal warganegara, melainkan warganegara yang berdjiva patriotik, yang sadar akan segala tanggung-djawabnja terhadap Tanah-Airnja, terhadap Rakjat dan terhadap kesempurnaan kemerdekaan nasional dengan kedaulatan penuh dalam tangan Rakjat Indonesia sendiri, disamping kesadaran tjukup tinggi akan mutlaknja ikut serta menyelesaikan revolusi Indonesia untuk melaksanakan Amanat Penderitaan Rakjat dengan mentjapai masyarakat sosialis Indonesia.

Apabila kita perhatikan perkembangan penjusunan ketentuan² kewarganegaraan Republik Indonesia, maka kita melihat djuga sebagai kenyataan, bahwa Undang² kewarganegaraan R.I., yang disusun didjaman revolusi physik, jaitu undang² yang diundangkan pada tanggal 10 April 1946, telah menggunakan stelsel passiel yang menegaskan, bahwa semua orang keturunan asing, yang tidak menolak kewarganegaraan Indonesia, dinjatakan adalah warganegara Indonesia, disamping membuka kesempatan tjukup luas bagi orang² asing untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia.

Tetapi dalam perkembangan selandjutnja, kita melihat, bahwa dalam menentukan ketentuan UU Kewarganegaraan mulai terasa pengaruh pikiran² rasialis, yang tadinja mulai terasa dibidang perdagangan sebagai akibat penjelewengan dalam revolusi. Seperti diketahui UU Kewarganegaraan No. 62/1958 telah memperberat syarat keturunan asing, yang dilahirkan setelah 1 Agustus 1958, untuk menjadi warganegara Indonesia dengan mengadakan pernyataan memilih kewarganegaraan Indonesia setjara aktif. Sjarat lahir di Indonesia diperberat dengan ketentuan harus dilahirkan sebagai keturunan kedua. Pun sjarat² bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan djalan naturalisatie diperberat, karena pengaruh pandangan rasialis dibidang ekonomi.

Perdjandjian penyelesaian dwi-kewarganegaraan RI-RRT, yang menimbulkan persoalan dwi-kewarganegaraan dalam masyarakat dan dwi-kewarganegaraan itu lalu menjadi alasan untuk mengadakan perbedaan perlakuan berdasarkan perbedaan keturunan, pelaksanaannya ter-katung² dimana sebelum kita mengenal Manifesto Politik. Hal ini kita melihat pada kenyataan, bahwa perdjandjian yang naskahnja diparaf pada tanggal 22 April 1955, baru dimusjawarahkan dan disahkan oleh DPR pada tanggal 17 Desember 1957 dan diundangkan pada tanggal 11 Djanuari 1958 sebagai UU No. 2/1958; Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan baru diundangkan pada tanggal 26 Mei 1959, tetapi pelaksanaan sesungguhnya terkatung-katung dan baru pada tanggal 21 Desember 1960, setelah kita mengena! adanya Manipol dan Djarek, baru tertjapai persetudjuan RI-RRT tentang Tjara Pelaksanaannya yang diumumkan bersama pada tanggal 24 Desember 1960.

Sebagai bukti, bahwa soal dwi-kewarganegaraan didjadikan alasan untuk mengadakan perbedaan perlakuan berdasarkan perbedaan keturunan, ialah ketentuan dalam UU Pokok Agraria, jaitu seperti dikemukakan terlebih dahulu.

Seperti dilaporkan dalam konferensi pleno Baperki terachir, maka dalam mempeladjar buku „Hasil-kerja Panitia Bersama“, yang disusun oleh Susanto Tirtoprodjo SH, ketua delegasi R.I. dalam Panitia Bersama RI-RRT, maka persoalan kematjetan itu adalah mengenai clause, yang memungkinkan mereka, yang telah memperoleh status asing sebagai akibat pilihan orangtuanya, untuk kembali menjadi warganegara Indonesia. Ketentuan ini sesungguhnya adalah sesuai dengan Peraturan Peralihan pasal V UU no. 62/1958, UU Kewarganegaraan R.I. sendiri. Menurut Susanto SH alasan untuk keberatan terhadap clause itu ialah : dichawatirkan, bahwa beribu-ribu pemuda Tionghoa yang sudah pulang kembali ke Tiongkok dan disana telah „di-in-

doktrinasi" dengan ideologi Komunisme, akan kembali lagi ke Indonesia sebagai warganegara Republik Indonesia".

Persetudjuan tentang tjara pelaksanaan antara RI-RRT baru dapat ditjapai setelah Presiden Soekarno menegaskan : „Seandainya betul beribu-ribu pemuda RRT yang sudah di-indoktrinir dengan ideologi Komunis akan kembali lagi masuk Indonesia sebagai warganegara R.I., kita tidak usah takut-takut, karena sekarang pun sudah ada 8 djuta warganegrara R.I. yang berhaluan Komunis".

Djadi keterangan Susanto SH mengungkap bahwa kematjetan penyelesaian dwi kewarganegaraan disebabkan djuga oleh adanya apa yang sekarang dinamakan komunisto-phobi !

Dari uraian diatas itu tergambar, bahwa perintang² bagi penyelesaian masalah kewarganegaraan berdasarkan Manipol ternjata disamping rasialisme adalah komunisto-phobi. Tetapi apabila kita teliti lebih djauh, maka kita tentunja pun harus mengakui, bahwa seorang rasialis memang tidak bisa tidak komunisto-phobi karena rasialisme menimbulkan penindasan manusia atas manusia berdasarkan alasan perbedaan „race", perbedaan asal keturunan atau perbedaan golongan ethnisk, sedang ideologi komunisme djusteru hendak menghapuskan sistim penindasan manusia oleh manusia.

Setelah hal ini dilihat setjara lebih njata lagi, maka kita lalu melihat perkembangan yang patut diperhatikan, jaitu bahwa salah satu resolusi dari sidang pleno CC PKI baru-baru ini dengan tegas mengajak untuk melawan rasialisme ! Hapusnja rasialisme pasti menguntungkan usaha melenjapkan komunisto-phobi ! Dengan adanya perkembangan ini tentu sadja patut kita sambut dengan gembira, karena memperluas barisan yang memperdjuangkan hapusnja rasialisme. Terutama setelah Presiden Soekarno dengan tegas menjerukan supaya meng-„ganjang" orang² yang komunisto-phobi dan yang anti-Nasakom, maka barisan perdjuangan anti-rasialisme mendjadi sangat luas dan meliputi sebagian terbesar Rakjat Indonesia.

Kemadjuan ini patut disambut dengan gembira dan mestinja mempengaruhi baik usaha meningkatkan semangat perdjuangan massa pendukung Baperki. Terutama dalam perdjuangan untuk menyelesaikan masalah² kewarganegaraan betul² sesuai dengan garis Manipol.

Sekarang kita masih menghadapi berbagai kesulitan dalam pelaksanaan penyelesaian dwi-kewarganegaraan, yang menjangkut mereka yang termasuk dalam golongan peralihan yang pernah menimbulkan kematjetan karena komunisto-phobi seperti dituturkan diatas. Mereka yang mendjadi asing, karena pilihan orang-

tuanja menurut Peraturan Peralihan Pasal V UUI Kewarganegaraan R.I. dan berdasarkan tambahan PP No. 20/1959 pasal 1 ayat 2, dapat memilih kembali kewarganegaraan Indonesia, tetapi dalam pelaksanaannya dibatasi. Jalah dibatasi pada mereka yang selalu bertempat tinggal diwilajah Republik Indonesia.

Adanja pembatasan ini menjebabkan Pengadilan Negeri, yang menerima pernyataan memilih kewarganegaraan Indonesia dari orang² yang bersangkutan memerlukan, adanya keterangan dari fihak imigrasi, bahwa orang² yang bersangkutan selalu bertempat tinggal diwilajah R.I., djadi kalau pernah pergi keluar negeri memperoleh re-entry-permit. Adanja prosedur ini menimbulkan kelambatan dalam penyelesaian, karena Djawatan Imigrasi rupanja tidak dapat menjediakan tenaga untuk mempelantjar pemberian surat² keterangan yang diperlukan itu. Ribuan persoalan masih menantikan penyelesaian.

Disamping itu penyelesaian masalah dwi-kewarganegaraan bagi orang² yang kurang mampu, terutama sekali yang tidak mampu, masih menghadapi kesulitan² terutama kesulitan surat² keterangan tjatatan sipil tentang kelahirannya. Orang² yang miskin dan tinggal terpencil didesa-desa ketjil umumnya tidak menghiraukan adanya tjatatan sipil, apalagi Rakjat sekelilingnja pun tidak mengenal Tjatatan Sipil yang berdasarkan B.W. (Burgerlijk Wetboek). Prosedur untuk memperoleh surat keterangan lahir ini seperti berulang kali dilaporkan adalah berbelit-belit, tidak sederhana dan terutama tidak lantjar bagi orang yang kurang mampu. Apalagi dalam keadaan inflasi yang menekan berat ini, menjebabkan tidak sedikit pelaksana membutuhkan penghasilan „extra", dan mengurus keterangan lahir dapat djuga mendjadi sumber penghasilan „extra" yang lumayan. Dengan demikian mudalah dimengerti, apabila yang masih belum selesai surat keterangan lahirnja adalah mereka dari golongan kurang mampu dan miskin.

Mengingat, bahwa Jang Mulia Menteri Kehakiman dalam sebuah tjeramahnya pada hakim² pengadilan negeri baru² ini telah menegaskan, bahwa hendaknya B.W. tidak dipandang lagi sebagai undang² yang mutlak, melainkan sebagai „boek" sadja, maka terasa bidjaksana, apabila dengan adanya keterangan Jang Mulia Menteri itu sjarat surat keterangan lahir bagi orang² keturunan asing, yang kurang mampu dan miskin, tidak didasarkan pada ketentuan B.W., yang mengatur urusan Tjatatan Sipil, melainkan didasarkan atas ketentuan umum yang berlaku bagi Rakjat biasa, jaitu sudah tjukup dengan keterangan lurah desa/wilajah yang bersangkutan.

Dengan demikian persoalan penyelesaian dwi-kewarganegaraan yang sekarang masih belum dapat diselesaikan diharap dapat

diselesaikan setjara lebih lantjar dan setjara sederhana sesuai dengan semangat dan ketentuan perdjandjian penjelesaian dwi kewarganegaraan RI-RRT sendiri.

Disamping itu persoalan dwi-kewarganegaraan dan persoalan kewarganegaraan sebagai keseluruhan pasti dapat diselesaikan setjara djauh lebih lantjar daripada sekarang ini dengan pelaksanaan Pantja Program Front Nasional dan Amanat Presiden pada musjawarah bersama PB Front Nasional dan PD Front Nasional baru² ini, chususnja dengan pelaksanaan pasal 5 Pantja Program : „Melaksanakan retooling aparatur negara, termasuk bidang pemerintahan dari pusat sampai kedaerah” dalam hubungan dengan pelaksanaan pasal 3 yang menentukan : „Meneruskan perdjjuangan anti-imperialisme dan neo-kolonialisme dengan memperkuat ke-gotong-rojongan nasional revolusioner ber-porok-an Nasakom ! „Pelaksanaan dari ketentuan² itu tentu sadja berarti hapusnja komunisto-phobi, yang menjimpulkan djuga hapusnja pandangan² rasialisme dengan pelaksanaan pasal 4 Pantja Program : „Meratakan dan mengamalkan Indoktrinasi berdasarkan Tubapi, seperti yang sudah ditetapkan oleh Presiden dilengkapi dengan Resopim dan Takem, yang memuat 9 wedjangan Presiden”

Berdasarkan pendapat ini, maka sudahlah djelas, apakah sebabnja Baperki mendukung Pantja Program Front Nasional dan Amanat Presiden pada Musjawarah Front Nasional setjara bulat dan mutlak, karena pelaksanaan program itu berarti pelaksanaan tjita² Baperki sendiri.

Menanggulangi kesulitan ekonomi dengan mengutamakan kenaikan produksi !

Pasal 2 dari Pantja Program Front Nasional menentukan : „Menanggulangi kesulitan² ekonomi dengan mengutamakan kenaikan produksi !”

Apa yang ditjantumkan dalam pasal 2 Pantja Program Front Nasional ini ternyata memperkuat pasal 2 program kerdja Baperki berdasarkan putusan Kongres Baperki di Semarang, yang menentukan : „Memperdjjuangkan perkembangan ekonomi nasional, yang mendjamîn kesempatan maju sama dalam usaha mempertinggi daya produksi nasional dengan memperhatikan terutama usaha² koperasi produksi.

Baik djuga kita segarkan ingatan kita semua, bahwa rumusan program pasal 2 itu didasarkan atas penerimaan dengan suara bulat Amanat Presiden pada Kongres Baperki di Solo, yang menegaskan : „..... ditinjau dari sudut ekonomi, masalah golongan ketjil (minority problem) bagi negeri seperti Indonesia kita ini

sesungguhnya adalah masalah menghapuskan sifat² „under-developed” dan mentjapai „full employment”. Dengan demikian penjelesaian bukanlah dengan djalan mengadakan diskriminasi rasial atau main asli-aslian, melainkan dengan djalan memikirkan dan melaksanakan pembangunan setjara besar-besaran dengan mengerahkan seluruh kemampuan yang ada, baik berupa technical know-how, managerial skill dan modal yang tersedia di Indonesia, djuga dari kalangan² golongan ketjil, sambil memperhatikan bagaimana si ekonomis lemah terhadap si ekonomis kuat. Soalnya ialah : Bagaimana meratakan kesedjahteraan.”

Memang, kesulitan ekonomi yang kita hadapi sekarang ini harus diatasi, ditanggulangi dengan mengutamakan kenaikan produksi, tetapi dalam hubungan dengan pelaksanaan 4 pasal dari Pantja Program yang lain. Karena apabila yang lain tidak dilaksanakan setjara sistematis dan intensif, pelaksanaan pasal 2 djuga tidak akan bisa penuh, sesuai dengan harapan kita semua.

Apakah sebabnja ? Dalam meninjau sebabnja, baik sekali kita sadari bersama pertama-tama, bahwa kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh Indonesia sekarang ini dapat dikatakan adalah kesulitan umum dikalangan negeri² yang baru merdeka, yang tegas anti-imperialisme. Apalagi Republik Indonesia kita, disamping tegas anti-imperialisme, djuga hendak mentjapai masjarakat sosialis Indonesia.

Apabila kita perhatikan kenyataan, bahwa tumbuhnja Republik Indonesia sebagai kekuatan „the new emerging forces”, yang memperkokoh kedudukannya dengan perdjjuangan anti imperialis, yang selandjutnja semakin mengubah perimbangan kekuatan setjara merugikan kedudukan dunia „the old established forces”, yang pasti tidak mau menjerah kalah dengan mentah-mentah dan sedikitnja berusaha untuk mempertahankan „status quo”.

Untuk membuktikan, bahwa persoalan ekonomi yang dihadapi oleh kita sekarang ini adalah persoalan yang bersifat umum, tentu sadja dengan perbedaan gradatie berdasarkan perbedaan kondisi² dalam negeri dari negeri² yang baru merdeka, dapat disini dikutip beberapa bagian resolusi Konperensi Setiakawan Rakjat Asia-Afrika mengenai masalah² ekonomi seperti diumumkan didalam pers pada tanggal 11 Februari j.l.

Resolusi KSRAA itu antara lain menjatakan :

„Meskipun negara² kolonial mengakui kemerdekaan politik, tetapi mereka masih berusaha mempertahankan dasar ekonomi untuk penghisapan. Apa yang dinamakan program² bantuan dari negara² imperialis adalah merintangî industrialisasi dan tidak mentjiptakan dasar bagi perkembangan ekonomi nasional”.

Dikatakan djuga : „Perkembangan ekonomi dari negara² yang

belum berkembang adalah mungkin terutama diatas dasar ber-sandar pada diri sendiri, penggunaan sumber-sumber dalam negeri diatas basis regional demi kepentingan Rakyat, perubahan agraria, industrialisasi diatas dasar yang rasionil, penegasan hubungan² dengan semua negara yang bersedia menghormati prinsip³ sama-derajat dan saling menguntungkan dan atas dasar nasionalisasi, bila mungkin, terhadap modal² asing².

Dalam mempeladjar bagian resolusi KSRAA ini, tentu saja patut sekali diperhatikan juga pengalaman tidak enak Sailan dalam menerima apa yang dinamakan „bantuan“ dari Amerika Serikat. Seperti diketahui „bantuan“ Amerika Serikat itu dengan mendadak ditjabut kembali, selagi pemerintah Sailan mengadakan rundingan dengan kongsi² minjak Amerika mengenai penggantian kerugian yang harus dibayar Sailan dalam tindakan menasionalisasi milik² kongsi² minjak Amerika itu. Semula diadakan tekanan oleh Amerika Serikat pada pemerintah Sailan untuk segera membayar kerugian. Tindakan Amerika Serikat ini menimbulkan amarah Rakyat Sailan yang menyatakan tidak bersedia membarter kemerdekaan dan kedaulatannya dengan bantuan dollar. Peristiwa ini memperkuat isi resolusi KSRAA yang memperingatkan perlunya ada kewaspadaan nasional dalam menghadapi apa yang dinamakan „bantuan“ yang berasal dari the old established forces.

Memang, dalam menawarkan dan meng-iming-imingkan „bantuan“ kalangan „the old established forces“ selalu mengemukakan rumusan², yang dipandang setjara secepat lalu hanya mengatur soal² formalitas tehnik, tetapi pada hakekatnya bisa menjadi ikatan² politik, seperti yang sekarang dialami oleh Sailan.

Kenjataan lain, yang menimbulkan kesulitan ekonomi bagi negara² yang sedang berkembang atau „new developing countries“, untuk melaksanakan pembangunan setjara bebas, tidak tergantung dari bantuan negeri² lain, ialah politik menggunting harga (price scissors), yang dijalankan oleh negeri² industri, terutama negeri² „the old established forces“, yang masih menguasai apa yang di kenal sebagai „world market“. Menurut angka² statistik dari PBB, barang hasil industri yang diexport oleh negeri² industri Barat harganya telah meningkat dengan 10% antara tahun 1953 dan tahun 1961. Tetapi harga barang² makanan dan bahan² mentah, yang biasanya diexport oleh negeri² yang sedang berkembang selama waktu itu telah turun antara 8-9%.

Dengan politik „menggunting harga“ ini, negeri² yang sedang berkembang harus bekerja lebih keras dan sanggup mengexport barang² lebih banyak untuk mengimport mesin dan hasil-hasil industri yang dibutuhkan dalam jumlah yang sama sebelum kenaikan itu.

Tjontoh² lebih kongkrit menggambarkan parahnya akibat politik „menggunting harga“ itu, yaitu kalau kita perhatikan, bahwa harga kopi Brazilia di pasar New York kwalitet standard Santos telah djatuh dari 78,7 cents dollar per pound dalam tahun 1954 menjadi hanya 36 cents dollar dalam tahun 1961, sedang harga cacao Brazilia di pasar New York djatuh dari 55,7 cent menjadi hanya 22,4 cent dalam waktu yang sama. Kapas Brazilia dipasar London telah djatuh dari 36,9 cent menjadi 28 cent per pound.

Indonesia juga tidak bebas daripada pengaruh politik „gunting harga“ ini dan kita lihat umpamanya pada perkembangan harga karet, yang menjadi bahan utama yang diexport dari Indonesia, yang sekarang praktis tinggal separohnya dari pada harga 10 tahun yang lalu pada ketika timbul perang Korea, umpamanya.

Djadi export meningkat dalam jumlah, tidak berarti meningkat dalam penghasilan uang asing. Padahal kebutuhan akan uang asing terus meningkat, karena kenaikan harga barang² hasil industri dari negeri² industri besar di Barat dan karena kebutuhan akan mesin serta „spare parts“-nya untuk memenuhi aspirasi nasional yang terus bertambah. Keadaan inilah, yang menyebabkan banyak negeri² yang sedang berkembang „haus“ akan „bantuan“. Tetapi pengalaman djelek dari Sailan, telah menimbulkan kejakinan merata dinegeri² yang sedang berkembang untuk melaksanakan pembangunan bersandar pada kemampuan diri sendiri, seperti dinyatakan oleh resolusi KSRAA itu. Disamping itu perlu diusahakan untuk membebaskan diri dari „price-mechanisme“ (perkembangan harga) dari World Market (pasar dunia) yang masih dikuasai oleh „the old established forces“ antara lain memperluas hubungan dagang dengan negeri² luar „World Market“ itu. Pendirian Indonesia, seperti ditegaskan dalam Ketetapan MPR-S No. II/1960 adalah memperkuat resolusi KSRAA itu. Pasal 7 Ketetapan MPR-S No. II/1960 menentukan: „Sumber pembiayaan bagi Pembangunan Nasional Semesta Berencana itu pertama-tama harus diusahakan atas dasar kekuatan dalam negeri dengan menegakkan semua modal dan potensi (funds & forces) progressif, dengan sedjauh mungkin tidak memberatkan beban Rakyat“.

Didalam Amanatnya pada Musjawarah Front Nasional pada tanggal 13 Februari j.l. Presiden Soekarno mempertegas lagi sebagai berikut:

„Tetapi sekali lagi saja tambahkan, membanting tulang dan membanting tulang, tidak dengan bantuan luar negeri yang setjara ditjekokkan didalam mulut. Sebab banyak sekali negara² sekarang yang menebah²kan dada, kami telah makmur, kami telah makmur. Tetapi apa kemakmuran itu? Kemakmurannya adalah kemakmuran daripada negara² asing.

„Kekajaan mereka itu mereka peroleh dengan memohon dan mengemis minta tolong, minta bantuan dan ditjekokkan dari luar. Kita tidak mau menjadi bangsa yang demikian itu. Kita mau adil dan makmur dengan memeras kita punja keringat sendiri. Hanja dengan demikian kita bisa memenuhi dharma kita didalam sedjarah dunia. Djer basuki mowo bejo! Hanja dengan demikian bangsa Indonesia bisa menjadi satu bangsa yang kuat!”

Ketegasan ini tidak mungkin menimbulkan salah mengerti lagi akan tekad Rakjat Indonesia, yang ditjerminkan dengan tegas oleh penjambunglidahnja, Pemimpin Besar Revolusi kita. Djadi ketegasan itu menghendaki, tiap orang warganegara bersikap patriotik dan menjadi patriotik dibidang pembangunan ekonomi, membanting tulang, kerdja keras untuk membangun, dalam tingkat pertama mentjapai kebebasan ekonomi, dalam arti mengachiri keterbelakangan dan ketergantungan pada luar negeri dan atas dasar ekonomi yang bebas, ekonomi yang independent ini kita membangun kemudian masyarakat sosialis Indonesia, yang mengachiri sistim penindasan manusia oleh manusia.

Djadi persoalan yang perlu segera digarap dalam melaksanakan ketegasan Presiden kita adalah pengerahan seluruh kekuatan, kemampuan dan daya membangun kita dengan disertai usaha untuk terus menerus memperbesar kekuatan dan daya membangun itu, sehingga daya membangun yang njata terus meningkat dengan ketjakapan yang lebih tinggi.

Memang, pengerahan funds & forces progressif sampai pada tingkat paling maximum sudah diperintahkan oleh Manipol dan diulangi oleh Djarek dan dipertegas pula, bahwa perlu ditijptakan „iklim baik” yang mendjamin berhasilnja pengerahan funds & forces progressif sampai pada tingkat paling maximum itu.

Tetapi walaupun Manipol sendiri sudah berusia tiga tahun lebih, namun belum tjukup terasa adanya pelaksanaan setjara sistematis pengerahan „funds & forces” progressif, yang setjara tegas ditudjukan untuk mempertinggi produksi nasional kita. Dan apabila Manipol disadari tjukup baik, bahwa untuk keperluan ini perlu ditijptakan „iklim baik” suasana yang favourable, didalam kenjataan kita menghadapi kenjataan, bahwa iklim bagi penanaman modal yang tegas mempertinggi produksi terasa tidak se-favourable iklim bagi memutar modal dibidang perdagangan spekulasi, yang dalam banyak hal merugikan usaha mempertinggi produksi dengan menjebakkan meningkatnja inflasi.

Apakah sebabnja? Sebabnja yang pokok ialah, bahwa peraturan lama, sampaipun pada peraturan warisan kolonial, yang djiwanja dan semangatnja bertentangan dengan Manipol, dibiarkan terus berlaku, seolah-olah Manipol tidak pernah memerintahkan re-

tooling.

Baiklah disini dikemukakan berbagai tjontoh, yang menggambarkan timbulnja kegandjilan² sebagai akibat masih dibiarkan berlakunja peraturan² warisan kolonial dan warisan didjaman penjelewangan (sebelum ada Manipol).

1. Masih berlakunja peraturan² Bedrijfsregelementeeringordonnantie, jaitu undang² kolonial, yang dahulu diadakan oleh pendjadjah Belanda untuk melindungi perusahaan² modal Belanda terhadap saingan modal Djepang yang mulai menjerbu masuk Indonesia. Dalam djaman usaha mempertinggi produksi untuk melaksanakan export-drive, masih berlakunja peraturan pembatasan perusahaan ternyata bisa mengakibatkan dizegelnja mesin² remilling yang lebih banyak daripada djatah idjin menurut bedrijfsregelementeering. Padahal permintaan membeli blankets, hasil remilling karet itu, meningkat dan kita perlu mempertinggi export untuk memperoleh deviezen lebih banyak. Pun sekarang masih diketahui adanya mesin² tjetak yang dizegel, karena lebih banyak daripada idjin perusahaan berdasarkan bedrijfsregelementeering. Hal ini terdjadi walaupun kekuatan mentjetak masih terasa kurang dan kekurangan ini menimbulkan alasan untuk mengimport mesin² tambahan, sedang yang tersedia didalam negeri ada djuga yang dizegel berdasarkan undang² warisan kolonial.

2. Manipol memerintahkan pengerahan funds & forces progressif, Djarek mempertegas semua warganegara harus bersatu, tidak ada asli-tidak asli (Tubapi halaman 176), pasal 27 UUD 1945 tegas menjatakan „Segala warganegara bersamaan kedudukannja” etc. Ketetapan MPR-S no. II/1960 pasal 5 antara lain mempertegas:

3. Untuk mengembangkan daya produksi guna kepentingan masyarakat dalam rangka ekonomi terpimpin, perlu diikutsertakan Rakjat dalam pengerahan semua modal dan potensi (funds & forces) dalam negeri etc. etc”, dan disamping itu lampiran A, yang mempunjai kekuatan amendemen bagian Industri Ringan yang mempertegas: „Industri ringan (sedang dan besar) dimiliki oleh negara, oleh swasta, yang modal dan keuntungannja menetap di Indonesia (domestic capital)”. Tetapi pelaksanaannja matjet, karena masih berlaku instruksi² menteri didjaman sebelum ada Manipol, yang dinamakan didjaman penjelewangan, yang menentukan sjarat² buat memperoleh idjin membangun perusahaan, terutama sjarat asli-tidak asli dan membatasi ikut sertanja modal domestic setjara sedemikian rupa, sehingga banyak pemilik modal tidak ketarik untuk menanam modal guna mempertinggi daya produksi nasional. Instruksi² menteri didjaman penjelewangan yang lalu seperti setjara umum dikemukakan diatas didorong oleh

pandangan rasialisme dan juga oleh napsu untuk memperoleh penghasilan extra, yang menjadi sumber bagi modal kapitalisme birokrat dan korupsi. Masih berlakunya instruksi² didjaman penjelewengan itu memperbanyak modal yang beredar didalam perdagangan spekulasi dan mengurangi kemampuan membangun untuk mempertinggi daya produksi nasional.

Disamping itu kita juga menghadapi satu hal yang terasa sangat aneh, yaitu terasa kurang adanya kesungguhan dalam melaksanakan Manipol dan pedoman² pelaksanaannya. Diatas dikemukakan tjontoh, bahwa pelaksanaan Manipol dan Ketetapan MPR-S seolah-olah dikebiri oleh masih berlakunya peraturan² warisan kolonial dan warisan djaman penjelewengan yang mestinya sudah lampau. Tetapi disamping itu belum terasa dilaksanakan dengan penuh kesungguhan dan sistematis ketentuan² yang menondjol dalam Ketetapan MPR-S No. II/1960, umpamanya :

1. Pembangunan Nasional Semesta Berentjana 1961-1969 supaya ditunjukkan kearah pengutamakan produksi bahan keperluan hidup Rakjat yang pokok untuk mentjapai taraf mentjukupi keperluan serta menudju kearah pembagian pendapatan nasional yang adil dan merata. (Pasal 5 ayat 1).

Dalam membuat ketentuan ini dan menilainya berdasarkan kenyataan, bahwa sekarang ini harga beras meningkat dan masih perlu di-import dalam jumlah besar, produksi gula terasa menurun, yang membikin sulit orang membeli gula, produksi minyak kelapa tidak tjukup, banyak alat produksi, alat tenun, paberik beras, paberik minyak kelapa, yang tidak digunakan sepenuhnya, malahan ada yang menganggur sama sekali. Serta disamping itu kita melihat tjara hidup mewah berlimpah-limpahan dari segolongan ketjil orang, sedang banyak hasil pertanian Rakjat didesa-desa tidak bisa memperoleh harga layak, karena kesulitan pengangkutan dari desa ke kota. Dengan rasa sedih orang mesti mengakui, bahwa pelaksanaan ketentuan dalam Ketetapan MPR-S sekarang belum tampak wujudnya.

2. Dalam rangka pembangunan tata-perekonomian nasional yang kuat dan bebas diperlukan adanya suatu sistim moneter yang sehat dan stabil guna melantjarkan produksi, distribusi, perdagangan, serta peredaran uang yang berentjana. (pasal 7 ayat 3).

Apabila kita membuat kembali ketentuan dalam Ketetapan MPR-S II/1960 ini maka orang tentu merasa aneh dan sedih apabila mesti memperhatikan kenyataan² antara lain sebagai berikut :

1. Index ongkos hidup di Indonesia pada tahun 1950 adalah 100, pada akhir tahun 1962 adalah 1.200, jadi naik 12 kali lipat.

2. Harga etjeran daging sapi di Djakarta pada bulan Desember

1960 (ketika ketetapan MPR-S disahkan) adalah Rp. 56,25, pada tanggal 21 Februari 1963 meningkat menjadi Rp. 500,—, meningkat menjadi 9 kali lipat! Harga telur pada bulan Desember 1960 adalah Rp. 2,90 pada tanggal 21 Februari 1963 menjadi Rp. 19,50 k.l. 7 kali lipat! Minyak kelapa dari Rp. 9,42 per 0,6 liter menjadi Rp. 110,—, menjadi 11 kali lipat!

3. Untuk mendorong export dan mengurangi disparita, pemerintah mengeluarkan peraturan SIVA dan apabila pada pertengahan Djanuari 1963 koers SIVA masih 20, pada tanggal 21 Februari 1963 kita nampak koers SIVA meningkat menjadi 30, kenaikan sampai 50%, yang menggambarkan tidak adanya kestabilan dan keadaan tidak sehat!

Kenyataan² ini menggambarkan, bahwa ketentuan didalam Ketetapan MPR-S No. II/1960 belum berhasil dilaksanakan, untuk tidak menjatakan di-peti-es-kan.

Disamping kenyataan², bahwa masih banyak peraturan² warisan kolonial dan djaman penjelewengan, yang semangatnya bertentangan dengan Manipol, tetap berlaku dan dibiarkan berlaku seolah-olah tidak ada pengaruhnya Manipol, kita menghadapi juga kenyataan, bahwa banyak ketentuan² dalam Manipol dan pedoman² pelaksanaannya belum terasa dilaksanakan dengan sistematis dan konsekwen. Ditambah lagi dengan kenyataan adanya salah-urus dan salah-duduk pada perusahaan² negara dan perusahaan² dagang negara.

Adanya salah-urus pada perusahaan² negara tidak bisa disangkal lagi dan juga tidak bisa disembunikan. Ini disebabkan, karena perusahaan² negara itu dahulunya adalah perusahaan² Belanda dan menjadi alat pendjadjahan Belanda untuk melaksanakan pemerintahan terhadap Rakjat Indonesia dan membikin Rakjat Indonesia menjadi miskin. Sekarang perusahaan² milik Belanda itu sudah kita ambil-alih dan dijadikan milik negara.

Apabila tidak terdjadi salah-urus, maka mestinya jumlah² kekayaan yang dahulunya diperas oleh pendjadjah Belanda dan di-transfer ke Nederland untuk mempertinggi tingkat kemakmuran pendjadjah, tentunya seluruhnya masuk ke kas negara, jadi mempertinggi penghasilan negeri, yang berarti mempertinggi daya kemampuan negara untuk memperbaiki tingkat kemakmuran Rakjat Indonesia sendiri. Tetapi bagaimana kenyataannya?

Kenyataannya ialah, bahwa dalam menaksir sumbangan perusahaan² negara pada kas negara selalu terdjadi salah-hitung. Pemerintah telah menaksir atau memperkirakan selama beberapa tahun terus menerus sumbangan² yang dapat diharap dari perusahaan negara hampir 4 miljard lebih tinggi. Untuk tidak membikin menjolok perbedaan, jumlah pengiraan untuk anggaran tahun 1962 diturunkan menjadi hanya Rp. 3 miljard sadja. Tetapi

djumlah ini ternyata masih beberapa milyar rupiah terlampaui tinggi. (Selama 6 bulan pertama hanya Rp. 21,- juta + Rp. 9 juta).

Angka² anggaran belanda itu menggambarkan betapa maha, nja harga mismanagement!

Team Survey yang dibentuk oleh Soksi dalam laporannya terpaksa mengakui salah-urus yang hebat itu dan menjatakan sebab salah-urus itu antara lain adalah:

1. Tata perusahaan tidak memperlihatkan kontrol yang baik, khususnja dibidang keuangan, distribusi dan tata-niaga umumnya, sehingga penjelewengan² berdjangkit disegala bidang.

2. Aktivita Perusahaan² Negara belum memperlihatkan dengan jelas fungsi dan kedudukannya sebagai perusahaan negara, sedang sebaliknya njata² selalu ketinggalan dan tidak mampu mengikuti dinamika pasar, baik didalam perdagangan dalam negeri, maupun diluar negeri.

3. Faktor² extern dan keadaan social-ekonomis, yang menjedihkan dan dipengaruhi oleh beredarnya modal spekulatif. Tidak didjelaskan, bahwa hal ini menimbulkan manipulasi, korupsi dan pemupukan kapitalisme birokrasi.

Disamping ini pendjelasan Letkol. Abdullah, ketua Finec Perda Djawa-Timur, seperti dimuat dalam „Antara“ tertanggal 14 Februari j.l. ternyata telah menjoroti lain matjam mismanagement. Pernyataan Letkol. Abdullah itu dikemukakan dalam rapat kerdja „Pengamanan Produksi Gula Djawa-Timur“ di Tretes Letkol. Abdullah itu antara lain menjatakan sebagai berikut:

„Kebiasaan feodal dikalangan pedjabat² PPN dan pemimpin² paberik gula Djawa-Timur sekitar kesewenangan yang non-demokratis; adalah merupakan sumber sengketa, yang tidak sadja membuat keruhnja keamanan produksi gula, djuga membuat merosotnja produksi disatu pihak. Dipihak lain, adanya ketidak-pantasan upah-kerdja dan djaminan sosial buruh gula dan buruh tebanan serta sewa tanah yang tidak lajak dan penjatuan² tanah milik kaum tani untuk tanaman tebu dengan „kekerasan“, sehingga membangkitkan kemarahan kaum tani untuk berdjuang melawan kemerosotan upah dan membela tanah garapannya!“

Pernyataan seorang perwira Finec Perda ini penting sekali karena menggambarkan tepatnya pendapat, bahwa untuk usaha mempertinggi produksi perlu sekali dilaksanakan management yang demokratis dan yang mendjalankan demokrasi, disertai dengan berproduksi pada buruh dan tani dengan produktivita yang terus menerus lebih tinggi.

Berdasarkan kenjataan², seperti diuraikan diatas ini, maka tergambarlah setjara jelas, bahwa untuk dapat menanggulangi kesulitan ekonomi yang kita sekarang hadapi, terasa perlu sekali

dilaksanakan pasal 5 dari Pantja Program Front Nasional: Melaksanakan retooling aparaturnegara, termasuk bidang pemerintahan dari pusat sampai daerah².

Tetapi dalam melaksanakan retooling itu, kita harus selalu ingat hubungan antara politik dan ekonomi seperti dinjatakan oleh Harold Lasky dalam bukunya „Introduction to Politics“: „Sistim hukum merupakan masker dibelakang mana kekuatan² ekonomis yang berkuasa menarik keuntungan dari pelaksanaan politik berdasarkan sistim hukum itu“. Dengan demikian tergambar djuga, bahwa apabila kaum feodal yang berkuasa, sistim hukum dan pelaksanaannya dibidang ekonomi tentu harus menguntungkan kepentingan kaum feodal. Apabila kaum kapitalis berkuasa, maka sistim hukum dan pelaksanaannya dibidang ekonomi harus mendjamin keuntungan bagi kekuasaan kaum kapitalis itu.

Kita sekarang di Indonesia menghadapi sedang berkembangnja, sedang berubahnja sistim hukum dan sistim ekonomi. Umpamanya kita telah menentukan Manipol sebagai garis² besar haluan negara, kita telah menegaskan Djarek sebagai pedoman pelaksanaan Manipol dan telah menerima RESOPIM dan Takem sebagai pelengkapnja, disamping MPR-S telah mengesahkan Ketetapan MPRS no. II/1960, yang menentukan susunan ekonomi yang harus dilaksanakan. Pun kita harus mengakui, bahwa semua ini ditjapai, karena didalam masyarakat dan didalam MPR-S dapat dilaksanakan dengan efektif kegotong-rojongan berporoskan Nasakom.

Oleh karenanja sebagai konsekwensinja, maka kita tentunya tidak bisa lain daripada mesti menjétudjui djuga ketentuan² didalam masyarakat, yang mulai terdengar dengan santar, bahwa untuk mendjamin lebih baik pelaksanaan Manipol, pedoman² pelaksanaannya serta Ketetapan MPR-S no. II/1960 perlu sekali kekuasaan politik, dalam arti kabinet, disesuaikan dengan susunan ekonomi yang hendak dibangun. Dengan Ketetapan MPR-S No. II/1960 kita sesungguhnya hendak membangun susunan ekonomi berdasarkan Manipol sebagai hasil rumusan kehendak bersama kegotong-rojongan kekuatan² revolusioner berporoskan Nasakom. Djadi dengan demikian sesuai dengan azas demokrasi mestinja rumusan kehendak bersama dari kegotong-rojongan berporoskan Nasakom dilaksanakan djuga oleh kekuasaan berdasarkan kegotong-rojongan berporoskan Nasakom djuga!

Dipandang dari sudut ini mestinja mendjadi logis djuga tuntutan, supaya pembentukan Kabinet Gotong-Rojong dengan poros Nasakom mendjadi tudjuan dari pelaksanaan retooling sebagai pelaksanaan pasal 5 Pantja Program Front Nasional.

Setelah kita menjadari akan perlunya retooling dengan tudjuan menjesuaikan kekuasaan politik dengan susunan ekonomi yang hendak kita bangun, yang tentunya tidak bisa berarti lain daripada

melaksanakan pembentukan Kabinet Gotong-Rojong dengan poros Nasakom, maka marilah kita tjoba menidjau djuga pelaksanaan pasal 2 Pantja Program Front Nasional dalam hubungan dengan pelaksanaan pasal 2 program kerdja Baperki sendiri.

Sebagai keterangan atas Pantja Program pasal 2 itu didjumpai ketegasan bahwa pelaksanaannya dilakukan dengan berpegangan teguh pada prinsip²:

- a. Patriotik dibidang ekonomi, jaitu bahwa persoalan perekonomian harus dipetjahkan dengan kepertjajaan penuh atas kekaja-an dalam alam Indonesia, pada kekuatan, daja-djuang dan optimisme Rakjat;
- b. Mengutamakan produksi pertanian (termasuk peternakan, perikanan, kehutanan), perkebunan dan pertambangan untuk membangun Indonesia yang ber-industri;
- c. Titik berat daripada mengatasi kesulitan² ekonomi ialah mem-pertinggi produksi disegala bidang dengan membentuk Dewan Produksi Nasional, yang dipimpin langsung oleh Presiden.
- d. Politik dan pimpinan dibidang ekonomi dan financieel-moneter harus ditudjukan kepada mempertinggi produksi;
- e. Memanfaatkan tenaga Angkatan Bersendjata dibidang mem-perbesar produksi dan usaha² pembangunan lainnya;

Didalam putusan tentang pelaksanaan Pantja Program Front Nasional ternyata didjumpai ketentuan² sebagai berikut:

2. Retooling yang dipimpin oleh Presiden sendiri dibidang Pemerintahan dan dibidang² lain dalam masyarakat dari pusat sampai daerah² dengan prinsip melaksanakan ke-gotong-rojongan Nasional berporoskan Nasakom dengan tudjuan terutama menanggulangi kesulitan² ekonomi atas dasar prinsip² tsb. diatas (Ketentuan ini memperkuat kesimpulan yang dikemukakan diatas).

4. Melakukan management terbuka dibidang produksi, distri-busi, keuangan dan moneter untuk mengembangkan social-support dan social-control dalam semua kegiatan usaha Pemerintah dengan mendjaga segi² security-nja.

5. Menjempurnakan distribusi, pengangkutan, komunikasi dan marketing dalam hubungan memperbesar produksi.

7. Segera menjelesaikan pembentukan Panitia² Landreform dan meng-aktifkan panitia² tersebut untuk memperlantjar pelaksanaan UU Pokok Agraria dan UU Perdandjian Bagi-Husil.

8. Segera melaksanakan suatu politik ekonomi-keuangan baru untuk melantjarkan pelaksanaan pembangunan nasional dan pe-ningkatan hidup Rakjat Indonesia.

Keterangan dan pelaksanaan pasal 2 Pantja Program untuk menanggulangi kesulitan ekonomi atas dasar kemampuan sendiri, mewadajibkan kita untuk melihat kenyataan akan perlunja disegerakan pelaksanaan landreform, yang dapat membebaskan kekuatan

produksi Rakjat terbanjak kita dari belenggu feodalisme dengan dilaksanakannya sembojan² tanah untuk penggarap tanah, dan tanah tidak boleh mendjadi alat penghisap. Pelaksanaan landre-form yang demikian itu adalah sangat penting artinja untuk me-laksanakan prinsip²: Mengutamakan produksi pertanian (termasuk peternakan, perikanan dan kehutanan) untuk membangun Indonesia berindustri.

Didalam mempeladjar semua ketentuan² dengan teliti, maka massa Baperki melihat kenyataan yang lebih tegas, bahwa keten-tuan² itu sesungguhnya memperkuat pendirian² yang selama ini di-kemukakan oleh kongres² dan konperensi² Baperki.

Jang masih mendjadi persoalan ialah memperdjuangkan dengan konsekwen pelaksanaannya.

Apakah yang dapat dikerdjakan segera oleh massa Baperki, yang sebagian terbesar terdiri daripada buruh/pegawai kantor dan pe-rusahaan, pengusaha² ketjil dan golongan tjendekiawan?

Inflasi yang menghebat terang mengatjaukan anggaran belandja rumah tangganya, sedang usaha² kaum imperialis untuk memper-tahankan kekuasaannya dalam bentuk neo-kolonialisme dengan djalan menekan rendah bahan yang diexport dari Indonesia dan me-ningkatkan harga barang² hasil industri dalam keadaan keuangan negara kita sekarang ini memang memperhebat gedjala inflatoir, karena penghasilan deviezen digentjet rendah, sedang untuk me-menuhi aspiraties nasional kita, kita membutuhkan lebih banjak deviezen untuk import mesin, spare-parts, yang belum dapat di-bikin sendiri. Pelaksanaan pasal 3 Pantja Program Front Nasio-nal: Meneruskan perdjuangan anti-imperialisme dan neo-kolonial-isme dengan memperkuat kegotong-rojongan nasional revolusio-ner berporoskan Nasakom", sesungguhnya setjara tidak langsung djuqa berarti melawan inflasi yang sekarang sedang memuntjak ini.

Didalam usaha mengatasi kesulitan akibat inflasi itu, maka te-rasa masih pentingnja dilaksanakan setjara lebih sistematis putus-an Kongres Baperki di Semarang yang antara lain mengandjurkan massa Baperki untuk mempertinggi daja produksi nasional dengan aktif menanami pekarangan rumahnya dengan berbagai matjam pohon² buah, singkong, djagung, pohon² lain yang menambah pangan, pemeliharaan peternakan ketjil, disamping mengemban-gkan usaha² keradjinan tangan perumahan. Usaha² ini dapat di-bikin lebih intensif dan berkembang lebih baik dengan disertai koperasi produksi mengawetkan buah² hasil pekarangan rumah, pembentukan² koperasi kredit dan koperasi produksi, umpamanja produksi asinan/manisan buah, produksi konfeksi pakaian anak², produksi barang mainan anak² dan banjak lainnya lagi. Dengan adanya produksi yang terus meningkat dapatlah dikurangi tingkat inflasi, artinja kita dapat membantu perdjuangan melawan inflasi.

Lain usaha untuk membantu massa Baperki dalam perjuangan mengatasi kesulitan akibat inflasi, yang menyebabkan anggaran belanda rumah tangga menjadi sulit untuk dibikin klop, ialah perlu ditinjau kemungkinan pembentukan dana² kesedjahteraan, yang mengorganisasi saling membantu dalam menghadapi sakit, kesusahan dll-nja. Untuk keperluan ini tentu perlu sekali diperoleh bantuan, kesediaan dan goodwill para dokter dan dokter gigi serta para bidan, disamping meninjau kemungkinan mengusahakan dengan bantuan para ahli obat seperti assistentnja koperasi² apotheek untuk para anggota dana kesedjahteraan itu dengan perhitungan harga lebih ringan daripada perhitungan apotheek biasa.

Dalam hubungan dengan usaha² membangun berbagai koperasi dan dana² kesedjahteraan saling membantu itu tentu dapat juga diintensifkan dan dikongkritkan kerdjasama dengan organisasi² buruh dan organisasi² tani atas dasar saling menguntungkan dan saling memenuhi kebutuhan dalam rangka usaha memperlantar peredaran barang, yang dapat mengurangi hebatnja tekanan inflasi. Untuk ini tentu tidak mungkin diberikan petunjuk setjara umum, karena perlu sekali diperhatikan keadaan² khusus di daerah², yang mentijptakan juga kemungkinan² yang berlainan. Di daerah Sumatera Utara, dimana ada terdapat daerah² dengan massa Baperki sebagai petani dan nelayan terbuka kemungkinan² yang tidak ada untuk daerah Djakarta-Raja, umpamanya. Tetapi walaupun demikian, pada umumnya dapat diandjurkan akan perlunya menaruh perhatian lebih besar untuk dilaksanakan tiap matjam usaha, yang dapat mempertinggi produksi nasional, disamping tiap matjam usaha yang dapat memperlantar peredaran barang. Mempertinggi produksi dan memperlantar peredaran barang dapat mengurangi tekanan inflasi, yang belum dapat dikendalikan sekarang ini.

Dari semua uraian diatas dapat dikemukakan berbagai kesimpulan sebagai berikut :

Baperki mendukung sepenuhnya Pantja Program Front Nasional dan dalam pelaksanaannya digunakan sebagai pedoman kerdja Amanat Presiden pada Musjawarah Front Nasional, keterangan program Front Nasional dan ketentuan² pelaksanaannya.

Disamping ini, Baperki setjara khusus memperjuangkan juga :

1. Hapusnja semua peraturan warisan djaman kolonial dan djaman penjelewengan, yang dalam semangat dan dalam ketentuan bertentangan dengan semangat dan ketentuan Manipol serta semua pedoman pelaksanaannya.

2. Pelaksanaan kewajiban sama dan hak sama disegala bidang bagi semua warganegara Indonesia tanpa memandang asal keturunannya, sebagai pelaksanaan lebih konsekwen dari UUD 1945 dan Manipol.

3. Ditijptakannya iklim baik, yang lebih mendorong kegiatan² dibidang usaha² memperbesar produksi dan menarik modal dagang kebidang industri ringan, jaitu antara lain dengan menjederhankan dan memperlantar prosedur peridjinan untuk mendirikan perusahaan² industri ringan, yang menurut ketetapan MPR-S terbuka bagi modal swasta nasional dan domestic (modal milik asing, yang tidak mentransfer keuntungan).

Tuntutan khusus Baperki ini sesungguhnya dengan sendirinja akan terlaksana dengan pelaksanaan „Pantja Program” Front Nasional, berdasarkan pertimbangan² sebagai berikut :

1. Yang Mulia Menteri Kehakiman sendiri telah mengemukakan tentang tidak lajaknja untuk mempertahankan Burgerlijk Wetboek sebagai Undang² dan berdasarkan jalan pikiran ini, maka terasa lebih tidak lajak lagi untuk mempertahankan segala undang² warisan kolonial dan segala instruksi menteri atau Peraturan Pemerintah dari djaman penjelewengan, yang merugikan pelaksanaan Manipol setjara konsekwen dan sungguh².

2. Kita sekarang sedang memperhebat perjuangan untuk penyelesaian revolusi dengan menjempurnakan Front Nasional. Menurut Presiden Soekarno dalam Djarek, „salah satu tjiri dari pada orang yang betul² revolusioner ialah satunja kata dengan perbuatan, satunja mulut dengan tindakan !” UUD 1945 mempertegas „segala warganegara bersamaan kedudukannya etc²”, sedang Djarek mempertegas „..... tidak pandang keturunan asli atau tidak asli !”. Tuntutan Baperki itu hanya menurut pelaksanaan satunja kata dengan perbuatan.

3. Iklim baik untuk menarik modal yang sekarang masih beredar dalam perdagangan, termasuk juga perdagangan spekulasi, kelapangan produksi dengan sendirinja akan tertijpta dengan pelaksanaan Pantja Program Front Nasional; yang menguntungkan produksi dan mempertegas, bahwa politik moneter diabdikan pada produksi, jaitu seperti dipertegas dengan pernyataan : „Politik dan pimpinan dibidang ekonomi dan financieel-moneter harus ditujukan kepada mempertinggi produksi”.

Sekarang marilah kita tinjau bersama pelaksanaan pasal ketiga program Baperki : Memperluas/menjempurnakan kegiatan² dibidang pendidikan dari tingkat sekolah Rakjat sampai tingkat perguruan tinggi, yang bertudjuan memperbesar dan memperluas technical skill dan managerial know how, yang dapat dikerahkan buat memperlantar pembangunan² menuju kemasyarakat sosialis.

Memperbesar jumlah Manipolis yang menguasai technical skill tinggi.

Seperti diketahui pasal 3 dari program Baperki ini tidak dapat

dipisahkan dari program pasal 1 dan pasal 2. Memang tiga pasal program Baperki itu merupakan Tri-Tunggal, yang pelaksanaannya mempengaruhi satu sama lain.

Baperki hendak memperjuangkan penyelesaian masalah² ke-warganegaraan setjara memperbesar potensi nasional, yang menguntungkan pelaksanaan tiga kerangka revolusi Indonesia sendiri seperti dijelaskan didalam Manipol.

Tjukup disadari, bahwa menambah djumlah warganegara, tanpa memperluas lapangan hidup, dengan memperlantjar perkembangan ekonomi, akan menimbulkan kesulitan yang tidak ketjil, bahkan selama ini kita telah mengalami sendiri, bahwa menghebatnja saling sikut-menjikut, meluapnja rasialisme, yang mentjari alasan matjam² untuk dapat mengadakan perbedaan perlakuan berdasarkan perbedaan keturunan, sampaipun soal dwi-kewarganegaraan dijadikan alasan untuk mempraktekkan sistim anak-tiri terhadap keturunan asing, semua ini disebabkan, karena lapangan hidup, perekonomian kita tidak berkembang tjukup pesat, sehingga dapat menampung aspiraties nasional yang sehat. Tentu sadja tidak dapat disangkal, bahwa diskriminasi rasial djuga dipraktekkan karena napsu² lain, yang tidak djudjur dan tidak patriotik, jaitu karena ingin menggendutkan perut/kantong sendiri dan memperoleh saham² kosong tanpa mempunjai modal riil dalam perusahaan² yang bakal didirikan baik untuk diri sendiri setjara terang-terangan maupun untuk „orang lain“, yang setjara tidak langsung menjebabkan timbulnja kapitalisme birokrasi yang bersifat korup.

Oleh karenanja untuk mentjegah timbulnja persoalan² diskriminasi rasial yang bersumber pada sempitnja lapangan hidup, tidak lantjarnja perkembangan ekonomi, maka ditjantumkanlah pasal 2 program Baperki, yang pelaksanaannya diusahakan untuk memperlantjar peralihan modal dagang ke modal industri, untuk mengurangi guna achirnja meniadakan modal yang beredar dalam perdagangan spekulasi dengan memperluas terus-menerus kemungkinan menanam modal dilapangan industri ringan, yang mempertinggi kemampuan produksi nasional Indonesia, setjara menguntungkan kelantjaran proses penyelesaian revolusi dalam tahap nasional demokratis ini untuk kemudian dapat meningkat ke tahap sosialisme Indonesia.

Tetapi kita djuga harus menghadapi realita, yakni bahwa akibat politik pendidikan kolonial, kita sangat terbelakang dalam menguasai technical skill dan technical know how. Memang pendidikan kolonial tidak mendorong kita untuk menguasai tjara membikin barang, untuk berpikir mengolah bahan² mendjadi barang² yang dibutuhkan Rakjat. Malahan timbulnja kegembiraan membikin barang² kebutuhan sendiri, mengolah bahan² mentah

mendjadi kebutuhan Rakjat sangat merugikan kepentingan kekuasaan pendjadjahan. Apalagi kekuasaan kolonialisme Belanda ditudjukan untuk mendjamin : 1. Pasar bagi barang² hasil industri nja dengan harga yang baik dan 2. mendjamin sumber bahan² mentah untuk industrinja dengan harga yang sangat murah.

Akibat pendidikan kolonial inilah kita tidak mendjadi technological minded. Negeri kita menghasilkan bidji cacao, yang mesti didjual murah ke Nederland dan kita mesti beli bubuk tjoklat dan batang tjoklat merek Droste dari Nederland dengan harga tinggi. Kita kaja karet, malahan mendjadi peng-export bahan karet yang termasuk besar didunia ini. Tetapi kita mesti mengimport praktis hampir semua barang yang dibikin dari karet, dari ban mobil sampai pada dot baji.

Kenjataan inilah yang mendorong Kongres Baperki mengandjurkan massanja untuk ikut serta didalam kegiatan² dibidang pendidikan dengan meletakkan titik berat pada pendidikan kedjuruan. Tetapi dalam melaksanakan pikiran untuk membuka sekolah² kedjuruan, kita ternjata terbentur pada kekurangan tenaga pengadjar.

Menghadapi keadaan ini menimbulkan pikiran untuk mentjuraikkan perhatian pada usaha memperluas kesempatan menuntut ilmu, terutama ilmu tehnik dan ilmu yang menjebabkan orang tidak tergantung pada adanja perusahaan² besar baru yang dapat menampungnja.

Seperti diketahui, pertimbangan inilah yang menjebabkan Baperki memulai kegiatannya dibidang perguruan tinggi dengan membuka Fakultas Kedokteran Gigi dan Fakultas Tehnik.

Kegiatan dibidang perguruan tinggi ini antara lain didesak djuga oleh kenjataan² sebagai berikut :

1. Perluasan kesempatan menuntut ilmu ternjata tidak berkembang seimbang dengan meningkatnja djumlah pemuda lulusan SMA, yang ingin melanjutkan pendidikannya pada perguruan² tinggi, terutama pada perguruan² tinggi negeri. Akibatnja penerimaan mahasiswa baru pada perguruan² tinggi negeri perlu dibatasi.

2. Dalam melaksanakan pembatasan itu terselip djuga pengaruh pikiran² rasialisme, yang sedang berkembang pada ketika itu dibidang ekonomi, didorong oleh napsu memupuk kapitalisme birokrasi. Djadi pemilihan seringkali tidak dilakukan berdasarkan ketjakaan dan bakat menurut hasil udjian tamatan SMA, melainkan dilakukan berdasarkan asal keturunan, yang seringkali djuga dipengaruhi oleh sistim kontjo dan keluarga.

3. Para pemuda tamatan SMA, yang tidak dapat ditampung pada perguruan² negeri maupun swasta. Tetapi kesempatan ini pun sangat terbatas, karena kesulitan² memperoleh tjukup diviezen

untuk melaksanakan pembangunan dengan perluasan usaha² dibidang ekonomi, disamping adanya penjeleweangan dari rel revolusi, yang menyebabkan di Indonesia terdapat lebih banyak mobil sedan daripada truck dan bis. Menurut tjtatan Transport Survey dari ICA di Indonesia dalam tahun 1961 terdapat 103.463 mobil penumpang, 18.917 bis dan 77.359 truck.

Usaha yang tiga tahun yang lalu dimulai dengan dua buah fakultas itu, sekarang telah tumbuh menjadi 6 buah fakultas, sehingga untuk mengkoordinasinja diberilah bentuk Universitas, yang dipimpin oleh Saudara njonja Utami Suryadarma dan dibantu oleh Saudara² dr. Be Wie Tjoen, sebagai dekan Fakultas Kedokteran Gigi, Ir. Pudjono H. Prakoso, dekan Fakultas Teknik, Dr. Gudadi Wreksoatmodjo, dekan Fakultas Kedokteran, Prof. Lie Oen Hock SH, dekan fakultas Hukum, Prof. dr. Utrecht SH, dekan fakultas ekonomi dan prof. dr. Tjan Tjoe Siem sebagai dekan Fakultas sastra. Tjabang Surabaya diasuh dibawah pengawasan : Prof. A.G. Pringgodigdo dengan dibantu oleh Sdr. Wijanto SH.

Alangkah bermanfaatja, apabila dengan organisasi Universitas Baperki ini kita dapat mengadakan „pool know how” dan dimungkinkan mengadakan berbagai matjam research ilmiah, yang dapat disumbangkan pada masyarakat guna memperlantjar perkembangan ekonomi kita menjadi ekonomi yang bebas dari ketergantungan pada World Market, sehingga menguntungkan proses perjuangan menuju pada penyelesaian revolusi nasional-demokratis ini guna selanjutnja meningkat ke tahap sosialisme-Indonesia. Karena dengan berhasilnja usaha mengadakan pool technical know how, kita akan dapat memperketjil arti keterbelakangan dalam pengetahuan teknik dan tjara pembikinan rupa² barang, sehingga dengan bantuan aparat organisasi Universitas Baperki dapat dibantu perkembangan pembangunan perusahaan² industri ringan swasta disegala bidang.

Umpamanja dengan adanya research yang tekun dan adanya bantuan dari tenaga² ahli yang tersedia, maka dapat dipertjaja, bahwa kekayaan alam yang berlimpah² dari Indonesia, pasti akan dapat digali untuk dirasakan guna kepentingan mempertinggi tingkat kesedjahteraan Rakyat Indonesia sendiri dalam waktu yang singkat. Laut kita tjukup luas dan mengandung kekayaan ikan yang sangat besar dan membikin mengiler banyak orang asing. Tetapi pekerjaan penangkapan ikan masih belum dapat dilaksanakan setjara intensif, karena kekurangan skill dan know how. Tetapi apabila banyak negeri lain dapat mengolah caustic soda, calcium carbonate, asem-semut dan garam dari air lautnja, kita yang mempunyai laut luas yang airnja asin, sama seperti laut dilain bagian dunia masih perlu import caustic soda, calcium carbonate, asem semut dan malahan pun pernah mesti import garam! Alam kita

kaya dengan tumbuh²an yang mengandung obat. Kita export temulawak, kunjit, kaju manis dll-nja untuk paberik² obat diluar negeri, tetapi kita belum dapat mengembangkan industri obat sendiri dengan bahan², yang terdapat didalam negeri sendiri. Kita belum berusaha setjara sistematis dan intensif untuk meningkatkan „djamu” menjadi „obat”, seperti halnja terdjadi dibanyak negeri lain.

Banyak kemungkinan yang dapat dikerdjakan dan harus digarap dengan mobilisasi para ahli yang tersedia. Untuk sementara waktu ini dialami kekurangan tenaga ahli, disamping kenyataan adanya tidak sedikit tenaga ahli yang bekerdja dibidang lain daripada keahliannja. Perkembangan ekonomi dinegeri kita sekarang ini masih memaksa banyak djuga ingeniours umpamanja untuk meninggalkan lapangan keahliannja dan bekerdja sebagai pedagang! Keadaan ini tentu sadja gandrjil, iaitu dalam keadaan dialami kekurangan tenaga dengan technical skill tjukup, tetapi yang memiliki technical skill belum melihat manfaatja untuk menggunakan skillnja dibidangnja disebabkan oleh pintjangnja perkembangan ekonomi kita dewasa ini, yang membikin pekerjaan pedagang — lebih lagi pedagang tjatut — lebih menarik dan lebih mendjamin keuntungan dan djaminan hidup yang lebih baik, daripada menggunakan skillnja dibidang produksi.

Seperti dikemukakan diatas, pelaksanaan Pantja Program Front Nasional ditudjukan untuk mengubah atau lebih betul untuk meng-koreksi keadaan yang gandrjil ini dengan diterutamakan pada usaha mempertinggi produksi.

Usaha kita dibidang perquruan tinggi sekarang ini merupakan djuga usaha untuk membantu terlaksanaja Pantja Program Front Nasional itu.

Karena Baperki mengadakan kegiatan² dibidang pendidikan dan perguruan tinggi tidak semata-mata untuk adanya rumah sekolah dan atau universitas asal rumah sekolah dan atau universitas sadja, melainkan mengadakan kegiatan itu untuk memperbanyak alat perjuangan melaksanakan tjita² Baperki, maka dengan adanya ketegasan, bahwa memperjuangkan penyelesaian revolusi Indonesia berarti djuga memperjuangkan tjita² Baperki, dapat ditegaskan djuga, bahwa sama halnja dengan Baperki sendiri. Universitas Baperki djuga menjadi salah satu alat revolusi.

Universitas Baperki berusaha keras untuk membantu memperbanyak djumlah Manipolis yang konsekwen dengan dibekali technical skill dan keahliannja dibidangnja setjara khusus dan berguna untuk dapat mengabdikan diri pada perkembangan proses menuju ke pelaksanaan Amanat Penderitaan Rakyat.

Oleh karenanja, maka ketentuan pasal 2 U.U. No. 22/1961 diusahakan untuk dapat dilaksanakan dengan sungguh² dan

setjara sistematis. Seperti diketahui ketentuan UU No. 22/1961 pasal 2 menentukan tugas perguruan tinggi sebagai berikut :

1. Membentuk manusia susila yang beradil dan bertanggung jawab akan terwujudnya masyarakat sosialis Indonesia, yang adil dan makmur, materiil dan spirituil.

2. Menjiapkan tenaga yang cakap untuk memangku jabatan yang memerlukan pendidikan tinggi dan yang dapat berdiri sendiri dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan.

3. Melakukan penelitian dan usaha kemajuan dalam lapangan ilmu pengetahuan, kebudayaan dan kehidupan kemasyarakatan.

Dibidang pendidikan pada umumnya Baperki ikut serta dengan aktif dalam usaha merumuskan dan melaksanakan usaha manipulasi pendidikan, terutama dalam usaha menanamkan Pantja Tjinta dilakukan sebagai usaha merealisasi Pantja Wardhana kepada anak-didik. Seperti diketahui prinsip Pantja Tjinta, seperti ditentukan didalam Kongres Baperki di Semarang adalah :

1. Tjinta Tanah Air dan Rakyat Indonesia
2. Tjinta kemanusiaan dan perdamaian dunia
3. Tjinta Ilmu dan Kebudayaan
4. Tjinta kerdja
5. Tjinta Ibu-bapak.

Untuk menanamkan Pantja Tjinta pada anak-didik rumah sekolah Baperki melalui kurikulum telah dilaksanakan beberapa kali permusyawaratan. Usaha menanamkan Pantja Tjinta pada anak-didik disimpulkan dapat dilaksanakan dalam merealisasi prinsip² Pantja Wardhana, seperti diinstruksikan dengan instruksi Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan no. 2 tanggal 17-8-1961. Prinsip² Pantja Wardhana adalah :

1. Perkembangan tjinta bangsa dan tanah-air, moral nasional/internasional/keagamaan ;
2. Perkembangan ketjerdasan ;
3. Perkembangan emosional-artistik atau rasa keharuan dan keindahan lahir-batin ;
4. Perkembangan keprigelan atau kerajinan tangan ;
5. Perkembangan jasmani.

Apa yang dimaksud dengan Pantja Tjinta seperti disahkan oleh Kongres Baperki yang lalu, ternyata tertakup juga dalam Pokok² Moral Nasional dan Pokok² Moral Internasional seperti yang dipedomankan oleh Dept. P.D.K. Untuk jelasnya dapat dikemukakan, bahwa Pokok² Moral Nasional menurut pedoman Dept. P.D.K. adalah :

1. Tjinta bangsa dan tanah-air, menjempurnakan kemerdekaan dalam segala bidang, nasional, politik, sosial, ekonomi dan kulturil
2. Setia kepada sosialisme Indonesia dan berusaha keras

untuk melaksanakannya.

3. Bekerja sungguh² dengan setjara tertib untuk kemakmuran dan keadilan materiil dan spirituil, bagi semua warga-negara tidak peduli keturunan, kepertjajaannya, kesukuaannya, golongannya dan jenis kelaminnya.
4. Orang yang sama sekali tidak dapat bekerja, tjatjad berat jasmani maupun rohani, menjadi tanggungan negara/masyarakat.
6. Tiap warganegara berkewajiban untuk menjaga dan memajukan kejayaan nasional.
7. Kesungguhan dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas negara atau tugas masyarakat.
8. Gotong-rojong dalam segala kerja penting, satu untuk semua, semua untuk satu.
9. Hubungan yang baik antar orang² perseorangan, saling menghormati dan tolong-menolong, manusia adalah kawan bagi manusia lainnya.
10. Sopan-santun, jujur dan berhati-bersih dalam pergaulan sehari-hari baik didalam masyarakat maupun dilingkungan rumah-tangga.
11. Saling menghormati dalam kehidupan keluarga dan perhatian yang khas bagi pemeliharaan dan pendidikan anak².
12. Menjaga kebersihan dan keindahan rumah tangga, halaman, dusun, kota dan alam.
13. Melawan segala matjam kelaliman, korupsi, penghisapan, penindasan dan parasitisme beserta sebab²nya yang terpenting didalam negeri, ialah : liberalisme, individualisme, feodalisme dan kapitalisme.
14. Orang sosialis Indonesia hanya merasa bahagia apabila semua orang disekitarnya, didalam masyarakatnya/negerinya merasa bahagia pula. Orang sosialis Indonesia tidak bisa merasa berbahagia kalau orang² disekitarnya dan negaranya menderita.

Sedangkan Pokok² Moral Internasional rumusannya adalah sebagai berikut :

1. Mengusahakan persahabatan dengan saling menghormati dan saling membantu antara bangsa Indonesia dan semua bangsa didunia, tidak membentji bangsa atau jenis bangsa (race) yang manapun.
2. Mengadakan solidaritas antara Rakyat pekerja diseluruh muka dunia, yang sama² menentang penghisapan manusia oleh manusia.
3. Melawan segala matjam kolonialisme dan imperialisme diseluruh muka bumi, sehingga terwujud dunia baru, yang bersih dari segala matjam penghisapan, penindasan dan pendjajahan.
4. Mengusahakan perdamaian yang sedjati, dimana semua

bangsa diseluruh dunia dapat bekerdja dengan aman dan dengan saling membantu untuk kebahagiaan mereka masing' atas dasar kebahagiaan universal.

Rumusan² Pokok² Moral Nasional dan Pokok² Moral Internasional ini memang memerintji setjara djelas apa jang disimpulkan dalam Kongres Baperki sebagai Pantja Tjinta. Adanja perintjian jang djelas itu mempermudah para guru pada rumah² sekolah Baperki untuk menanamkan Pantja Tjinta dalam merealisasi Pantja Wardhana, sehingga anak² kita mendjadi Manipolis sedjati jang dibekali keachlian tjukup tinggi untuk sanggup melaksanakan pembinaan masjarakat sosialis seperti ditugaskan oleh Amanat Penderitaan Rakjat.

Untuk dapat melaksanakan dengan lebih sempurna kewadajiban sebagai guru², jang hendak menanamkan Pantja Tjinta dalam merealisasi Pantja Wardhana pada anak² didik kita, maka Jajaran Pendidikan & Kebudayaan Baperki memang sedang menjiapkan pelaksanaan applikasi² kursus atau refreshing courses dalam waktu libur pandjang. Hal ini harap memperoleh perhatian tjukup dari tjabang², jang mengusahakan rumah² sekolah. Disamping kursus² itu bertudjuan untuk mempertinggi nilai pendidikan serta menjempurnakan pelaksanaan tugas menanamkan Pantja Tjinta, tentu sadja diperlukan djuga penjempurnakan koordinasi, tukar-menukar pengalaman kerdja, standardisasi buku² jang digunakan dan curriculum, jang dapat menguntungkan pemindahan murid², peladjar² dari satu ke tempat lain dan kalau perlu dengan diperolehnja djaminan minimal tentang tingkat pendidikan dapat djuga diatur kelandjutan peladjaran sampai pada tingkat perguruan tinggi.

Buat melaksanakan dengan sempurna semua usaha ini, terasa perlunya tjabang² membantu penjelenggaraan gotong-rojong untuk mengumpulkan dana² jang dibutuhkannya, karena uang jang dikeluarkan untuk investment of human skill ini akan memberi hasil jang nilainya tidak dapat dihitung dalam uang rupiah ataupun dollar. Terutama penting artinja bagi mempertjepat diatasinja keterbelakangan dalam menguasai teknologi modern dan dengan semangat menguasai ilmu untuk diabdikan pada kepentingan Rakjat pasti dapat memperlantjar hapusnja tjiri² underdeveloped untuk mentjapai full employment, jang berarti dipertjepatnja pembinaan masjarakat adil dan makmur, jang mengachiri sistim manusia menindas manusia!

Mengkosolidasi Baperki untuk memperhebat kemampuan mendjalankan tugas revolusi!

Seperti diketahui Kongres Baperki di Semarang telah memberi

tugas pada Pengurus Pusat Pleno Baperki untuk menjesuaikan/menjempurnakan Anggaran Dasar Baperki dengan knjataan Baperki dengan tegas dan bulat telah mendjadi salah satu alat perdjungan massa Rakjat untuk menyelesaikan revolusi menudju ke masjarakat adil dan makmur, sebagai akibat:

1. Kongres Baperki di Solo pada achir tahun 1957 telah menjetudji dengan suara bulat untuk mendjadikan Amanat Presiden pada Kongres Baperki garis perdjungan Baperki untuk menyelesaikan masalah minority berdasarkan Pantja Sila. Amanat Presiden Soekarno itu menegaskan, bahwa perdjungan menyelesaikan masalah minority tidak dapat dipisahkan daripada perdjungan membangun masjarakat adil dan makmur, bersih daripada exploitation de l'homme par l'homme.

2. Kongres Baperki di Djakarta pada achir tahun 1959 dengan suara bulat telah menjatakan mendukung dekrit Presiden untuk kembali ke UUD 1945 dan mendukung seluruh isi Manifesto Politik dengan kesanggupan untuk mengerahkan seluruh kemampuan organisasinja dalam ikut serta memperdjungkan pelaksanaan Manifesto Politik setjara konsekwen dan sistematis.

3. Kongres Baperki di Semarang pada achir tahun 1960 menjetudji dengan suara bulat untuk mendukung dan ikut serta memperdjungkan pelaksanaan Ketetapan MPR-S dengan djalan melaksanakan usaha mempertinggi kesadaran tjinta tanah-air dan tentang tugas revolusi guna mendjadi Manipolis jang baik.

Seperti diketahui Ketetapan MPR-S No. I/1960 menentukan Manipol sebagai garis² besar haluan negara dan Djarek, Membangun Dunia Kembali serta Amanat Pembangunan Presiden ditetapkan sebagai pedoman² pelaksanaannya. Ketetapan MPR-S II/1960 menetapkan pengesahan pola pembangunan nasional semesta berentjana tahap pertama, hasil karya Depernas dengan berbagai tjatatan dan ketentuan² untuk diperhatikan dalam pelaksanaannya.

4. Selandjutnja Kongres Baperki di Semarang pun menjetudji Baperki mendjadi organisasi-anggota Front Nasional sebagai konsekweni daripada pendirian² diatas itu tadi dan menentukan djuga, supaya semua anggota Baperki ikut serta aktif dalam membantu penggalangan Front Nasional sebagai alat samenbunding van alle revolutionaire krachten.

Dalam mendjalankan tugasnja Pengurus Pusat Pleno menarik kesimpulan, bahwa Anggaran Dasar Baperki jang lama perlu dipertegas, jaitu antara lain dengan menjempurnakan Mukaddimah Anggaran Dasar dan pasal 3.

Mukaddimah Anggaran Dasar Baperki jang telah disempurnakan mempertegas, bahwa Baperki berlandaskan Pantja Sila dan dalam perdjungannya menggunakan Manipol dan semua pedoman pelaksanaannya sebagai kompasnja. Pun dipertegas, bahwa Pantja

Sila adalah alat pemersatu bangsa Indonesia, yang terdiri dari banyak matjam golongan etnik, banyak matjam golongan agama dan aliran politik, disamping Pantja Sila menjadi satu doktrin perjuangan anti-imperialisme, anti penindasan untuk menjapai hapusnja sistim exploitation de l'homme par l'homme. Nasionalisme Pantja Sila atau Nasionalisme Gotong-Rojong memperjuangkan pembinaan bangsa (nation building) yang anti rasialisme, anti-chauvinisme, bersih dari penindasan atas manusia oleh manusia sebagai pelaksanaan Amanat Penderitaan Rakyat.

Pasal 3 Anggaran Dasar Baperki disempurnakan menjadi berbunyi sebagai berikut :

„Organisasi ini menerima dan mempertahankan Pantja Sila sebagai asas-dasar Negara dan aktif memperjuangkan pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia 1959 serta mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Memperjuangkan pelaksanaan tjiat² nasional, yaitu untuk menjadikan tiap warganegara seorang warganegara Republik Indonesia sedjati, pembela Pantja Sila sebagai asas-dasar Negara dan peserta aktif revolusi Indonesia.

2. Memperjuangkan pelaksanaan asas² demokrasi dan hak² asasi manusia setjara menguntungkan pelaksanaan Amanat Penderitaan Rakyat.

3. Memperjuangkan terwujudnja persamaan hak dan kewajiban serta kesempatan untuk maju bagi tiap warganegara dengan tidak memandang golongan etniknja, kebudajaannya, adat kebiasaannya maupun agamanya sebagai jaminan bagi pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia 1959”.

Djadi dari pasal 3 Anggaran Dasar yang disempurnakan dapatlah dinjatakan, bahwa penjemputan tidak mengubah semangat dan intisari naskah asalnya, karena penjemputan itu dilakukan dengan tujuan untuk mempertegas sikap Baperki yang menerima dan mempertahankan Pantja Sila sebagai asas-dasar Negara dan aktif memperjuangkan pelaksanaan Manipol. Bahwa penjemputan itu bersifat mempertegas dapat dilihat pada kenyataan tambahan yang diberikan dalam rumusan pasal 3, yaitu seperti yang digaris-bawahi.

Penjemputan itu dilakukan dengan memperhatikan kenyataan, bahwa dalam tubuh organisasi Baperki telah dihimpuh anggota² berasal dari berbagai matjam golongan etnik, seperti keturunan Tionghoa, keturunan India, keturunan Arab, keturunan Eropa disamping mereka yang dinamakan „asli”. Pun dalam tubuh organisasi Baperki terdapat massa anggota dari berbagai matjam agama, disamping dari berbagai matjam aliran politik. Malahan dapat dikatakan, bahwa tubuh organisasi Baperki merupakan kongkretisasi daripada kerdjasama dan gotong-rojong

berporoskan Nasakom. Nasakom tidak pernah menimbulkan persoalan dalam tubuh organisasi Baperki, karena tubuh organisasi Baperki adalah Nasakom, yang antara lain ternyata pada susunan pimpinan Panitia Penyelenggara Kongres Baperki kali ini. Dipandang dari asal keturunannya, pimpinan Panitia Kongres adalah perwujudan lambang negara Bhinneka Tunggal Ika, disamping perwujudan gotong-rojong dengan poros Nasakom !

Tambahan pada ayat 1 pasal 3 adalah konsekwensi dari semua putusan Kongres Baperki yang mendahului kongres ini, dan mempertegas pengertian kita tentang arti istilah „warganegara R.I. sedjati”, sehingga dapat membantu menjegah kekaburan tentang arti istilah itu.

Dengan tambahan itu menjadi tegas, bahwa pengertian kita tentang warganegara sedjati adalah : „Pembela Pantja Sila sebagai asas-dasar negara dan peserta aktif revolusi Indonesia”.

Tambahan pada ayat 2 pasal 3 juga mempertegas dan mengkonkritkan hak² demokrasi dan hak² asasi manusia yang bagaimana yang kita perjuangkan pelaksanaannya. Bentuk liberalisme dari demokrasi sudah dikubur oleh Manipol, Baperki sebagai organisasi massa yang mendukung Manipol tentu saja tidak dapat memperjuangkan hidupnya kembali bentuk liberalisme daripada demokrasi. Manipol menghendaki demokrasi terpinpin, yang menjamin pelaksanaan demokrasi dalam bentuk sempurna, demokrasi disegala bidang dan pelaksanaan demokrasi sempurna disegala bidang itu adalah untuk kemadjuan kepentingan Rakyat Indonesia sebagai keseluruhan. Didalam RESOPIM oleh Presiden Soekarno diberi ketegasan tentang Demokrasi Terpimpin antara lain sebagai berikut :

„Demokrasi kita bukan medan pertempuran antara opponent² satu sama lain, medan hantam-hantaman antara antagonisme, medan mencari kemenangan satu golongan atas golongan yang lain, medan untuk merebut kekuasaan oleh satu golongan terhadap golongan yang lain.

„Demokrasi kita tidak lain tidak bukan ialah mencari sintese, mencari akumulasi fikiran dan tenaga untuk melaksanakan Amanat Penderitaan Rakyat — semuanya atas pedoman **Ordering Baru** yaitu : Revolusi-Manipol/Usdek-Pimpinan Nasional. Dus Demokrasi Terpimpin tidak mencari, menghasilkan kemenangan sesuatu golongan atau kekalahan sesuatu golongan — ia hanya akumulasi maksimal daripada fikiran² baik, tjara² baik, kemadjuan² positif untuk Rakyat setjara keseluruhan, tidak untuk sesuatu golongan atau partai”.

Dipertegas juga, bahwa Demokrasi Terpimpin mempunyai dua unsur : unsur demokrasi dan unsur terpinpin. Demokrasi tok bisa njeleweng keliberalisme, terpinpin tok bisa njeleweng ke-dikta-

tor fasis. Seterusnya dinjatakan oleh Presiden :

„Demokrasi Terpimpin „loro-loroning-tunggal“, berarti ada demokrasinya dan ada terpimpinnya, ada terpimpinnya dan ada demokrasinya, oleh karena ia adalah **demokrasi pelaksana** daripada Amanat Penderitaan Rakyat. Ia harus diharmonisir dengan Ampera, ia adalah satu bagian mutlak, satu intergreerend deel daripada pelaksanaan Ampera. Jika tidak, dia akan kehilangan dasar, kehilangan tujuan. Demokrasi Terpimpin karena itu, harus pula ditujukan untuk **melindungi dan menambah hak²** bagi si Rakyat, — si Djelata, si Marhaen, si Murba, si Tani, si Proletar. Bersamaan dengan itu, dia harus ditujukan pula untuk **mengurangi atau menghapuskan hak-hak yang berlebih-lebihan** daripada kaki-tangan-kaki-tangan imperialis dan kaum kontra-revolusioner, kaum anti progressif dan kaum penghisap Rakyat !” (RESOPIM hal. 36-37).

Didalam pelantikan Panitia Penjusun RUU Pemilihan Umum, pada tanggal 2 Djuli 1962, Presiden Soekarno menegaskan lebih lanjut sebagai berikut : „..... kita harus meninggalkan apa yang dinamakan parlementaire demokrasi ala Barat dan kita ganti dengan **demokrasi Rakyat** yang sedjati, **demokrasi terpimpin** yang sedjati. Sebab hanya dengan demokrasi Rakyat, dengan demokrasi yang terpimpin oleh Rakyat dan untuk Rakyat, maka masyarakat sosialis, yang menjadi tujuan utama dari revolusi kita ini, bisa tertjapai”.

Didalam Amanatnya pada Musjawarah Front Nasional pada tanggal 13 Februari 1963, Presiden Soekarno memperlengkapi ketegasannya dengan menjelaskan :

„Negara kita bukanlah suatu negara diktatur. Bukan suatu negara fasis. Bukan negara autokratis, tetapi satu negara yang menjalankan segenap tugasnya atas landasan demokrasi terpimpin. Atau djikalau dikatakan dengan istilah negara sosialis „**Demokratie Centralisme**“, atau dengan istilah yang saja pakai didalam tahun 1929 „**Centralistische Democratie**“. Djikalau memakai istilah daripada kalangan agama, maka berulang-ulang saja katakan, bahwa demokrasi yang dikehendaki misalnya oleh agama Islam adalah juga satu demokrasi dengan pimpinan. Nabi tidak sekedar mengambil keputusan sendiri atau komando² sendiri, tetapi segenap putusan²nja, komando²nja dijalankan dengan tjara musjawarah dan mufakat atas dasar beberapa prinsip yang tidak boleh ditawar-tawar lagi.”

Demikian penjelasan² Presiden Soekarno tentang arti demokrasi dan demokrasi terpimpin dan menggambarkan tepatnya tambahan setjara menguntungkan pelaksanaan Amanat Penderitaan Rakyat pada ayat 2 pasal 3 Anggaran Dasar kita. Arti hak² demokrasi dan hak azasi manusia yang kita perjuangankan djadi tidak

dapat dibikin kabur lagi, sudah tegas arah-tujuannya !

Mengenai alasan tambahan ayat 3 pasal 3 „sebagai djaminan bagi pelaksanaan Manipol” dalam hubungan dengan perjuangan terwujudnya persamaan hak dan kewajiban serta kesempatan untuk maju, dapat dijelaskan, bahwa tambahan itu dirasakan perlunya untuk memperjelas, bahwa persamaan hak dan kewajiban serta kesempatan untuk maju bukanlah ditujukan untuk kepentingan segolongan warganegara tok, tetapi untuk mensukseskan pelaksanaan penggerakan funds & forces progressif sampai pada tingkat paling maksimum. Djadi perjuangan itu adalah perjuangan untuk mendahulukan kepentingan nasional. Oleh karenanya tidak bersifat eksklusif sebab tegas memperjuangkan kepentingan nation sebagai keseluruhannya !

Dari penjelasan diatas telah tergambar dengan tjukup tegas, bahwa Baperki tetap pada pendirian untuk memperjuangkan penyelesaian masalah minorita menurut garis yang diberikan oleh Presiden Soekarno didalam amanatnya pada Kongres Baperki di Solo, akhir tahun 1957. Garis ini berarti, bahwa penyelesaian masalah minorita tidak dapat dipisahkan daripada perjuangan mentjapai pelaksanaan pasal 27 ayat 2 dalam hubungan dengan pasal 33 UUD 1945, perjuangan membangun masyarakat adil dan makmur, yang bersih daripada sistim exploitation de l'homme par l'homme.

Dalam rangka ini, Baperki pun dapat menje'udjui pernyataan Presiden Soekarno, bahwa perjuangan menyelesaikan masalah minorita tertjakup djuga dalam perjuangan melaksanakan Pantja Program Front Nasional. Seperti dipertegas diatas perjuangan pelaksanaan Pantja Program berarti memperjuangkan kegotong-rojongan nasional berporoskan Nasakom, yang tegas anti-imperialisme, anti-kolonialisme dan menghendaki penghapusan sistim penindasan atas manusia oleh manusia dalam rangka perjuangan mentjapai bebas dari ketergantungan dari luar negeri dan bebas dari keterbelakangan feodalisme menuju ketertjapainya masyarakat adil dan makmur, masyarakat sosialis Indonesia.

Dalam memperhatikan perkembangan masyarakat manusia di dunia, kita memperoleh kenyataan, bahwa hanya dalam masyarakat, yang telah berhasil mengachiri berlangsungnya sistim penindasan atas manusia oleh manusia, kita tidak lagi mengenal adanya masalah minorita, walaupun masyarakat itu mengandung berbagai djenis golongan minorita.

Tetapi selama dalam satu masyarakat masih dimungkinkan adanya penindasan atas manusia oleh manusia, maka kita melihat, bahwa dalam masyarakat itu tentu timbul berbagai matjam masalah minorita. Kita pernah melihat, bahwa dalam masyarakat Djerman dengan meningkatnja dan menghebatnja penindasan atas manu-

sia oleh manusia, jaitu dengan pembentukan kekuasaan Nazi-Hitler, sebagai usaha untuk menjelamatkan kapitalisme yang sedang runtuh, timbullah masalah minorita Jahudi, yang kemudian menjadi tambah hebat menjadi pemusnahan golongan minorita Jahudi dengan kekerasan. Tindakan memusnahkan golongan minorita Jahudi di Jerman dalam zaman Nazi-Hitler itu dikutuk oleh ummat manusia sebagai kedjahatan „genocide”. Peristiwa mengerikan ini telah menyebabkan PBB dalam tahun 1948 mengesahkan sebuah konvensi internasional untuk menghukum dan mentjegah kedjahatan „genocide” (Convention on the Punishment and Prevention of the Crime of Genocide). Dalam konvensi itu ditegaskan, bahwa dengan „genocide” diartikan: „Melakukan tindakan² tertentu dengan maksud untuk menghapuskan — sebagian atau seluruhnya — kelompok² nasional, ethnisk, rasial atau agama sebagai kelompok”. (Committing certain acts with intent to destroy, in whole or in part, national, ethnical, racial or religious group as such).

Kita juga melihat, bahwa dalam masyarakat Amerika Serikat, dimana masih berlaku sistim penindasan atas manusia oleh manusia, masalah minorita golongan ethnisk Negro belum juga diselesaikan, walaupun dalam tiap pemilihan umum yang diadakan tiap 4 tahun sekali di Amerika Serikat, telah dikemukakan djandji² bagi penjelesaiannya.

Kenjataan ini menyebabkan kita sampai pada kesimpulan bahwa masalah minorita, baik minorita golongan ethnisk maupun minorita djenis lain, hanya dapat diselesaikan dengan berachirnya sistim exploitation de l'homme par l'homme. Pendapat ini pun menjadi dasar kita menjetudji garis Presiden Soekarno, seperti dikemukakan didalam Amanatnya pada Kongres Baperki dan kita mendukung untuk memperjuangkan pelaksanaan Pantja Program Front Nasional.

Berdasarkan pendapat itu, kita tidak dapat menjetudji pendapat sementara orang, yang mengandjurkan penyelesaian masalah minorita dengan tjara apa yang dinamakan „assimilasi”. Tjara „assimilasi” menghendaki hapusnya tjiri² chas minorita golongan ethnisk dan oleh karenanya dapat meluntjur ke tindakan², yang tergolong pada tindakan „genocide”, yang dikutuk oleh ummat manusia.

Tjara „assimilasi” itu tidak bebas dari pandangan rasialis, yang setjara salah berpendapat, bahwa golongan ethnisk yang mempunyai tjiri² berlainan mempunyai nilai lain pula, sehingga menimbulkan napsu untuk melebur yang sedikit kedalam golongan yang banyak guna melenjapkan tjiri² yang lain itu. Pikiran untuk melebur golongan yang sedikit kedalam golongan yang banyak pun tidak dapat disesuaikan dengan kenjataan; bahwa Pantja Sila adalah

gotong-rojong. Kita dapat menggambarkan, bahwa pelaksanaan gotong-rojong akan menjadi rusak dengan timbulnya napsu golongan besar hendak melebur golongan² ketjil.

Tjara „assimilasi” tidak dapat dikombinasikan dengan garis penyelesaian masalah minorita melalui Pantja Program Front Nasional, karena Pantja Program menghendaki pemusatan seluruh perhatian dan seluruh kekuatan nasional-revolusioner dalam kegotong-rojongan yang dinamis untuk membangun masyarakat yang bersih daripada penindasan, sedang tjara assimilasi menghendaki assimilasi dahulu, yang melebur golongan² ketjil kedalam golongan yang besar satu setjara mengurangi pemusatan seluruh perhatian dan merugikan pemusatan seluruh kekuatan pada sasaran tudjuan perjuangan sesungguhnya.

Disamping itu baik juga kita perhatikan, bahwa memang Bhinneka dalam arti banyak golongan ethnisk adalah kenjataan sekarang atau das Sein, dan Tunggal Ika adalah das Sollen. Tetapi dengan Tunggal Ika sebagai das Sollen tentunya bukan dimaksudkan satu djenis golongan ethnisk sebagai produk apa yang dinamakan „assimilasi”, melainkan satu dalam tjita² ber-negara dan satu dalam kemauan membangun masyarakat adil dan makmur tanpa exploitation de l'homme par l'homme, walaupun terdiri dari banyak golongan ethnisk. Untuk ini kita sekarang sedang berjuang dan melaksanakan Pantja Program Front Nasional.

Demikianlah laporan yang dapat disampaikan pada Kongres tentang pekerdjaan Pengurus Pusat Pleno dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kongres yang duluan.

Djadi uraian diatas itu mempertegas, bahwa Baperki adalah salah satu alat perjuangan menyelesaikan revolusi Indonesia yang mengenal dua tahap, jaitu tahap nasional-demokratis dan tahap sosialisme Indonesia. Sebagai massa pendukung Baperki kita semua tentu merasakan juga setjara tegas, bahwa untuk dapat menunaikan tugas kita lebih baik sebagai warganegara Indonesia dan peserta aktif dalam perjuangan menyelesaikan revolusi, kita perlu mengkonsolidasi Baperki sebagai organisasi massa untuk menjadi alat yang lebih baik dalam perjuangan melaksanakan tugas revolusinya, yang juga berarti memperjuangkan pelaksanaan tjita²nya seperti tertjantum dalam pasal 3 Anggaran Dasarnya.

Kongres ini hendaknya dapat mengambil keputusan², yang pelaksanaannya dapat mengkonsolidasi Baperki sebagai organisasi massa dan menjadi alat untuk melaksanakan tugas revolusi setjara lebih baik bagi tiap orang anggotanya.

Dalam hubungan ini tentu sadja perlu dipikirkan pelaksanaan usaha² yang dapat mengkongkritkan simpati dan dukungan massa Baperki pada Baperki sebagai organisasi massa, jaitu a.l. umpamanya :

1. Menjempurnakan dan mengkongkritkan usaha menjadikan Universitas Baperki juga sematjam „pool tenaga² ahli dan technical know how tjukup“, hingga dapat membantu, menjumbangkan nasehat², petundjuk² dan bantuan² teknis-maupun administratif bagi massa Baperki dalam usahanya mengalihkan modal dagang ke modal industri dalam rangka melaksanakan tugas menjadi peserta aktif dalam revolusi, yang menhendaki dipertingginja daja produksi nasional dalam waktu singkat setjara memperkokoh daja-djuang Rakjat dalam usaha mentjapai ekonomi nasional yang bebas dari ketergantungan „bantuan“ luar negeri dan bebas dari keterbelakangan kolonial dan feodal.

2. Menjempurnakan dan mempertinggi nilai pendidikan pada rumah² sekolah Baperki dalam rangka menanamkan Pantja Tjinta pada anak-didik dalam hubungan dengan merealisasi Pantja Wardhana dalam rangka usaha memperbanjak Manipolis, yang diperlengkapi dengan technical skill dan keachlian dibidangnya tjukup tinggi guna menjadi pembina masyarakat yang bersih dari-pada exploitation de l'homme par l'homme.

3. Menjempurnakan dan memperluas kesempatan bagi para olahragawan dan budajawan kita untuk mengembangkan bakatnja, dan disamping itu tidak melupakan peluasan kesempatan bagi para pemuda untuk melatih diri dalam kursus² kedjuruan, yang membikin mereka menjadi tenaga² yang lebih berguna dalam proses revolusi menuju kemasjarakat adil dan makmur. Belajar ilmu untuk kemajuan masyarakat perlu dikongkritkan dengan membuka kesempatan lebih luas pada banjak pemuda untuk mejakini dan menguasai ilmu, supaya mereka dapat mengabdikan diri lebih baik bagi perkembangan kemajuan masyarakat dan mempertinggi tingkat kesedjahteraan Rakjat setjara kontinu.

4. Menjempurnakan seksi² wanita dan memperluas tata-sibuk bagi massa wanita kita, terutama dibidang penjelenggaraan, pengawasan rumah² sekolah, kursus² kedjuruan dan koperasi² produksi keradjinan tangan di-rumah², serta penjelenggaraan BK IA2, dimana mungkin.

5. Mengembangkan usaha² pembentukan dana kesedjahteraan dan saling membantu dalam waktu menghadapi kesulitan, disamping pembentukan dana belajar bagi anak²nja.

Dengan dikongkritkannya simpati dan dukungan massa Baperki maka Baperki sebagai organisasi massa tentu dapat dikonsolidasi untuk dapat memperjuangkan dengan baik :

1. Pantja Program Front Nasional, yang menjadi program perjuangannya umum Baperki juga. Pantja Program itu adalah :

1. Mengkonsolidasi kemenangan² yang sudah ditjapai dibidang keamanan, Irian Barat dan bidang² lain.
2. Menanggulangi kesulitan² ekonomi dengan mengutamakan ke-

naikan produksi.

3. Meneruskan perjuangannya anti-imperialisme dan neo-kolonialisme dengan memperkuat kegotong-rojongan nasional-revolusioner berporoskan Nasakom.
4. Meratakan dan mengamalkan indoktrinasi berdasarkan TU-BAPI, seperti sudah ditetapkan oleh Presiden dilengkapi dengan RESOPIM dan TAKEM, yang memuat 9 wedjangan Presiden.

5. Melaksanakan retooling aparaturnya negara, termasuk bidang pemerintahan dari pusat sampai daerah².

Pantja Program Front Nasional ini diperlengkapi dengan keterangan dan ketentuan² pelaksanaannya, yang sebagian besar telah dikemukakan dalam uraian diatas.

II. Program khusus Baperki, jaitu Tri-Program berdasarkan putusan Kongres di Semarang, setelah disesuaikan dengan perkembangan keadaan. Rumusannya menjadi seperti berikut :

1. Menjelesaikan soal² kewarganegaraan setjara memperbesar potensi nasional dan menguntungkan pelaksanaan tiga kerangka revolusi Indonesia ;
2. Mengembangkan kegiatan² dibidang ekonomi untuk mempertinggi daja produksi nasional, yang sanggup mengatasi inflasi ;
3. Memperbanjak Manipolis² sedjati, yang sanggup membangun masyarakat sosialis Indonesia.

Dengan Program diatas ini, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi² di-daerah² masing², maka dengan tekad bulat kita hendaknya mengkonsolidasi Baperki sebagai organisasi massa alat-revolusi yang lebih baik dan lebih berguna !

PIDATO SIAUW GIOK TJHAN

Ketua Umum Pusat BAPERKI

*Diutjapkan pada tgl. 14 Maret 1963
dihadapan PjM. Presiden Soekarno,
bertempat di „Gloria Bung Karno“.*

PADUKA JANG MULIA PRESIDEN, Pemimpin Besar Revolusi Indonesia, BUNG KARNO, jang tertjinta !
Jang Mulia Menteri Pertama dan para saudara Wakil Menteri Pertama dan Menteri jang kami muliakan !
Para Jang Mulia anggota² Corps Diplomatique !
Saudara² hadirin jang kami muliakan !

Atas nama Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia saja pertama-tama mengutjapkan diperbanjak terimakasih sehangat-hangatnja pada Bung Karno, jang tertjinta, bahwa didalam segala kesibukannja melaksanakan tugas sebagai Kepala Negara dan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia, ternjata masih dapat memerlukan untuk meluangkan waktu guna menghadiri resepsi Kongres Nasional Baperki ke-VIII ini buat memberikan Amanat pada para Kongresis setjara langsung sebagai kelandjutan Amanat Tertulis, jang pernah diberikan pada Kongres Baperki ke-V di Solo, jang telah mendjadi pedoman perdjuaan Baperki selama ini.

Geste dan kebidjaksanaan Bung Karno ini membuktikan setjara tegas, bahwa Bung Karno jang kita tjintai ini, memang telah memperhatikan perkembangan dan segala perdjuaan organisasi² dan partai², jang dianggapnja sebagai alat perdjuaan menjelesakan revolusi Indonesia.

Saja yakin, bahwa kehadiran Bung Karno pada resepsi pembukaan Kongres Baperki ini untuk memberikan amanatnja setjara langsung, pasti merupakan dorongan bagi seluruh massa pendukung Baperki, jang tersebar diseluruh kepulauan Indonesia, untuk membanting tulang lebih keras lagi dalam melaksanakan tugasnja sebagai putera² Indonesia, jang ingin menjaksikan terwujudnja masyarakat adil dan makmur, jang mengachiri sistim exploitation de l'homme par l'homme, sehingga tiap orang warganegara selan-

djutnja dapat mengetjap kebahagiaan hidup sempurna, bebas dari rasa takut di-anak-tirikan, bebas dari segala matjam prasangka rasial, dan bebas dari segala matjam rasa takut akan menderita kekurangan.

Bung Karno jang tertjinta !

Hari ini Baperki sebagai organisasi massa nasional mulai tahun ke-10-nja. Sembilan tahun jang lalu kami telah mendirikan Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia untuk memperdjuaan penjelesaian masalah² kewarganegaraan Indonesia sesuai dengan djiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dengan djalan memperdjuaan pelaksanaan Pantja Sila sebagai asas-dasar negara didalam praktek penghidupan sehari-hari, hingga hapuslah pandangan² chauvinis dan napsu² rasialis dalam pergaulan hidup ditanah air kita ini.

Kita semua telah mempeladjadi dengan seksama „Lahirnja Pantja Sila“, jang pemerahannja mendjadi Eka Sila Gotong-Rojong jang dinamis tanpa memandang asal keturunan, suku, kepertjajaan, agama, aliran politik jang dianut oleh seseorang warganegara Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 mempertegas, bahwa kita hanja mengenal satu matjam warganegara Indonesia dengan hak² dan kewadajiban² jang sama, jaitu seperti dipertegas didalam pasal 27, 30 dan 31 UUD 1945.

Oleh karenanja para pendiri Baperki sembilan tahun jang lalu berpendapat tidaklah ada alasan lagi untuk mempertahankan partai politik berdasarkan satu matjam asal keturunan, seperti PDTI, dan tidak ada alasan untuk mempertahankan organisasi² seperti Perwitt dan Perwanit, jang berdasarkan asal keturunan, PDTI, Perwitt dan Perwanit sembilan tahun jang lalu telah dibubarkan berdasarkan pertimbangan, bahwa menurut proklamasi 17 Agustus 1945 kita hanja mengenal satu matjam warganegara dengan kewadajiban-kewadajiban dan hak² jang sama, sedang Pantja Sila sebagai asas-dasar Negara tegas anti chauvinis, anti rasialisme dan menghendaki Gotong-Rojong jang kokoh dan dinamis.

Apabila didalam penghidupan sehari-hari masih ada timbul masalah² kewarganegaraan, masih ada praktek² perbedaan perlakuan berdasarkan perbedaan asal keturunan, masih tampak dan terasa adanya napsu² rasialisme, maka kenjataan² ini disebabkan oleh karena dua hal pokok, yakni :

1. Dengan proklamasi kemerdekaan sadja, kita belum berhasil melikwidasi sampai pada akar²nya kolonialisme, peraturan² dan pandangan² akibat kolonialisme belum dapat turut dihapus. Apalagi disamping itu sembilan tahun jang lalu kita masih tertindih atau tertjengkeram didalam usaha neo-kolonialisme dalam bentuk perdjandjian KMB.

2. Pelaksanaan perdjandjian KMB memperbanjak penjele-
wengan² terhadap garis revolusi. Kita sekarang telah mengetahui,
kampiun² politik asli-aslian ternyata menjadi tokoh² pemberon-
takan contra-revolusioner PRRI. Dan Dekrit Presiden 5 Djuli
1959, yang menjatakan berlaku sahnja kembali UUD 1945
ditudjukan untuk mengachiri penjelewengan² itu.

Berdasarkan kenyataan², bahwa adanya masalah² kewargane-
garaan timbul, karena belum dilikwidasinja sampai pada akar²nja
kolonialisme, disamping adanya usaha² untuk melaksanakan neo-
kolonialisme yang menimbulkan penjelewengan² maka 9 tahun yang
lalu Baperki berpendapat, bahwa penyelesaian masalah² kewar-
ganegaraan sesuai dengan djiwa proklamasi, termasuk djuga
penyelesaian masalah minoritas, tidak dapat dipisahkan daripada
perjuangan Rakjat untuk mentjapai tudjuan revolusi yang ditje-
tuskan dengan proklamasi 17 Agustus 1945 itu. Artinja Baperki
sembilan tahun yang lalu telah menjadari, bahwa penyelesaian
masalah² kewarganegaraan, termasuk penyelesaian masalah mino-
ritas, sangat tergantung pada perjuangan Rakjat mentjapai tudju-
an revolusinja. Oleh karenanja masalah² kewarganegaraan itu
tidak mungkin diselesaikan setjara „entre nous” atau „onder
onsjes” oleh orang² dari satu matjam golongan ethnisk, yang ter-
tindas oleh adanya penjelewengan².

Berdasarkan kesadaran itu, maka Baperki didirikan sebagai
organisasi massa, yang tidak terbatas pada golongan ethnisk ter-
tentu keanggotaannya, dan bertudjuan meratakan kesadaran dan
membangkitkan kemauan untuk memperperjuangkan setjara lebih
sungguh² dan konsekwen likwidasi kolonialisme, menentang dan
mentjegah neo-kolonialisme dan mengkoreksi penjelewengan²
dengan mengajak massa luas memperperjuangkan penyelesaian
masalah² kewarganegaraan atas dasar djiwa proklamasi dan
memperperjuangkan hapusnja rasialisme, yang dapat memperluas
pengerahan funds & forces progressif untuk memperlantjar pem-
binaan masjarakat adil dan makmur, yang mengachiri sistim
exploitation de l'homme par l'homme!

Masjarakat Indonesia, yang sedang memperperjuangkan pelaksa-
naan tjita² revolusi 17 Agustus 1945, ternyata menjambut baik
lahirnja Baperki dan hal ini ternyata pada kenyataan, bahwa
Baperki sekarang tersebar diseluruh plosok kepulauan Indonesia.
Djumlah tjabang sekarang ini sudah ada 210 tersebar dari Sabang,
hingga dengan Maumere di Flores. Dipertjaja, bahwa setelah 1
Mei 1963 nanti, di Irian Barat tentu akan berdiri djuga tjabang²
Baperki, berdasarkan kenyataan adanya surat² masuk dari Irian-
Barat, yang memerlukan bantuan Baperki untuk menjelesaikan
soal² kewarganegaraannya.

Perkembangan Baperki pun membuktikan, bahwa Baperki dapat
menghimpun warganegara² Indonesia dari berbagai matjam go-
longan ethnisk, berbagai matjam golongan agama dan berbagai
matjam aliran politik. Didalam tubuh organisasi Baperki terdapat
kerdja-sama warganegara² Indonesia keturunan Tionghoa, ketu-
runan Arab, keturunan India, keturunan Eropa dan mereka yang
dinamakan „asli”, disamping ada orang² beragama Kristen, Islam
Hindu, Sam Kauw, Confucianis dan yang tidak memeluk agama
tertentu. Kita pun dapat menjaksikan sekarang bahwa tubuh orga-
nisasi Baperki merupakan perwujudan kegotong-rojongan na-
sional-revolusioner Nasakom. Oleh karenanja maka Baperki
sebagai organisasi turut mendukung arus dan gelombang gerakan
Rakjat yang memperperjuangkan terwujudnja kekuasaan Gotong-
Rojong nasional-revolusioner berporoskan Nasakom! Sembojan:
Setudju Pantja Sila, setudju Nasakom oleh Baperki diartikan:
Harus memperperjuangkan pelaksanaan kekuasaan Gotong-Rojong
berporoskan Nasakom!

Dengan memperhatikan dasar pikiran, yang menjebabkan Ba-
perki didirikan, maka orang tentunya lebih mudah mengerti, apa-
kah sebab Baperki selama ini mengikuti perkembangan perjuang-
an Rakjat mentjapai tudjuan revolusinja dengan irama dinamika
yang ditentukan oleh Pemimpin Besar Revolusi Indonesia, Bung
Karno, jaitu antara lain seperti ternyata pada:

1. Baperki dengan tegas ikut mendukung Konsepsi Presiden
tentang Kabinet Gotong-Rojong untuk mentjapai stabilisasi
politik dalam negeri.

2. Baperki dengan tegas mendukung usul pemerintah dalam
Konstituante untuk kembali ke UUD 1945.

3. Baperki dengan tegas mendukung Dekrit Presiden 5 Djuli
1959 untuk mengesahkan kembali berlakunja UUD 1945.

4. Baperki dengan tegas mendukung Manipol dan berusaha
aktif memperperjuangkan pelaksanaan Manipol-USDEK.

5. Baperki dengan tegas menjiapkan organisasinya untuk lebih
aktif membantu pengerahan funds & forces progressif, terutama
mengandjurkan mengalihkan modal², yang berputar dibidang
perdagangan, termasuk perdagangan spekulasi dibidang industri
ringan, yang menurut Ketetapan MPRS terbuka bagi usaha²
swasta nasional dan domestic. Untuk ini dilakukan sebagai follow
up ajunan tjangkul pertama oleh PJM Presiden pada tanggal 1
Djanuari 1961.

6. Baperki dengan tegas mendukung dan ikut memperperjuangkan
pelaksanaan Trikora dalam perjuangan mengembalikan
Irian-Barat kedalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia.
Banjak massa pendukung Baperki telah mendaftarkan diri sebagai
sukarelawan, malahan ada djuga yang memperoleh tugas digaris

depan. Mahasiswa pada Universitas Baperki en bloc mendaftarkan diri sebagai sukarelawan dan sekarang didalam resimen Ma-ha Djaja terdapat 200 orang mahasiswa Baperki.

Demikianlah sedikit gambaran, yang membuktikan, bahwa Baperki sebagai organisasi massa nasional sanggup mengikuti irama dinamika revolusi yang ditentukan oleh Pemimpin Besar Revolusi Indonesia. Selekasnja ketentuan keanggotaan Front Nasional diumumkan, Baperki praktis termasuk salah satu organisasi massa pertama, yang mendaftarkan diri sebagai anggota Front Nasional dan berusaha untuk menjadi anggota Front Nasional yang aktif. Usaha ini dilakukan dengan mengirimkan kader² sebanyak mungkin untuk mengikuti coaching indoktrinasi Front Nasional. Hanya sangat sajang sekali jumlah dibatasi lebih ketjil dari jumlah kader yang bersedia mengikutinja. Bahkan di beberapa daerah, karena tidak ada aktivis Baperki didalam Pengurus Daerah Front Nasional, Baperki setempat seringkali tidak diadjak serta. Kesulitan matjam ini tidak dapat merintangki kegiatan² Baperki untuk lebih aktif memperperjuangkan pelaksanaan Program² Front Nasional, terutama Pantja Program Front Nasional yang paling akhir ini.

Bung Karno yang tertjinta, hadirin yang mulia

Perkembangan perjuangan mewujudkan tjita² revolusi kita sesuai dengan irama dinamika revolusi yang ditentukan oleh Pemimpin Besar Revolusi Indonesia, ternyata memerlukan penjempurnaan dan ketegasan anggaran dasar Baperki.

Setelah Kongres Baperki di Djakarta pada akhir tahun 1959 memutuskan, menjetudjui, mendukung dan ikut aktif memperperjuangkan pelaksanaan Manifesto Politik R.I. seperti isi amanat tahunan Presiden Soekarno, maka Kongres telah memutuskan untuk menjempurnakan dan mempertegas ketentuan tudjuan Baperki sebagai organisasi massa.

Putusan ini, menjebabkan perobahan Anggaran Dasar Baperki, sehingga pasal 3-nja berbunyi sebagai berikut :

„Organisasi ini menerima dan mempertahankan Pantja Sila sebagai asas-dasar Negara dan aktif memperperjuangkan pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia serta mempunyai tudjuan sebagai berikut :

1. Memperperjuangkan pelaksanaan tjita² nasional, jaitu untuk menjadikan tiap warganegara seorang warganegara Republik Indonesia sedjati pembela Pantja Sila sebagai asas-dasar Negara dan peserta aktif revolusi Indonesia.

2. Memperperjuangkan pelaksanaan asas² demokrasi dan hak¹ azasi manusia setjara menguntungkan pelaksanaan Amanat Penderitaan Rakjat.

3. Memperperjuangkan terwujudnja persamaan hak dan kewajiban serta kesempatan untuk maju bagi tiap warganegara dengan tidak memandang golongan ethniknya, kebudayaan, adat-kebiasaannya maupun agamanya sebagai djaminan bagi pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia 1959”.

Dengan dipertegas dan disempurnakannya rumusan pasal 3 Anggaran Dasar Baperki ini, menjadi lenjaplah berbagai matjam kekaburan pengertian tentang tudjuan Baperki.

Ajat 1 dirumuskan untuk melenjapkan kekaburan pengertian warganegara Indonesia sedjati dikalangan massa Baperki. Bagi Baperki warganegara Indonesia sedjati adalah warganegara yang membela Pantja Sila sebagai asas-dasar Negara dan yang menjadi peserta aktif revolusi Indonesia, dalam arti sanggup melandjutkan perjuangan untuk mentjapai tudjuan revolusi, jaitu membangun masyarakat adil dan makmur, masyarakat sosialis, yang mengachiri sistim exploitation de l'homme par l'homme.

Perjuangan ini adalah satu perjuangan yang makan waktu karena kita sekarang masih perlu menyelesaikan tahap revolusi nasional-demokratis dan menyusun ekonomi nasional-demokratis, yang bebas dari ketergantungan pada World Market, yang dikuasai oleh The Old Established Forces, dan bebas dari segala matjam keterbelakangan feodalisme. Perjuangan ini membutuhkan keuletan dan kesadaran akan dua matjam tahap revolusi dengan 2 matjam tudjuan, seperti ditegaskan didalam Djarek. Perjuangan ini memerlukan konsentrasi segala kekuatan nasional revolusioner dan pemusatan perhatian yang tekun. Kesadaran ini menjebabkan Baperki turut memperperjuangkan supaya Front Nasional dapat menjadi alat pemersatu seluruh kekuatan nasional-revolusioner yang tahan udji dengan kesadaran akan dua matjam tahap revolusi dengan dua matjam tudjuan, sehingga dapat ditjegah penjelewengan ke-kanan dan penjelewengan kekiri !

Ajat 2 mempertegas arah Baperki memperperjuangkan pelaksanaan asas² demokrasi dan hak² azasi manusia. Ketegasan arah ini terasa perlu sekali untuk melenjapkan kekaburan tentang pengertian demokrasi dan hak² azasi manusia, Bentuk liberalisme sudah dikubur di Indonesia dan kita sedang melaksanakan demokrasi terpimpin untuk menjempurnakan pelaksanaan asas² demokrasi. Baperki telah ikut berusaha, supaya ketegasan² Presiden tentang arti demokrasi terpimpin menjadi milik umum. Terutama ketegasan² didalam RESOPIM, yang mempertegas, bahwa „Demokrasi Terpimpin tidak mentjari, menghasilkan kemenangan sesuatu golongan atau kekalahan sesuatu golongan, ia hanya akumulasi maksimal daripada fikiran² baik, tjara² baik, kemandjuan² positif untuk Rakjat setjara keseluruhan, tidak untuk sesuatu golongan atau partai. Demokrasi Terpimpin loro-loroning-tunggal, berarti

ada demokrasinja dan ada terpimpinnya, ada terpimpinnya dan ada demokrasinja, oleh karena ia adalah demokrasi pelaksana daripada Amanat Penderitaan Rakyat. Djika tidak, dia akan kehilangan dasar, kehilangan tujuan. Demokrasi Terpimpin karena itu, harus pula ditunjukkan untuk melindungi dan menambah hak bagi si Rakyat, si Djelata, si Marhaen, si Tani, si Proletar. Bersamaan dengan itu, dia harus ditunjukkan pula untuk mengurangi atau menghapuskan hak² yang berlebih-lebihan daripada kaki-tangan-kaki-tangan imperialis dan kaum kontra-revolusioner, kaum anti-progresif dan kaum penghisap Rakyat!" (RESOPIM hal. 36-37).

Pun patut kita sadari bersama untuk melenjapkan kekaburan, bahwa didalam pelantikan Panitia Penjusun RUU Pemilihan Umum, pada tanggal 2 Djuli 1962, Presiden Soekarno antara lain menegaskan : kita harus meninggalkan apa yang dinamakan parlementaire democratie ala Barat dan kita ganti dengan demokrasi Rakyat yang sedjati, demokrasi terpimpin yang sedjati. Sebab hanya dengan demokrasi Rakyat yang sedjati, dengan demokrasi yang terpimpin oleh Rakyat dan untuk Rakyat, maka masyarakat sosialis, yang menjadi tujuan utama dari revolusi kita ini, bisa tertjapai."

Disamping ini patut juga diperhatikan kenyataan, bahwa dalam amanatnya pada Musjawarah Front Nasional pada tanggal 13 Februari 1963, Presiden Soekarno telah mempertegas : "Negara kita bukanlah suatu negara diktatur, bukan suatu negara fasis. Bukan negara autokratis, tetapi suatu negara yang menjalankan segenap tugasnya atas landasan demokrasi terpimpin. Atau djikalau dikatakan dengan istilah negara sosialis "Democratisme Centralisme" atau dengan istilah saja pakai didalam tahun 1929 "Centralistische Democratie". Djikalau memakai istilah daripada kalangan agama, maka berulang-ulang saja katakan, bahwa demokrasi yang dikehendaki misalnja oleh agama Islam adalah juga suatu demokrasi dengan pimpinan."

Ketegasan² itu sangat perlu ditondjol-tondjolkan untuk melenjapkan kekaburan pengertian tentang demokrasi terpimpin yang kita djalankan sekarang ini dan memperjuangkan untuk dilaksanakan setjara lebih sempurna.

Bagi massa Baperki dan bagi Baperki adanya pengertian yang tegas tentang demokrasi terpimpin dan arahnya yang dituju dalam memperjuangkan asas² demokrasi dan hak² azasi manusia memang sangat penting artinya, karena dalam mempelajari pengalaman penyelesaian masalah² minoritas di-negeri² lain, terutama di-negeri² Eropa Timur, diperoleh pelajaran, bahwa pelaksanaan demokrasi komplit, yang menghapuskan segala matjam rasa keta-

kutan dikalangan golongan² etnik minoritas adalah salah satu syarat yang terpenting.

Stalin umpamanya didalam bukunya "Marxism and the National Question" menyatakan : "Give the country complete democracy and all grounds for fear will vanish!" dan dibagian lain ia mempertegas : "Consequently, a state law based on complete democratization of the country is required, prohibiting all national privileges without exception an every kind of disability or restriction on the rights of national minorities. That, and that alone, is the real, no a paper guarantee of the rights of a minority!"

Pernyataan² ini mempertegas penting artinya pelaksanaan asas² demokrasi bagi penyelesaian masalah minoritas. Pelaksanaan asas² demokrasi didalam demokrasi terpimpin yang diarahkan ke mendjamin pelaksanaan Amanat Penderitaan Rakyat pasti melenjapkan segala matjam rasa ketakutan, hingga hapuslah masalah² minoritas. Pengalaman itu pun membuktikan, bahwa masalah minoritas tak dapat diselesaikan setjara "an sich".

Dalam hubungan menjempurnakan pelaksanaan asas² demokrasi dalam rangka melaksanakan demokrasi terpimpin ini, Baperki menjambut dengan gembira perintah Paduka Jang Mulia Presiden untuk mangachiri pangekangan² demokrasi, karena akibat pernyataan keadaan darurat perang, sebelum tanggal 1 Mei jad. Djabatnja keadaan darurat perang atau SOB ini dipertjaja akan memberi kebebasan pada Rakyat kita untuk bertjantjut-taliwondo menggugurkan stelsel kapitalisme dan imperialisme. Rakyat akan bisa kiprah untuk menghandjut imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, rasialisme hingga proses menuju ke pelaksanaan Amanat Penderitaan Rakyat diperlantjar

Ajat 3 dari pasal 3 Anggaran Dasar Baperki seperti dikemukakan diatas mempertegas, bahwa perdjjuangan mentjapai pelaksanaan persamaan hak² dan kewadajiban² antara warganegara Indonesia, djadi perdjjuangan dilaksanakannya ketentuan² pasal 27, 30 dan 31 UUD 1945 bukan bertudjuan untuk mendjamin keuntungan bagi suatu golongan warganegara tertentu, melainkan satu perdjjuangan untuk mendahulukan kepentingan nasional diatas kepentingan golongan yang manapun juga, karena memperjuangkan mentjapai pengerahan funds & forces progressif sampai tingkat paling maksimum dalam rangka memperjuangkan pelaksanaan Manipol-Usdek.

Bung Karno yang tertjinta dan hadirin yang mulia!

Seperti dikemukakan diatas tadi, mendjelang Ajunan Tjangkul Pertama pada tanggal 1 Djanuari 1961 sebagai tanda permulaan pelaksanaan pembangunan nasional semesta berentjana berdasarkan Ketetapan MPR-S No. II/1960, Baperki telah berusaha ikut aktif dalam pengerahan funds and forces progressif, seperti di-

tugaskan oleh Manipol, dengan memperjuangkan pelaksanaan Tri-Program Baperki, yaitu :

1. Memperjuangkan penyelesaian soal² kewarganegaraan setjara memperbesar potensi nasional dan menguntungkan pelaksanaan tiga kerangka revolusi Indonesia seperti ditentukan dalam Manipol.

2. Mengembangkan kegiatan² dibidang ekonomi, untuk mempertinggi daya-produksi nasional, yang sanggup mengatasi inflasi. Perhatian khusus diberikan pada kemungkinan membangun dan mengembangkan koperasi² produksi dan pembangunan industri ringan untuk dapat membikin produktif modal yang tersedia didalam negeri dan mengurangi napsu spekulasi.

3. Memperbanyak tenaga² ahli berdjawa Manipolis, yang sanggup membangun masyarakat sosialis Indonesia !

Pasal 3 dari Program diatas itu tadi adalah rumusan kegiatan² Baperki dibidang pendidikan dasar dan perguruan tinggi, yaitu supaya jelas, bahwa kita mengusahakan sekolah² dan perguruan tinggi bukan sekedar untuk dapat memungkinkan para pemuda bersekolah, beladjar ilmu, melainkan bersekolah dan beladjar ilmu untuk dapat mengabdikan diri setjara lebih baik, setjara lebih berguna pada kepentingan Rakjat dan Tanah-Airnya, Indonesia. Oleh karenanya Baperki berpendapat, bahwa kita harus berusaha mentjapai tenaga² tukang, tenaga² ahli, yang berdjawa Manipolis sedjati, yang sanggup melaksanakan perjuangan dengan tahan udji membangun masyarakat sosialis Indonesia, yang mengachiri sistim penindasan atas manusia oleh manusia. Untuk keperluan ini perhatian harus lebih banjak ditjurahkan pada pendidikan kedjuruan, pendidikan tehnik.

Berdasarkan pendirian ini, maka Baperki telah ikut serta setjara aktif dalam tiap usaha untuk me-Manipol-kan pendidikan dasar dan perguruan tinggi. Usaha² ini mentjatat hasil² yang memperbesar harapan untuk perkembangan kemudian.

Usaha Baperki dibidang pendidikan ini memang menimbulkan beban yang berat, karena dalam melaksanakan kegiatan ini Baperki berusaha melaksanakan setjara konsekwen pendapatnya bahwa ilmu bukanlah barang dagangan dan tidak mungkin kita sesuaikan uang sekolah dan uang kuliah dengan inflasi yang sedang dihadapinya sekarang ini.

Tetapi meningkatkan kesadaran politik dan meningkatnya rasa tanggung djawab terhadap Tanah-Air Indonesia, yang perlu menjusul keterbelakangan akibat kolonialisme dibidang tenaga² ahli untuk pembangunan masyarakat yang adil dan makmur, telah memungkinkan berhasilnya gerakan gotong-rojong diantara massa pendukung Baperki, sehingga kebutuhan dana untuk pembangunan gedung² sekolah, laboratoria, klinik² dan bengkel² serta me-

nutup deficit anggaran belandja pendidikan dan perguruan tinggi hingga sekarang dapat dipenuhi.

Sekedar untuk menggambarkan luasnya perkembangan kegiatan Baperki dibidang pendidikan ini, dapat dikemukakan angka² di Djakarta Raya sebagai tjontoh. Dibidang pendidikan dasar, Baperki Djakarta-Raya menjelenggarakan 14 buah Sekolah Rakjat, 7 buah SMP dan 3 buah SMA dengan murid didik 17.000 orang dan tenaga guru 700 orang.

Usaha Baperki dibidang perguruan tinggi mentjatat adanya 6 buah Fakultas, yaitu Fakultas Tehnik dengan 4 bahagian (mesin, listrik, civiel dan farmacie), Kedokteran Gigi, Kedokteran, Hukum, Ekonomi dan Sastra. Djumlah mahasiswa seluruhnya ada 2650 orang di Djakarta-Raya dan 450 orang di tjabang Surabaya. Separuh dari djumlah mahasiswa itu adalah mahasiswa Fakultas Tehnik. Universitas Baperki sekarang diasuh dibawah pimpinan Saudara Njonja Utami Suryadarma sebagai Rektor dengan dibantu oleh Saudara Ir. Suharjo sebagai sekretarisnya dan Ir. Pudjono Hardjoprakoso, sebagai dekan Fakultas Teknik, dr. Be Wie Tjoen sebagai dekan Fakultas Kedokteran Gigi, dr. Goedadi Wreksoatmodjo sebagai dekan fakultas kedokteran, Prof. Lie Oen Hock SH sebagai dekan fakultas hukum, prof. dr. E. Utrecht SH sebagai dekan fakultas ekonomi dan Prof. dr. Tjan Tjoe Siem sebagai dekan Fakultas Sastra. Penjelenggaraan Universitas Baperki tjabang Surabaya dilaksanakan dibawah pengawsan Prof. A.G. Pringgodigdo SH dibantu oleh saudara Wijanto SH. Perkembangan Universitas Baperki ini telah memenuhi segala sjarat yang ditentukan oleh Undang² Perguruan Tinggi untuk disamakan dan kami mengharap pelaksanaan persamaan dengan Universitas² negeri dapat dilaksanakan dalam waktu tidak lama lagi !

Pelaksanaan pasal 1 dan 2 ternyata tidak selantjar pelaksanaan pasal 3, karena faktor² diluar kemampuan Baperki untuk mengatasi sendiri. Faktor² yang tidak memperlantjar pelaksanaannya antara lain adalah :

1. Iklim baik, yang diandjurkan didalam Manipol untuk di-tjiptakan buat mendjamin berhasilnya pengerahan funds & forces progressif guna memperbesar daya produksi nasional, ternyata belum berhasil ditjiptakan oleh pemerintah. Untuk mentjiptakan iklim baik itu guna mendjamin pengerahan funds & forces sampai pada tingkat paling maximum, terasa perlu sekali diusahakan adanya politik harga barang dan politik upah, yang dapat menyelesaikan dengan tepat kontradiksi² ekonomi desa dan ekonomi kota. kontradiksi² antara golongan² Rakjat sendiri setjara menguntungkan usaha memperhebat kegairahan berproduksi, pertama-tama di-cudjukan untuk memperlipat-gandakan produksi pertanian/perke-

bunan sebagai basis yang dapat menguntungkan pembangunan industri sebagai tulang punggung ekonomi nasional kita.

2. Banjak matjam undang² kolonial, yang bertentangan dengan Manipol masih berlaku terus, disamping masih ada berbagai peraturan djaman sebelum Manipol, yang merintangi pelaksanaan Manipol setjara konsekwen. Dalam hubungan ini dapat dikemukakan kenjataan hanteering daripada „bedrijfsreglementeering” untuk menentukan sjarat apa yang dinamakan participatie sukarela wadjab dengan orang² yang dinamakan asli, sehingga membikin matjet pelaksanaan ketentuan Ketetapan MPR-S No. II/1960, lampiran A, yang mempertegas kemungkinan modal swasta nasional dan domestic berkembang dibidang industri ringan besar dan ketjil.

3. Inflasi belum dapat dikendalikan dan karena gadji pegawai negeri ketinggalan djauh dengan inflation rate yang terus meningkat, maka mereka terpaksa oleh keadaan untuk berusaha memperoleh penghasilan² „extra” dan yang kadang² meluntjur ke pemupukan kapitalisme birokrasi.

4. Kebidjaksanaan yang ditudjukan untuk contractie uang dengan membandir masuknja barang² mewah, seperti mobil mewah, alat pendingin dll-nja, sekalipun dalam batas tertentu memang mempertinggi pemasukan uang dalam kas negara, tetapi ternjata membawa pengaruh negatif dengan timbulnja napsu hidup mewah, yang mengakibatkan korupsi dan meluasnja perdagangan spekulasi.

5. Masih adanja pandangan² rasialis dikalangan pelaksanaan² dipusat dan daerah, yang merintangi pengerahan dan penggunaan tenaga, skill, know how serta modal yang tersedia setjara paling tepat, efficient, efektif dan produktif, disamping adanja kebingungan², karena kekuasaan politik belum disesuaikan dengan dasar ekonomi yang hendak dibangun.

Berhubung dengan kesulitan² yang dihadapinja dalam perdjungan melaksanakan program kerdjanja pasal 1 dan 2 seperti diterangkan diatas itu, maka pengumuman Pantja Program Front Nasional menimbulkan napas lega dan harapan² baru dikalangan massa Baperki bagi berhasilnja pelaksanaan program kerdja Baperki dalam rangka ikut aktif memperperdjungkan pelaksanaan Pantja Pogram Front Nasional itu.

Menurut rentjana Kongres Baperki hendak memperbulat tekad untuk mengerahkan seluruh kemampuan organisasinja guna ikut aktif memperperdjungkan pelaksanaan Pantja Program Front Nasional setjara sungguh², karena Baperki yakin, bahwa dengan kerdja keras membanting tulang melaksanakan Pantja Program itu berdasarkan keterangan dan ketentuan² pokoknja, kita akan dapat mendjamin lantjarnja proses pembangunan ekonomi nasional-de-

mokratis, yang tentu memungkinkan meningkatnja revolusi memasuki tahap ber-sosialisme-Indonesia dengan kondisi² ekonomis yang menguntungkan pembangunan masjarakat adil dan makmur, bersih dari penindasan atas manusia oleh manusia, yang mendjadi tudjuan revolusi kita sekarang ini.

Dalam hubungan dengan ini baik sekali dikemukakan, bahwa pengarang Amerika Margaret Mead dalam bukunya „Patterns of Culture and Technical Change” menggambarkan, bahwa perobahan tehnik dalam tjara produksi di Afrika telah mengakibatkan perobahan² culture diantara bangsa² Afrika itu, yang tadinja kebanyakan masih berkebudajaan pra-kapitalistis. Perobahan itu menudju kebudajaan industri modern. Djadi dengan pelaksanaan Pantja Program yang mengubah dan menjempurnakan tehnik tjara produksi di negeri kita, akan terdjadi djuga perkembangan satu kebudajaan nasional-demokratis, yang mengachiri banjak perbedaan tadjam.

Baperki menerima dan turut aktif memperperdjungkan pelaksanaan Pantja Program, karena pelaksanaannja mentjakup djuga tjita² Baperki dan mendjamin penyelesaian soal² kewarganegaraan senafas dengan djiwa proklamasi 17 Agustus 1945, yang ternjata mendjadi pendapat djuga dari Bung Karno kita.

Disamping itu massa pendukung Baperki telah menjadari, bahwa perdjungan melaksanakan Pantja Program Front Nasional dengan sungguh² dan konsekwen akan makan waktu dan memerlukan pengerahan seluruh kemampuan serta kekuatan nasional-revolusioner, disamping memerlukan konsentrasi dari segala perhatian kita terhadap pelaksanaannja.

Mengingat hal ini, maka terasa ada lebih menguntungkan, apabila kita tidak menimbulkan persoalan², yang tidak langsung bersangkut paut dengan pelaksanaan Pantja Program, tetapi dapat memetjah-belahkan perhatian dan usaha. Umpamanja persoalan „ganti nama”, „kawin tjampuran”, „ganti agama”, yang djuga dikemukakan oleh sementara orang sebagai apa yang dinamakan „assimilasi total”. Karena soal memilih nama, soal memilih djodo, soal agama dll-nja adalah persoalan pribadi seseorang, maka berdasarkan mendjundjung tinggi hak² azasi manusia merupakan persoalan yang tidak dapat dan tidak boleh dipaksakan.

Berdasarkan pengertian, bahwa para pengandjurnja tentunja didorong oleh tjita² luhur untuk kepentingan Rakjat dan Tanah-Air Indonesia, dan tentunja setudju Pantja Sila, setudju Nasakom, bebas dari komunisto phobi, kiri-phobi dan Rakjat-phobi serta tentunja setudju dengan Pantja Program Front Nasional, maka untuk mendjamin kelantjaran pelaksanaan Pantja Program Front Nasional yang penting artinja untuk merombak struktur masjarakat kolonial mendjadi masjarakat nasional-demokratis, yang mentjip-

takan kondisi-kondisi menguntungkan bagi meningkatnja revolusi memasuki tahap ber-sosialisme-Indonesia nanti, maka kami dari Baperki mengadjar mereka untuk tidak memboroskan waktu dan uang bagi usaha², jang dikuatirkan dapat memetjah-belah konsentrasi perhatian terhadap pelaksanaan Pantja Program dan berkerdja-sama, kalau perlu berkompetisi dengan Baperki dalam usaha pengerahan funds & forces progressif guna mendjamin lantjarnja pelaksanaan Pantja Program Front Nasional.

Baperki yakin, bahwa bagi tiap orang revolusioner Indonesia dalam tingkat perdjuaan sekarang ini, jang digunakan sebagai ukuran untuk menilai seorang warganegara tentu bukanlah apakah ia sudah di-assimilasi 100%, 80%, 50%, 25% atau 0%, jang sangat sulit ditentukan ukurannja. Tetapi jang mendjadi ukuran tentu sadja, apakah dari kata² jang satu dengan perbuatan²nja warganegara itu betul² Manipolis sedjati, atau Manipolis lip-service belaka atau anti Manipolis dan contra revolusioner!

Oleh karena itu, marilah kita mengompakkan barisan kaum Manipolis dan mewudjudkan kekuasaan Gotong-Rojong berporoskan Nasakom, jang mendjamin pelaksanaan Pantja Program Front Nasional untuk mendjamin kemudian pelaksanaan Manipol seluruhnja dan dengan demikian memperdjuaan djuga hapusnja rasialisme!

Hidup Bung Karno, Pemimpin Besar Revolusi Indonesia!
Hidup Pantja Program Front Nasional!
Hidup Manipol!
Lawan lebih gigih Rasialisme!

Djakarta, 14 Maret 1963.

Pidato J.M. Njonja Hartini Sukarno

*Pada kesempatan pertemuan dengan
anggota² pengurus BAPERKI di-Istana
Bogor pada 26 Maret 1963.*

Saudara²,
Hadirin jang terhormat,

Terlebih dahulu kami mengutjapkan terima kasih atas pertemu-
an ini dan kami merasa gembira sudah menemui kesempatan,
untuk berhadapan muka dengan saudara² anggota² serta pimpinan
Baperki.

Disamping itu pertemuan ini memberi kesempatan baik untuk
kami, untuk mengutjapkan selamat atas sukses besar, jang telah
dihasilkan oleh Kongres ke-8 jang telah diadakan beberapa
minggu jang lalu ini.

Maka djika kami akan mengutjapkan satu dua patah kata di-
sini, kata² itu diharapkan akan dapat memberi sekedat isi kepada
utjapan selamat kami itu dan rasa gembira kami atas pertemuan
ini.

Baperki sebagai gerakan masjarakat sudah beranggaran dasar,
jang berlandasan pada pembelaan Pantja Sila, dukungan Mani-
festo Politik dan pelaksanaan Amanat Penderitaan Rakjat. De-
ngan djiwa dan semangat perdjuaan Indonesia Baru itu, maka
sudah njata bahwa Baperki merupakan bagian integral barisan
New Emerging Forces Indonesia, dalam perdjuaan menudju pem-
angunan masjarakat jang adil dan makmur.

Perdjuaan itu tak akan merupakan perdjuaan jang mudah.
Akan tetapi rakjat dan negeri kita, mempunyai kekuatan² pokok,
jang dapat dikerahkan mendjadi daja-upaja bulat jang dapat meng-
gulingkan rintangan².

Dalam pada itu teringat dan sadar kita, bahwa zaman ke-ragu²-
an sudah lampau, dan bahwa kita, rakjat Indonesia, sudah meru-
pakan satu rakjat jang berdasarkan ideologi jang kuat, bertudju-
an jang tentu, melewati djalan² jang njata, serta terang untuk kita
semua.

Disamping itu kita sudah ada Pemimpin Besar kita.

Saudara² jang terhormat,

Djika kita renungkan proses tertjipta, seorang pemimpin besar

maka sadar kita bahwa seorang pemimpin besar adalah ditijpta oleh masa dan djaman.

Tiap² masa dan djaman mengudji rakjat, dan dari kalangan rakjat itu tertijpta seorang pemimpin besar, jang dapat memimpin rakjat untuk mengatasi tantangan zaman dan mengadjak rakjat mendarah-dagingkan panggilan masa, dalam perdjuaan seterusnya. Kita sebagai rakjat Indonesia, sudah mengalami proses udjian masa, dan djaman itu dengan seluruhnja, hingga, apa jang dinamakan proses „perasan” rakjat kita oleh masa dalam amanat Presiden Soekarno di Kongres ke-8 Baperki, telah mentijptir Pemimpin Besar kita.

Kami merasa gembira bahwa pada Kongres ke-8 jang diselenggarakan Baperki, Pemimpin Besar kita sudah dapat memberi Amanat jang mengandung pedoman², jang telah menemui djalan ke-hati² saudara², hingga diterimanja oleh saudara² dengan sambutan hangat, dan penghargaan dukungan dalam pernjataan Kongres. Kami telah merasa terharu, membatja pernjataan kongres oleh karena pernjataan itu tak hanja merupakan suatu pernjataan aspirasi² sadja, akan tetapi disamping itu pernjataan saudara² merasakan kepada pembatja denjut hati, dan denjut nadi saudara².

Presiden Sukarno berulang-ulang mengatakam kepada kita, bahwa revolusi Indonesia adalah merupakan suatu „many-sided revolution”. Revolusi Indonesia memang mengibaratkan suatu MOZAIK. Suatu mozaik jang indah, jang sedang ditijpta oleh seluruh rakjat Indonesia dengan serentak.

Itijita² perdjuaan Baperki ikut mendjadi bagian penting, dalam mozaik jang kita sedang menggotong-rojongkan itu.

Gotong-rojong adalah tjara bekerdja, dan berdjoang jang sangat baik, oleh karena gotong-rojong berdjawa „individual-collectivism”, dimana kemadjuan keseluruhan membawa djuga kemadjuan dalam kedudukan, serta keadaan tiap² peserta, dimana seorang individu hanja dapat madju, djika seluruh dan semua kawan²-nja ikut madju, dimana tiap² individu dapat mengusahakan kepentingan²-nja bersama dengan semua kawan²-nja, dan dimana dengan demikian itu daja-tahan, daja-gerak dan tenaga keseluruhan kawan²-nja dengan sendiri mendjadi kekuatan individu itu.

Saudara²

Ada pepatah, jang mengatakan bahwa „kekuatan suatu rantai adalah tergantung, pada anak rantainya jang terlemah”. Maka ikutlah memperkuat rantai barisan kita, dan kekuatan itu akan memperkuat saudara², dan kobarkanlah semangat Baperki hingga barisan kita semua ikut bertambah kuat.

Maka dengan kejakinan dan djiwa, satu indentiteit dan satu tudjuan itu kami pertjaja teguh bahwa usaha kita bersama termasuk usaha² Baperki akan berhasil.

Maka dari itu kami mengutjapkan selamat berdjuang kepada Saudara², moga² perdjuaan saudara dilindungi Jang Maha Esa.

Terima kasih.

PERNJATAAN

Kongres Nasional Baperki ke-VIII, yang berlangsung dari tanggal 14 hingga 17 Maret 1963 di Djakarta, setelah :

- a. Mempelajari :
 1. Amanat P.J.M. Presiden Soekarno pada resepsi pembukaan Kongres Nasional ke-VIII Baperki ;
 2. Sambutan J.M. Wampa Bidang Khusus/ Menteri Penerangan Roeslan Abdulgani ;
 3. Prasaran J.M. Menteri/Sekdjen Front Nasional Sudibjo ;
 4. Laporan Ketua Umum Baperki Pusat ;
- b. Menimbang : bahwa Baperki sebagai organisasi massa yang telah tersebar dari Sabang sampai Merauke di Flores dengan mentjatat 210 tjabang, tetap merupakan alat berguna untuk mentjapai terorganisasinja pemersatuan kekuatan² nasional revolusioner ;
- .. Mengingat : Ketentuan² pasal 3 Anggaran Dasar Baperki yang berbunyi : „Organisasi ini menerima dan mempertahankan Pantja Sila sebagai asas dasar negara dan aktif memperdjuangkan pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia 1959 serta mempunyai tujuan sebagai berikut :
 - a. Memperdjuangkan pelaksanaan tjita² nasional, jaitu untuk mendjamin tiap warganegara seorang warganegara Republik Indonesia yang sedjati, **pembela Pantja Sila sebagai asas-dasar Negara** dan peserta aktif revolusi Indonesia ;
 - b. Memperdjuangkan pelaksanaan asas² demokrasi dan hak² azasi manusia setjara menguntungkan pelaksanaan **Amanat Penderitaan Rakjat** ;
 - c. Memperdjuangkan terwujudnja persamaan hak dan kewadajiban serta kesempatan untuk madju bagi tiap warganegara dengan tidak memandang golongan ethniknya, kebudajaannya, adat kebiasaannya, maupun agamanya **sebagai djaminan bagi pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia 1959** ;

Memutuskan :

A. AMANAT P.J.M. PRESIDEN SOEKARNO :

1. Menjetudjui dengan suara bulat seluruh isi Amanat PJM Presiden Soekarno dan menentukan untuk mendjadikan Amanat PJM Presiden itu sebagai **landasan pokok perdjuangan Baperki**, sebagai organisasi massa, yang ikut aktif memperdjuangkan tertjapainja tujuan Revolusi 17 Agustus 1945.
 2. Baperki dengan rasa gembira dan penuh tanggung-djawab menjambut rangkulan PJM Presiden Soekarno untuk memperdjuangkan pelaksanaan seluruh isi Amanat Presiden, yang antara lain mengemukakan penegasan² sebagai berikut :
 - a. Bangsa Indonesia **tidak** mengenal golongan minoritas dan mayoritas, karena walaupun masjarakat Indonesia mengenal banjak matjam suku, seperti suku Djawa, Sunda, Minang, Bugis, Kubu, peranakan Tionghoa, Arab, India, Eropa dan lain²nja, dengan djumlah yang berlainan, tetapi suku² itu semua merupakan „**kakikaki**” yang sama deradjatnja dari satu tubuh bangsa Indonesia.
 - b. Bangsa Indonesia berdjuaug mentjapai satu masjarakat yang bersih daripada penindasan atas manusia oleh manusia, hingga **tidak** akan memungkinkan adanya saling tinds-meninds antara golongan minoritas dan mayoritas.
 - c. Perasaan sebagai golongan minoritas dan sebagai golongan mayoritas hendaknya lenjap dari masjarakat Indonesia.
 - d. Politik main „asli-aslian” tidak disetudjui dan ketentuan pasal 6 UUD 1945, bahwa seorang Presiden R.I. adalah seorang warganegara Indonesia „asli teras gandjil dan harus diperdjuangkan penghapusannya.
 - e. Memilih nama, memilih djodoh dan memilih agama adalah soal pribadi, yang tidak perlu dipersoalkan dalam masjarakat Indonesia.
- Mengingat, bahwa Presiden Soekarno kita pandang dan kita akui sebagai **Penjambung Lidah Rakjat dan Rakiat adalah sumber hukum utama**, maka penegasan² PJM Presiden seperti dikemukakan diatas itu harus tertjermin didalam segala ketentuan hukum nasional kita dan kebijaksanaan Pemerintah se-hari².
3. Sesuai dengan andjuran J.M. Menteri/Sekdjen Front Nasional, maka Kongres menugaskan Pengurus Pusat

Harian Baperki untuk menjiarkan setjara luas Amanat PJM Presiden dengan memohon bantuan Departemen Penerangan dan dengan usaha² sendiri setjara khusus.

B. FRONT NASIONAL

1. Menerima dengan suara bulat prasaran J.M. Menteri/ Sekdjen Front Nasional mengenai peng-intensifan ikut sertanja massa Baperki dalam perdjjuangan melaksanakan Pantja Program Front Nasional dan segala keputusan² Front Nasional lainnja dalam rangka mendjadikan Front Nasional alat pemersatu seluruh kekuatan nasional-revolusioner jang lebih efektif lagi guna memperlantjar proses penjelesaian tahap revolusi Nasional-demokratis dengan mentjiptakan kondisi² jang menguntungkan meningkatnja perdjjuangan kedalam tahap bersosialisme Indonesia.
2. Mengerahkan seluruh kemampuan organisasi Baperki dari pusat hingga dengan daerah untuk ikut serta setjara lebih aktif dalam segala kegiatan Front Nasional jang menguntungkan pelaksanaan Pantja Program Front Nasional.
3. Mendukung perdjjuangan dan tuntutan, supaja susunan Pengurus Front Nasional dipusat dan didaerah² semua tingkat disempurnakan guna mendjamin kelantjaran djalannja roda organisasi dan perkembangan Front Nasional sebagai pelaksanaan kegotong-rojongan nasional-revolusioner berporoskan Nasakom setjara efektif dan sungguh².

C. PANTJA PROGRAM

Menjetudjui dengan suara bulat isi laporan Ketua Umum Baperki, jang antara lain mempertegas :

- a. Dengan memperdjjuangkan pelaksanaan Pantja Program Front Nasional berdasarkan keterangan dan ketentuan² pokok seperti telah disahkan oleh sidang bersama Pengurus Daerah Front Nasional, sekaligus diperdjjuangkan djuga pelaksanaan Tri-Program Baperki sendiri, yakni:
 1. Menjelesaikan soal² kewarganegaraan setjara memperbesar potensi nasional dan menguntungkan pelaksanaan tiga kerangka revolusi Indonesia ;
 2. Mengembangkan kegiatan² dibidang ekonomi untuk mempertinggi daja produksi nasional, jang sanggup mengatasi inflasi ;
 3. Memperbanjak Manipolis² sedjati, jang sanggup membangun masjarakat sosialis Indonesia.
- b. Meneruskan perdjjuangan tertjiptanja iklim baik seperti dikehendaki oleh Manipol untuk mendjamin suksesnja

pengerahan funds and forces progressif pada tingkat paling maximum.

Dalam hubungan ini Baperki ikut mendukung perdjjuangan dan tuntutan mentjapai kekuasaan, termasuk Kabinet, Gotong-Rojong berporoskan Nasakom.

- c. Meneruskan perdjjuangan untuk mentjapai social-control jang lebih effectif dalam rangka usaha memperoleh social-support maximal dengan djalan antara lain :

1. Memulihkan dan memperluas hak² demokrasi bagi Rakjat terbanjak didalam rangka menjempurnakan pelaksanaan Demokrasi Terpimpin, hingga Rakjat dapat bertantjut-taliwondo dan kiprah mengganjang musuh² revolusi seperti dikemukakan dalam Manipol, Takem, dan Amanat Presiden pada Pembukaan Sidang Bersama Pengurus Besar Front Nasional dan Pengurus Daerah Front Nasional.

2. Mempertjepat adanja undang² Pemilihan Umum, jang mendjamin pelaksanaan Amanat Presiden tanggal 2 Djuli 1962 jang antara lain menjatakan :

..... kita harus meninggalkan apa jang dinamakan parlementaire demokrasi a la Barat dan kita ganti dengan demokrasi Rakjat jang sedjati, demokrasi terpimpin jang sedjati. Sebab hanja dengan demokrasi Rakjat dengan demokrasi jang dipimpin oleh Rakjat dan untuk Rakjat, maka masjarakat sosialis, jang mendjadi tudjuan utama dari revolusi kita ini, bisa tertjapai".

3. Menertibkan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara dan pengawasan penggunaan uang negara dengan djalan menjempurnakan pelaksanaan hak budget DPR-GR guna mentjapai penggunaan uang negara setjara paling effectif dan efficient serta menguntungkan pelaksanaan pembangunan nasional.
4. Mendemokrasikan Dewan² Perusahaan, sehingga mendjamin pelaksanaan social-control jang effectif dalam rangka mendjalan² management terbuka.
5. Menjegerakan pelaksanaan setjara demokratis terbentuknja daerah otonom tingkat III sebagai pelaksanaan Ketetapan MPPG.

- d. Meneruskan perdjjuangan untuk mentjapai ditjabutnja segala ketentuan Undang²/Peraturan Pemerintah/Instruksi² Menteri/Kepala-Daerah dan Instansi² jang merintang pelaksanaa Manipol setjara konsekwen dan effectif.
- e. Mendukung kebidjaksanaan Presiden untuk menanggu-

langi kesulitan ekonomi berdasarkan kekuatan Rakjat dan kekayaan alam Indonesia.

D. EKONOMI

Dalam bidang ekonomi Baperki senantiasa memperjuangkan berkembangnya ekonomi Nasional dengan memperhatikan terutama usaha² koperasi, disamping mendorong pengalihan modal dagang kebidang industri.

Atas dasar itu Baperki setjara sungguh² telah berusaha men-
sukseskan pengerahan segenap potensinja baik berupa techni-
cal skill, managerial know how maupun modalnja, untuk ikut
aktif melaksanakan Pembangunan Nasional Semesta. Ter-
njata usaha itu telah mengalami matjam² kematjetan, di-
sebabkan terus meningkatnja inflasi yang belum dapat dike-
kendalikan dan praktek asli-aslian serta masih berlakunja
perundang-undangan warisan kolonial dan warisan djaman
sebelum ada Manipol, yang merugikan pelaksanaan Manipol
setjara konsekwen.

Berdasarkan pengalaman tersebut diatas, maka Baperki me-
rasa wadajib mengemukakan beberapa pandangan seperti
berikut :

I. Politik-Ekonomi

Dalam rangka menanggulangi kesulitan² ekonomi Baper-
ki menjadari perlunja retooling dengan tudjuan menje-
suaikan kekuasaan politik dengan susunan ekonomi
yang tentunya tidak bisa berarti lain daripada melaksana-
kan pembentukan kabinet gotong-rojong berporoskan
Nasakom.

Peng-integrasian Pantja Program Front Nasional dalam
Tri-Program Pemerintah akan mendjamin pengerahan
funds and forces yang progressif setjara paling
maksimal.

Ini berarti bahwa pembangunan ekonomi nasional harus
dilaksanakan pada kepertjajaan alam Indonesia, kekuat
an daja-djuang dan optimisme Rakjat.

II. Produksi & Funds and Forces

Untuk memperbesar produksi, hendaknja disamping men-
djalankan setjara sungguh² Pantja Program Front Na-
sional Pemerintah mengambil tindakan² antara lain
sebagai berikut :

- a. Melakukan tindakan² dengan segera dan sungguh¹
kearah stabilisasi keuangan dalam rangka memper-
kuat nilai uang rupiah sesuai dengan Ketetapan²
MPRS, yang sekaligus akan melenjapkan masalah
disparitet harga barang² ekspor.

- b. Menindjau kembali sistem pembelian padi/kopra dan
menetapkan harga pembeliannja yang lebih realistis
dapat memperbesar kegairahan berproduksi karena
ditudjukan untuk mendjamin nilai-tukar yang setjara
terus-menerus memperlipat-gandakan daja-produksi
nasional.
 - c. Dalam rangka membebaskan diri dari „price mecha-
nism” (perkembangan harga) dari World Market
(pasar dunia) yang masih dikuasai oleh „the old
established forces”, Pemerintah harus setjara lebih
sungguh² memperluas hubungan dagang dengan ne-
gara² diluar „World Market” tersebut, disamping
mendjalankan politik harga didalam negeri, yang me-
nguntungkan usaha mempertinggi daja-produksi.
 - d. Mendjalankan politik hubungan ekonomi luar-negeri
yang dapat lebih memperkokoh kedudukan Indonesia
sebagai kekuatan „the new emerging forces” yang
setjara gigih melawan kekuatan imperialisme/kolo-
nialisme, jaitu antara lain dengan djalan senantiasa
berusaha untuk lebih menegakkan hubungan² kerdja-
sama ekonomi dengan semua negara progressif atas
dasar menghormati prinsip² sama derajat (equality)
dan saling menguntungkan (mutual-benefit).
 - e. Untuk melipat-gandakan daja-produksi nasional, ada-
lah mutlak untuk mengutamakan investasi² yang pro-
duktif dengan menangguhkan untuk sementara inves-
tasi² yang bersifat konsumtif.
1. Mentjapai pengerahan funds and forces yang paling me-
nguntungkan Rakjat terbanjak harus ditjptakan iklim
yang baik, dengan djalan :
 - a. melenjapkan dengan segera keadaan tidak normal
dengan mentjabut peraturan S.O.B.
 - b. menetapkan politik harga dan politik upah yang dapat
melipat-gandakan daja-produksi.
 - c. menjelesaikan setjara tepat kontradiksi antara ekono-
mi kota dan ekonomi desa.
 - d. membebaskan Rakjat pekerdja dari hubungan feodal
dan peraturan² warisan kolonial yang ternjata menge-
kang perkembangan daja-produksi dan daja-kreasi
Rakjat.
 2. Mentjabut segera Peraturan²/Undang² warisan kolonial
yang njatanja menghambat perkembangan ekonomi nasio-
nal, antara lain „Bedrijfsreglementerings Ordonantie
1934”, partisipasi sukarela tetapi wadajib W.v.K. (Kitab
Undang² Hukum Dagang).

3. Meniadakan dengan sistematis praktek² asli-aslian, baik yang berbentuk peraturan maupun tidak, yang njata² bertentangan dengan Manipol dan njata² bertentangan dengan Amanat PJM Presiden pada waktu resepsi pembukaan Kongres Nasional ke-VIII Baperki.
4. Menjederhanakan/mempertjepat prosedur memperoleh idjin industri untuk lebih mendorong kegiatan² dibidang usaha² memperbesar produksi (industri ringan/menengah, kerajinan tangan dan lain²) dan menarik modal dagang kebidang industri, yang menurut ketetapan MPRS terbuka bagi swasta nasional dan domestic.
5. Menghentikan impor barang mewah agar lebih banyak devisen dapat disediakan untuk mentjukupi kebutuhan akan bahan baku, spare parts, dan mesin bagi pembangunan dan perluasan industri², dalam rangka membebaskan diri dari ketergantungan ekonomi pada luarnegeri dan keterbelakangan akibat politik kolonialisme.

III. Koperasi

1. Mendemokraskan susunan pengurus koperasi di RT/RK yang sanggup melaksanakan realisasi P.P. 140/1961 tentang penjaluran 9 matjam bahan pokok melalui koperasi setjara tertib dan konsekwen.
2. Dalam rangka mempopulerkan, membimbing serta mengembangkan koperasi² type² USDEK, perlu diambil tindakan² yang tegas oleh Pemerintah terhadap koperasi² a la tengkulak, koperasi² yang bersifat konsentrasi modal serta organisasi² sematjam pool dan lain², yang menghambat perkembangan koperasi dan sangat merugikan produsen.
3. Membentuk Dewan Distribusi dan Dewan Produksi yang disusun setjara demokratis untuk mendjamin penjaluran barang² sandang pangan setjara tjepat dan merata.

IV. PDN²/PT² Negara

1. Dalam rangka memperkuat commanding position dari PDN²/PT² Negara perlu diachiri salah-urus dan salah-duduk dengan melakukan retooling yang menjelurh serta radikal dengan menempatkan tenaga² yang ahli, patriotik dan manipolis untuk mentjapai satunja kata dengan perbuatan, satunja mulut dengan tindakan.
2. Untuk mentjapai social-control dan social-support yang paling efektif perlu dilaksanakan management

terbuka dan membentuk dewan² perusahaan yang demokratis dengan segera.

3. Berdasarkan atas prinsip tidak menswastakan perusahaan² negara, baik seluruhnya maupun sebagian, tidak dapat dibenarkan pengoperan kepada swasta perkebunan-perkebunan modal monopoli asing yang memperoleh djaminan transfer, yang hak konsesinya sudah habis.

V. Organisasi Perusahaan Sedjenis (O.P.S.).

1. O.P.S.² yang ada sekarang ternjata tidak berdjalan dengan semestinya, bahkan mendjadi sumber untuk mentjari redjeki bagi sementara pengurusnya yang sangat menambah beban para anggotanya. Oleh karenanya perlu segera dikeluarkan peraturan Pemerintah yang tegas untuk mengatur pemilihan dewan² pengurus langsung oleh anggota²nja dan yang mengatur pula pertanggung djawab pengurus pada anggotanya dan pada pemerintah.
2. Dengan terbentuknja G.P.S./O.P.S. setjara demokratis, maka untuk menghilangkan dualisme, DPP/MPP tidak perlu dipertahankan lebih lama lagi.

VI. Landreform dan Bagi Hasil

Pengusaha² swasta nasional sangat berkepentingan dengan pelaksanaan landreform dan bagi hasil setjara konsekwen dalam rangka membebaskan dan memperlipat gandakan tenaga produktif rakjat, karena dengan demikian berarti mempertinggi daja beli rakjat yang dilihat dari sudut lain akan berarti djuga suatu djaminan bagi pasar yang luas untuk hasil² industri dalam negeri.

E. MASALAH KEWARGANEGARAAN

- I. Dalam rangka nation-building Indonesia guna melantjar kan proses revolusi mentjapai tudjuannya seperti ditegaskan dalam Manifesto Politik R.I., selama ini Baperki dengan mengerahkan segenap massanja dan mentjurahkan segala kemampuannya telah berhasil memperbesar potensi nasional setjara mempertahankan kewarganegaraan Indonesia dari ratusan ribu massanja dan dengan demikian berhasilnja pula mengintegrasikan mereka dalam tubuh bangsa Indonesia sebagai kesatuan yang kokoh homogeem ; dalam hubungan ini patut dikemukakan penghargaan Baperki yang sebesar-besarnya terhadap bantuan dan pengertian baik dari tidak sedikit

petugas Pemerintah yang banyak meringankan Baperki dalam melaksanakan tugasnya.

Walaupun demikian, pelaksanaan perdjandjian penyelesaian dwi-kewarganegaraan RI-RRT dalam praktek masih mengalami beberapa keseretan² yang berwujud antara lain :

- a. Penambahan sjarat² untuk opsi kewarganegaraan R.I. oleh sementara petugas, yang sesungguhnya tidak di-
haruskan oleh hukum, seperti misalnja : pemilikan
akta kelahiran dari Tjatan Sipil.
 - b. Belum adanya kepastian bagi mereka yang berdasar-
kan P.P. no. 5/1961 sesungguhnya harus dipulihkan
kewarganegaraan R.I.-nja, asal mereka belum pernah
berada diluar negeri melebihi masa djangka waktu
yang diidjinkan oleh Imigrasi.
- II. Keseretan pelaksanaan penyelesaian dwi-kewarganegara-
an lebih men-djadi² karena keadaan ekonomi/finansil
yang suram memaksa sementara petugas menjari peng-
hasilan ekstra.
Akan tetapi pokok terutama dari keseretan ini dikuatir-
kan, karena sementara orang masih dihinngapi penjakit
rasialisme yang berpangkal pada komunisto-phobi atau
kiri-phobi, sehingga menjalahkan kebidjaksanaan yang
mempersulit orang mempertahankan/mendjadi warga-
negara Indonesia (Hal ini antara lain tergambar didalam
buku : „Hasil Kerdja Panitia Bersama“ oleh Drs.
Soesanto Tirtoprodjo SH).
- III. Kebidjaksanaan yang mempersulit penyelesaian masalah
kewarganegaraan setjara lantjar dapat mengakibatkan :
- a. masaalah orang asing yang rumit d'dalam negeri.
 - b. merugikan usaha pemerintah dalam mengerahkan
funds and forces progressif dalam rangka pemba-
ngunan semesta.
 - c. dapat merugikan martabat pemerintah Republik
Indonesia diforum internasional.
 - d. merugikan pelaksanaan Manipol dan merugikan
pelaksanaan kerangka ke-III revolusi, yang meng-
hendaki diperkokohnja setia-kawan antara sesama
negara Asia-Afrika.
- IV. Mengingat akan semua hal diatas, maka Kongres nasio-
nal ke-VIII Baperki mendesak Pemerintah untuk dengan
semangat Amanat Presiden pada resepsi Pembukaan
Kongres Nasional ke-VIII Baperki mengkoreksi kebi-

djaksanaannja dalam menyelesaikan masalah kewarga-
negara, agar pelaksanaan Pantja Program Front
Nasional, yang mendjadi kewajiban utama Pemerintah
dan seluruh Rakjat Indonesia dapat lebih disukseskan.

F. PERUNDANG-UNDANGAN

1. Kongres merasa berwadajiban mengerahkan massa Baperki
dengan mengikutsertakan semua Rakjat Indonesia yang
progressif untuk memperdjuaangkan penuangan isi Amanat
Pemimpin Besar Revolusi, Bung Karno pada Kongres
Nasional ke-VIII Baperki, dalam semua per-undang²an
nasional, termasuk djuga ditjoretnja istilah „asli“ dari
U.U.D. 1945.
2. Mendukung sepenuhnya putusan Seminar Hukum Nasional
1963 yang menentukan : Bung Karno, sebagai Penjuluh
dan Penundjuk Utama dalam membina rukum Nasional
yang didasarkan atas pengakuan, bahwa Pembentuk
Hukum adalah Rakjat dan Bung Karno mendjadi Penjam-
bung Lidahnja.
3. Sependapat sepenuhnya dengan Seminar Hukum Nasional
1963 mengenai keharusan mutlak penghapusan/perom-
bakan segala peraturan hukum warisan kolonial dan per-
aturan² lain yang bernafas anti-progressivisme dan berbau
feodalisme, kolonialisme dan imperialisme, misalnja : per-
aturan tentang Tjatan Sipil yang sekarang ada, Bedrijfs-
reglementerings-ordonantie dan sebagainya.

G. PENDIDIKAN

- I. Usaha² Baperki dibidang pendidikan tidak dapat dipi-
sah-pisahkan daripada perdjuaangan menyelesaikan re-
volusi Indonesia.
- II. Dibidang pendidikan usaha² Baperki bertudjuan me-
njiapkan tenaga² terdidik dan terlatih, tenaga² yang me-
iliki technical skill dan managerial know how berdasar-
kan diperkokohnja perasaan tanggung djawab serta
sanggup membangun masyarakat adil dan makmur,
masyarakat sosialis Indonesia (lihat tudjuan Pendidikan
J.P.K. Baperki A.D. pasal 3). Dengan demikian diper-
tegas, bahwa sekolah² dan fakultas² Baperki merupakan
usaha² kongkrit dalam rangka pengerahan kemungkinan
untuk melaksanakan tjita² Baperki.
- III. Dalam pelaksanaannja perlu dapat perhatian sepenuh-
nja :
1. Usaha² me-Manipol-kan pendidikan Baperki sebagai
keseluruhan.

2. Menanamkan pada peladjar mulai dari S.R. kesedaran berwarganegara tunggal Indonesia dan hidup bergotong-rojong baik dalam waktu beladjar maupun diluar.
3. Menanamkan Pantja Wardhana. Pantja Tjinta dan Sapta Usaha Tama dengan menjelenggarakan latihan² pada Hari Krida, Kepramukaan dan Pendidikan Teknik.
4. Mengusahakan Jajasan Pendidikan dan Kebudayaan Baperki untuk lebih memperhatikan kesedjahteraan guru dengan mengikut-sertakan organisasi P.O.M.G.
5. Menjelenggarakan musjawarah pendidikan nasional, kerakjatan dan ilmiah tingkat Pusat dengan follow-up ditingkat Daerah dan tingkat Tjabang Baperki.
6. Mengkongkritkan usaha² Jajasan Pendidikan dan Kebudayaan Baperki untuk mengembangkan pendidikan kedjuruan ditingkat pendidikan dasar dan perguruan tinggi, jang menguntungkan usaha memeralihkan modal dagang kebidang pembangunan industri.
7. Kerdja-sama dengan lain organisasi² untuk melaksanakan segala tjita² Baperki.
8. Mempertinggi kewaspadaan terhadap film², buku², madjalah² kesenian jang merugikan pembinaan mental manusia Indonesia Baru untuk sanggup membangun masjarakat adil dan makmur.
9. Tetap mempertinggi kewaspadaan terhadap usaha² neo-kolonialisme dibidang kebudayaan, mendukung usaha² untuk menurunkan harga alat² dan buku² peladjaran.

H. MEMPERKOKOH BAPERKI SEBAGAI ORGANISASI MASSA

- I. Dengan suara bulat Kongres menjetudju ketegasan ketua umum Baperki dalam pidato pembukaan Kongres di „Gelora Bung Karno” jang menjatakan :
„Baperki menerima dan turut aktif memperdjuangkan pelaksanaan Pantja Program, karena pelaksanaannya menjakup djuga pelaksanaan tjita² Baperki dan mendjamin penjelesaian soal² kewarganegaraan senafas dengan djiwa Proklamasi 17 Agustus 1945, jang ternjata mendjadi pendapat djuga dari Bung Karno kita.

Disamping itu massa pendukung Baperki telah menjadari, bahwa perdjuangan melaksanakan Pantja Program Front Nasional dengan sungguh² dan konsekwen

akan makan waktu dan memerlukan pengerahan seluruh kemampuan serta kekuatan nasional-revolusioner, disamping memerlukan konsentrasi dari segala perhatian terhadap pelaksanaannya.

Mengingat hal ini, maka terasa ada lebih menguntungkan, apabila kita tidak menimbulkan persoalan², jang tidak langsung bersangkutan dengan pelaksanaan Pantja Program tetapi dapat memetjah-belahkan perhatian dan usaha. Umpamanya persoalan „ganti nama”, „kawin tjampuran” „ganti agama”, jang djuga dikemukakan oleh sementara orang sebagai apa jang dinamakan „assimilasi total”. Karena soal memilih nama, soal memilih djodo, soal agama dan lain²nja adalah persoalan pribadi seseorang, maka berdasarkan mendjundjung tinggi hak² asasi manusia merupakan persoalan jang tidak dapat dan tidak boleh dipaksakan.

Berdasarkan pengertian, bahwa para pengandjurnja tentunja didorong oleh tjita² luhur untuk kepentingan Rakjat dan Tanah-Air Indonesia, dan tentunja setudju Pantja Sila, setudju Nasakom, bebas dari komunistophobi, kiri-phobi dan Rakjat-phobi, serta tentunja setudju dengan Pantja Program Front Nasional, maka untuk mendjamin kelantjaran pelaksanaan Pantja Program Front Nasional, jang penting artinja untuk merombak struktur masjarakat kolonial mendjadi masjarakat nasional-demokratis, jang mentjiptakan kondisi-kondisi menguntungkan bagi meningkatnja revolusi memasuki tahap ber-sosialisme-Indonesia nanti, maka kami dari Baperki mengadjak mereka untuk tidak memboroskan waktu dan uang bagi usaha², jang dikuatirkan dapat memetjah-belah konsentrasi perhatian terhadap pelaksanaan Pantja Program dan bekerdja-sama, kalau perlu berkompetisi dengan Baperki dalam usaha pengerahan funds & forces progressif guna mendjamin lantjaranja pelaksanaan Pantja Program Front Nasional.

Baperki yakin, bahwa bagi tiap orang revolusioner Indonesia dalam tingkat perdjuangan sekarang ini, jang digunakan sebagai ukuran untuk menilai seorang warganegara tentu bukanlah apakah ia sudah diassimilasi 100%, 80%, 50%, 25% atau 0%, jang sangat sulit ditentukan ukurannya. Tetapi jang mendjadi ukuran tentu sadja, apakah dari kata² jang satu dengan perbuatan²nja warganegara itu betul² Manipolis sedjati, atau Manipolis lip-service belaka atau anti Manipolis dan contra-revolusioner !

Oleh karena itu, marilah kita mengompakkan barisan kaum Manipolis dan mewujudkan kekuasaan Gotong-Rojong berporoskan Nasakom, yang menjamin pelaksanaan Pantja Program Front Nasional untuk menjamin kemudian pelaksanaan Manipol seluruhnya dan dengan demikian memperperjuangkan juga hapusnya rasialisme!

II. Berdasarkan persetudjuan atas pernyataan yang dikutip atas itu, maka Kongres memutuskan :

1. Mengintensifkan pendidikan kader² ber-Manipol, yang gigih, terlatih dan terdidik untuk mengkonsolidasi Baperki hingga dapat memperhebat kemampuan menjalankan tugas revolusi.

Mengintensifkan pendidikan kader dalam bidang khusus (gerakan koperasi, pemuda, wanita dan bidang pendidikan).

2. Mengintensifkan kegiatan² mempertahankan kepentingan pemuda, baik di bidang-bidang kesenian dan olahraga, maupun memperluas kesempatan bagi para pemuda untuk melatih diri dalam kursus² kedjuruan, untuk menjadikan mereka tenaga² yang lebih berguna dalam proses penyelesaian revolusi menuju masyarakat sosialis Indonesia.

Seksi Gerakan Pemuda Baperki wadajib mengadakan kerdjasama yang baik dengan semua organisasi yang sehaluan dengan perjuangan Baperki pada umumnya, khususnya perlu memberikan bimbingan dan bantuan kepada organisasi P.P.I., demi menjamin terlaksananya tjita² Baperki, yaitu menjadikan setiap tenaga² muda Baperki itu, menjadi tenaga yang lebih berguna bagi proses pembinaan masyarakat sosialis Indonesia.

3. Mengintensifkan kegiatan² dengan memperhatikan kepentingan wanita dalam mengerahkan dan memobilisasi potensi wanita, untuk terwujudnya hak² sama bagi wanita dan pria dalam masyarakat adil dan makmur.

Seksi Gerakan Wanita Baperki perlu diberi kesempatan yang lebih luas untuk mengembangkan inisiatifnya dan dipertinggi kesadaran politiknya, dengan memperluas tata-sibuk bagi massa wanita Baperki, terutama di bidang penjelenggaraan, pengawasan rumah² sekolah, kursus² kedjuruan dan koperasi produksi, keradjinan tangan dirumah, serta dimau mungkin menjelenggarakan B.K.I.A.².

4. Dalam rangka memperluas dan memperkuat badan

organisasi, Baperki berusaha terbentuknya tingkat² organisasi baru sesuai dengan daerahnya di Irian-Barat.

1. USAHA² MEMPERKOKOH THE NEW EMERGING FORCES

- I. Kongres mendukung dan ikut memperperjuangkan pelaksanaan usaha² yang menuju kearah kokohnya kedudukan Republik Indonesia sebagai kekuatan penting dalam barisan The New Emerging Forces dalam rangka memperperjuangkan pelaksanaan tiga kerangka revolusi Indonesia seperti ditentukan dalam Manipol. Dalam hubungan ini Kongres memutuskan.

1. Mendukung sepenuhnya keputusan Presiden Soekarno untuk segera keluar dari keanggotaan International Olympic Committee (IOC) dan mengkomando-kan untuk menjelenggarakan Games of New Emerging Forces (Ganefo) yang bersih dari pengaruh imperialisme dan neo-kolonialisme.
2. Mendukung penjelenggaraan KWAA yang pasti merupakan usaha menggalang setiakawan AA untuk memperkokoh kekuatan melawan pers imperialis, yang menghasut perang dan terang menjadi alat neo-kolonialisme.
3. Mendukung sepenuhnya usaha² untuk mengadakan Konferensi AA ke-II yang pasti meningkatkan rasa setiakawan dan solidaritas dalam menghadapi tantangan kaum imperialis, kolonialis/neo-kolonialis yang berusaha terus untuk memperlemah setiakawan AA dengan mengadudombakan sesama Rakyat Asia Afrika.

- II. Kongres mempertegas tekad Baperki untuk melenjapkan pandangan² rasialis dalam segala bentuk, berdasarkan pendirian, bahwa setudju Pantja Sila berarti melawan rasialisme.

Tekad Baperki itu perlu dipertegas, setelah memperhatikan perkembangan² di luar-negeri, bahwa pandangan² rasialis ternyata menjadi alat kaum imperialis untuk memetjah belah dan membentuk kekuasaan neo-kolonialisme, yaitu seperti terdjadi di Afrika Selatan sekarang ini.

Baperki selalu mendukung sikap tegas Pemerintah R.I. yang mendukung resolusi² P.B.B. untuk mengutuk dan menuntut hapusnya praktek² rasialis di Republik Afrika Selatan sebagai kedjahatan terhadap kemanusiaan.

Disamping ini kita melihat, bahwa pandangan² rasialis telah menjebabkan kaum reaksioner di India setjara a priori mentjurigai warganegara India peranakan Tionghoa, sedang di Malaya Tengku Abdulrachman, jang reaksioner, setjara a priori menjangsikan kesetiaan warganegara Malaya peranakan Indonesia, dan di Kalimantan Utara orang² Indonesia mengalami gangguan² jang memperkosa hak² azasi manusia.

Kesetiaan seorang terhadap tanah-airnja setjara tegas ternjata tidak ditentukan oleh darah atas asal-keturunan seorang, melainkan oleh banjak faktor² lain. Disamping itu sebagai warganegara, jang tjinta tanah air dan Rakjatnja, tentu selalu berhak untuk ikut berdjua mentjapai pelaksanaan aspirasi² nasional dalam rangka membebaskan rakjat dari penindasan dan segala matjam rasa ketakutan. Oleh karenanja, apabila ada warganegara Malaya peranakan Indonesia melawan kelaliman dan kereaksioneran Tengku Abdulrachman, sikap demikian itu bukanlah karena mereka tidak ingin melihat Rakjat Malaya hidup bebas dari segala bentuk penindasan. Sikap demikian ini adalah sikap patriotik, jang djustru tidak dimiliki oleh Tengku Abdulrachman.

III. Dalam rangka usaha memperkokoh The New Emerging Forces berdasarkan melaksanakan kerangka ketiga revolusi seperti digariskan oleh Manipol, Kongres Baperki memutuskan :

1. Menjatakan setiakawan se-hangat²nja pada rakjat² Kuba, Vietnam Selatan, Kalimantan Utara, Irak, Angola dan lain²nja jang sedang berdjua setjara heroik untuk menjempurnakan kemerdekaan nasional serta tegas menentang intervensi asing berterang maupun berkedok.
2. Mendukung tiap kutukan terhadap usaha² imperialis umumnja dan imperialis USA khususnja, jang melakukan intervensi bersendjata dan melakukan perang kuman untuk kepentingan bonekanja di Vietnam Selatan.
3. Menjokong sepenuhja perdjuaan rakjat Kalimantan Utara untuk mempertahankan kemerdekaan nasionalnja jang telah diproklamasikan.
4. Melawan pembentukan Malaysia dengan paksaan, apalagi pembentukan Malaysia sebagai perwujudan neo-kolonialisme menjebabkan wilajah R.I. dikepung oleh kaum imprialisme.

IV. Kongres menjerukan agar kita tetap mempertinggi kewaspadaan nasional kita dalam rangka usaha memper satukan kekuatan² nasional-revolusioner terhadap usaha² pengatjau oleh kekuatan² reaksioner luar negeri. Dalam hubungan ini perlu diperhatikan pengalaman² pahit negara² The New Emerging Forces dalam usaha mengembangkan tourisme, jang ternjata digunakan untuk melakukan perembesan² anasir² reaksioner, sedang beberapa negara Afrika mengumumkan pengalaman tidak enak dengan „Peace Corps” Amerika.

Djakarta, 17 Maret 1963

a.n. Pengurus Harian Pusat Baperki
Ketua Umum,

Siauw Giok Tjhan

APA ITU: EXCLUSIVISME ?

Apakah itu arti exclusivisme? Istilah ini dalam waktu akhir-2 ini banyak digunakan dan perlu diteliti betul artinja untuk men- tegah timbulnja kegandjilan² karena kekaburan pengertian dari satu istilah.

Exclusief sering diartikan „menjendiri” atau „mementjilkan” diri. Dengan pengertian ini, kita lalu menghadapi kenyataan, bahwa didalam masjarakat kita sekarang ini „exclusivisme” masih dapat dikatakan adalah hal yang dapat dikatakan „lumrah”. Dikatakan „lumrah”, karena dalam masjarakat kita, kita men- djumpai tjontoh² „exclusivisme” yang banyak matjamnja.

Umpamanja kita dalam masjarakat mengenal adanya Ikatan Dokter Indonesia yang menentukan hanya bisa menerima sebagai anggotanja orang² yang beridjazah dokter. Bukan dokter tidak bisa mendjadi anggota. Djadi organisasi itu adalah exclusief untuk dokter sadja.

Kita mengenal adanya Ikatan Sardjana Hukum, malahan ada djuga Ikatan Isteri Sardjana Hukum. Pun para isteri anggota tentara kita mempunyai organisasi yang exclusief, terbatas untuk para isteri anggota tentara kita sadja!

Tjontoh exclusivisme dibidang agama dan kesukuan pun tjukup banyak. Umpamanja kita mengenal adanya Dewan Geredja Batak, Dewan Geredja Tionghoa, Dewan Geredja Sunda, Dewan Ge- redja Maluku dllnja, yang disamping exclusief untuk penganut agama Keristen, djuga exclusief dalam hal kesukuan.

Lain tjontoh exclusivisme ialah adanya pembentukan organisasi Sardjana Lulusan Djepang. Mungkin nanti disusul lagi dengan organisasi Sardjana lulusan Amerika dan seterusnya!

Baik sekali kita perhatikan, bahwa ada sementara orang yang mempersoalkan yang oleh mereka dinamakan „exclusivisme rasial”.

Tentang hal ini kita perhatikan adanya kenyataan kita mengenal Dewan Geredja Batak dan lain²nja lagi. Dibanjak kota besar, kita djuga mengenal organisasi sosial dari orang² asal dari Minang, asal dari daerah Batak, disamping adanya organisasi² kesukuan seperti Pagujuban Pasundan, Isteri Pasundan, Mahasis- wa Pasundan, yang semuanya menutup pintu untuk orang² bukan asal dari suku Pasundan.

Dalam hubungan dengan „exclusivisme rasial” itu oleh semen- tara orang ada dikemukakan tjontoh „shopping centre” seperti Pasar Baru Djakarta-Raya dan Djalan Braga-Bandung. „Shop- ping centre” itu dikatakan exclusief, karena sebagian terbesar pe-

milik toko dan pelajanannja adalah orang² berasal dari satu suku, jaitu orang Tionghoa, baik warganegara Indonesia ataupun asing.

Apabila kita teliti setjara teliti, maka tjontoh Pasar Baru dan Djalan Braga sebagai „shopping centre” yang bersifat exclusief rasial adalah tidak tepat, karena toko² itu pasti tidak mempunyai alasan hidup, apabila exclusief untuk golongan Tionghoa sadja. Artinja tidak ada golongan suku lain yang datang berbelandja.

Pun anggapan, bahwa daerah itu adalah exclusief rasial pasti tidak tepat, karena tiap orang yang berani membajar, pasti dapat membeli atau mengoper toko yang mana sadja didaerah itu, tanpa memandang sukunja. Baik sekali kita perhatikan, bahwa di Pasar Baru dan Braga sudah terdapat banyak orang India mengoper toko yang dulunja milik orang Tionghoa. Pun pengusaha yang dinamakan „asli” dan yang berani membajar djuga telah mem- peroleh dan telah mengoper toko didaerah tersebut.

Djadi dalam memperhatikan kenyataan ini, maka ternjatalah setjara lebih djelas, bahwa usaha untuk menjatakan Pasar Baru dan Braga sebagai daerah „shopping centre” adalah „exclusief rasial”, mempunyai tudjuan politik & ekonomis yang tertentu. Politis dikuatirkan bahwa usaha itu bertudjuan untuk memberi alasan dan membenarkan tindakan² pengatjauan, yang oleh PJM Presiden Soekarno dikwalifikasi sebagai teror rasialis kontra- revolusioner! Ekonomis dikuatirkan mempunyai tudjuan untuk memeras dan memperoleh saham² kosong dan bisa mendjadi pe- milik sebagian perusahaan dengan menjalah-gunakan kedudukan sebagai pendjabat negeri. Dengan lain perkataan untuk mentjip- tikan kapitalisme birokrasi, yang dapat merupakan rintangan bagi proses pembinaan masjarakat sosialis Indonesia!

Tidak perlu disangkal, bahwa politik kolonialisme telah me- wariskan pada kita sisa² exclusivisme rasial, seperti adanya Patjinan sebagai warisan Passen & Wijkenstelsel, politik kolo- nial Belanda yang djahat untuk divide et imperanja. Disamping akibat HCK, yang didirikan sebagai imbanan HIK dan HCS sebagai imbanan HIS. Warisan kolonialisme itu memang perlu dikikis habis. Tentu timbullah persoalan; Bagaimana tjara meng- kikis habisnja?

Pasti bukan dengan tjara mengobarkan sentiment rasial atau prasangka rasial, yang mendjadi landasan untuk membangkitkan teror rasialis kontra-revolusi. Karena teror rasialis kontra-revo- lusi itu sangat merugikan perkembangan revolusi kita, yang tegas menudju kemasjarakat sosialis Indonesia.

Revolusi Indonesia, sama halnja dengan revolusi² lainnja, ada- lah revolusi yang bertudjuan mendjebol yang lama dan sekali gus membangun yang baru. Revolusi harus memperhatikan hukum² revolusi, artinja mengenal adanya tata-tertib atau „spelregels”

karena suatu revolusi itu bukan gerakan serampangan, bukan main tawur-tawuran, karena untuk mendjamin berhasilnya suatu revolusi kita perlu berusaha dan berdjuaug untuk mentjiptakan sjarat² politis dan ekonomis, mentjiptakan kondisi² politik dan ekonomis, yang mendjamin terwujudnya semua tjita² yang mendjadi sebab ditjetuskannya revolusi itu.

Djadi dengan memperhatikan kenyataan ini, soal² yang pokok dan penting yang harus kita selesaikan adalah tjara bagaimana kita bisa memenuhi semua sjarat politis dan ekonomis yang memperlantjar proses pembinaan masyarakat sosialis Indonesia. Dengan kata lain, yang penting dan pokok bukanlah mempersoalkan exclusivisme rasial, tetapi bagaimana kita dapat memperlantjar proses pembinaan masyarakat sosialis Indonesia.

Apabila penyelesaian exclusivisme rasial warisan kolonialisme, pasti ikut hapus dengan sendirinya dengan kemadjuan perkembangan pembangunan masyarakat sosialis Indonesia, yang tidak akan mengenal lagi sistim exploitation de l'home par l'home!

Dalam masyarakat, yang tidak mengenal lagi exploitation de l'home par l'home pasti lenjap segala napsu untuk golongan yang satu menindas golongan yang lain, djadi lenjap djuga napsu untuk membangkitkan prasangka rasial dan tidak ada alasan lagi untuk melaksanakan diskriminasi rasial!

Paling achir baik djuga diperhatikan persoalan penertiban organisasi nasional berdasarkan pandangan² keliru tentang „exclusivisme rasial“.

Dalam hubungan ini patut sekali diperhatikan, bahwa UUD 1945 pasal 28 mendjamin hak tiap orang warganegara untuk berorganisasi. Hak ini mengalami pembatasan dalam pelaksanaan penertiban partai politik dan organisasi, yang menjebabkan dilarangnya PSI dan Masjumi serta GPII. Tetapi patut sekali kita perhatikan bersama, bahwa larangan itu berdasarkan kenyataan, bahwa organisasi² itu ternyata membiarkan tokoh² pentingnya untuk mendjalankan kegiatan² politik yang merugikan revolusi, melakukan pemberontakan dan pertjobaan membunuh Presiden, tanpa ada hukuman organisatoris terhadap tokohnya yang menjeleweng itu.

Oleh karenanya, organisasi yang tegas menjatukan diri dengan barisan Rakjat yang revolusioner, yang tegas berdiri atas azas Pantja Sila dan memperdjuaugkan pelaksanaan Manipol serta semua pedoman-pedoman pelaksanaannya, adalah organisasi alat revolusi, yang dibutuhkan untuk mewujudkan pengintegrasian Pemerintah dan Rakjat yang terorganisasi, seperti dikemukakan didalam Deklarasi Ekonomi.

Organisasi yang tegas menjatukan diri dengan barisan Rakjat yang revolusioner tentu tidak dapat dikatakan sebagai organisasi

yang eksklusief rasial walaupun dalam pimpinannya ada duduk orang² yang dinamakan bukan asli.

Disamping itu organisasi yang tegas membuka, malahan mentang lebar² pintunya bagi tiap orang warganegara Indonesia yang se-azas, tidak mungkin dikwalifikasi sebagai eksklusief rasial, karena tidak pernah menentukan sjarat rasial ataupun sjarat kesukuan untuk mendjadi anggotanya!

Djadi kita perlu mempertinggi kewaspadaan nasional-revolusioner untuk mentjegah penjelewengan dengan sengadja membikin kabur pengertian istilah eksklusief untuk mereteli alat² revolusi dalam penyelesaian revolusi menudju kemasjarakat adil dan makmur, yang tidak mengenal lagi sistim penindasan manusia atas manusia!

Kesimpulan²:

1. Amanat Pemimpin Besar Revolusi, Bung Karno, tertanggal Bogor 15 Djuli 1963, dapat diterima dan penegasan² itu mengembirakan, karena istilah asimilasi total sebagai mutlak dalam nationbuilding Indonesia yang sering disalah gunakan, ternyata tidak ada didalam amanat itu. Dalam hubungan ini patut diperhatikan, bahwa yang dikehendaki oleh Presiden Soekarno adalah penjatuan, pembauran dalam tubuh bangsa Indonesia. Bukan „assimilasi total“ seperti dipropagandakan dan istilah „assimilasi“ diartikan dengan „pembauran“ dan penjatuan“, yang artinya telah dipertegas didalam Amanat Presiden Soekarno tertanggal 14 Maret. Penerbitan khusus Dep. Pen. No. 255.

2. Perlu tetap dipertinggi kewaspadaan nasional-revolusioner untuk menentang dengan djelas disalah-gunakannya istilah dan arti „assimilasi“ untuk suatu politik, yang bertudjuan mengalihkan perhatian kita daripada sasaran sesungguhnya revolusi Indonesia. Pensalah-gunaan istilah dan arti „assimilasi“ demikian itu adalah penjelewengan revolusi yang wadjib kita tjegah!

3. Nationbuilding Indonesia tegas menurut Manipol dan semua pedoman pelaksanaannya bertudjuan membangun masyarakat sosialis Indonesia, yang bersih daripada exploitation de l'homme par l'homme. Revolusi Indonesia itu mengenal dua matjam tahap dengan dua matjam tudjuan. Tahap sekarang ini adalah tahap nasional-demokratis, yang wadjib kita selesaikan setjara menguntungkan perkembangan revolusi dalam tahap ber-sosialisme Indonesia nanti. Djadi yang terpenting adalah mentjiptakan kondisi² politis dan ekonomis untuk memperlantjar proses revolusi. Untuk keperluan ini perlu ditjapai „samenbundeling van alle revolutionaris krachten“, yang oleh Presiden Soekarno dalam Kongres

WANI dipertegas perlu adanya pemerintahan Nasakom !

4. Penyelesaian masalah minoritas di Indonesia dan *hapusnja* asli dan tidak asli wadji kita perjuangankan dengan melaksanakan garis Presiden Soekarno, seperti dijelaskan didalam amanatnya pada Kongres Baperki ke-VIII, yang diterbitkan oleh Dep. Pen. dalam Penerbitan Khusus No. 255.

**SIAUW GIOK TJHAN :
TIDAK BENAR BAPERKI PERTAHANKAN
EKSKLUSIVISME !**

Djakarta, 23-7 (BT).

Perjuangan Baperki untuk mentjapai persatuan Nasional revolusioner yang kokoh guna memperlantjar proses revolusi ternjata telah berbuah baik dan terbantahlah anggapan salah yang menganggap se-olah² Baperki mempertahankan apa yang dinamakan „eksklusivisme“. Demikian Ketua Umum Baperki SiauW Giok Tjhan dalam sambutannya pada upatjara pengintegrasian 6000 pemuda peladjar dibawah kordinasi Baperki masuk kedalam Ikatan Pemuda Peladjar Indonesia (IPPI) hari Minggu jbl. Para pemuda peladjar tersebut seperti kita beritakan kemarin dari SLP/SLA Pasarbaru, JPP, Djatinegara, Tanahabang, Senen, Pantjoran, Kebajoranlama, Palmerah Djaja, dan Insjaf.

Oleh SiauW Giok Tjhan dikatakan bahwa masuknja peladjar tersebut kedalam IPPI membuktikan berhasilnja Baperki dalam melaksanakan sembojan „Manipol dulu, baru sardjana“.

Mengenai masalah eksklusivisme itu sendiri, SiauW menjatakan, bahwa eksklusivisme adalah warisan kolonial dan bentuknja banjak sekali. Misalnja, Ikatan Dokter² Indonesia adalah eksklusivisme untuk dokter² sadja, demikian pula eksklusivisme kesukuan seperti nampak pada Pengajuban Pasundan, Isteri Pasundan, Mahasiswa Pasundan, Dewan Geredja Batak, Dewan Geredja Djawa, Dewan Geredja Tionghoa dllnja.

Dikatakan oleh SiauW, eksklusivisme akan lenjap dengan likwidasi warisan² kolonialisme setjara revolusioner, dan oleh karenanya, maka SiauW berpendapat, bahwa penyelesaian masalah eksklusivisme tidak dapat di-pisah²kan dari usaha memperlantjar penyelesaian pembangunan masjarakat sosialis Indonesia.

Pertjepat pembangunan masjarakat sosialis

Djadi, yang terpenting dalam menghadapi masalah eksklusivisme sebagai suatu kenjataan akibat warisan kolonialisme adalah mempertjepat pembangunan masjarakat sosialis Indonesia, dan bukan

masalah eksklusivisme itu setjara tersendiri.

Persatuan atau pembauran (assimilasi) berdasarkan Amanat Presiden Soekarno kepada kongres Baperki dan berdasarkan Manipol tidak bisa diartikan lain daripada persatuan berdasarkan patriotisme, tjinta tanahair dan Rakjat Indonesia, tekad bulat anti imperialisme untuk menjempurnakan kemerdekaan nasional Indonesia dan tekad bulat berisi kesanggupan membangun masjarakat sosialis Indonesia.

Demikian kata SiauW Giok Tjhan yang menutup sambutannya pada upatjara peng-integrasian 6.000 pemuda² peladjar sekolah² Baperki Minggu Siang itu dengan penegasan, bahwa dengan begitu telah mendjadi djelas, bahwa masalah persatuan untuk nation building bukanlah harus didasarkan kepada persamaan ras yang berakibat andjuran kawin tjampuran, ganti nama atau ganti Agama yang oleh Wampa/Mempen dr. H. Roeslan Abdulgani sendiri dianggap sebagai ikatan lapuk.

*Disalin dari Harian „BINTANG TIMUR“
tgl. 23 Djuli 1963.*